

# 2026 LAPORAN KINERJA

*Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar*

## Semester I

## KATA PENGANTAR



Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar Semester I Tahun 2026 ini dapat tersusun dengan baik.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BBKK Makassar atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama enam bulan pertama di tahun 2026. Dokumen ini memberikan

gambaran komprehensif mengenai capaian program kegiatan serta evaluasi kinerja organisasi. Meski terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sepenuhnya karena masih dalam tahap proses pelaksanaan, kami optimis target yang telah ditetapkan dapat terealisasi secara maksimal pada akhir tahun 2026.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dan pelayanan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar di masa mendatang

Makassar, 14 Juli 2026

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan  
Makassar,



**dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM**  
NIP 196902192002121003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar selaku Pihak Pertama dan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI sebagai pihak kedua tanggal 29 Januari 2026. Dalam perjanjian kinerja tahun 2026 terdapat 7 (tujuh) indikator yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun 7 (tujuh) indikator kinerja beserta realisasi dan capaian selama semester I tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah  
Target bernilai 76%, realisasi bernilai 100%, sehingga capaian kinerja menjadi 131,58%.  
Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.905.636.000,- realisasi Rp. 1.788.139.350,- sebesar 45,78%.
2. Nilai SAKIP  
Target 83, realisasi 84,60%, serta capaian sebesar 101,93%.  
Tidak terdapat pagu anggaran pada indikator SAKIP, karena pelaksanaan evaluasi SAKIP menggunakan metode daring yang tidak menggunakan anggaran.
3. Nilai Kinerja Anggaran  
Target bernilai 46,38, realisasi 74,38, sehingga capaian menjadi 160, 37%  
Tidak terdapat pagu anggaran pada indikator Nilai Kinerja Anggaran, karena dalam pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran, karena dilakukan sebagai rutinitas harian serta kegiatan monevnya dilaksanakan secara daring.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti  
Pada saat penetapan PK BBKK Makassar tahun 2026 ditetapkan target sebesar 95%, namun sampai Juni 2026 tidak terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, sehingga tidak terdapat realisasi pada IKK ini.
5. Persentase Realisasi Anggaran  
Target 48%, realisasi 48,48%, serta capaian sebesar 101%  
Pagu Anggaran Rp. 25.761.391.000,- realisasi Rp. 12.835.089.154,- sebesar 49,82%

6. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam  
Target 95%, realisasi 100%, dengan capaian sebesar 105,26%  
Pagu Anggaran Rp. 832.658.000,- realisasi Rp. 163.116.965,- sebesar 19,71%
7. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK *zero tolerance*  
Target nilai 0 penyalahgunaan, realisasi 0, serta capaian sebesar 100%  
Tidak terdapat anggaran dalam indikator Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK *zero tolerance*

Capaian tertinggi terdapat pada indikator 3 yaitu Nilai Kinerja Anggaran dengan besaran capaian 160,37%. Untuk indikator 4 Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti di tahun 2026 masih bernilai 0 karena BBKK Makassar di tahun 2026 belum menjadi sampel pemeriksaan oleh BPK, sehingga untuk rata-rata capaian kami tidak menggunakan sebagai pembagi. Untuk rata-rata capaian dengan jumlah 6 (enam) indikator sebesar 116,69%.

Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan BBKK Makassar tahun 2026 bersumber dari pagu sebesar Rp. 30.499.685.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan Semester I sebesar Rp. 14.787.345.469,- atau sebesar 48,48%.

Dalam laporan kinerja ini Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Surabaya, Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Medan, dan Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Batam, dijadikan sebagai pembanding capaian kinerja untuk ke 7 indikator kinerja, hal ini karena BBKK tersebut dengan BBKK Makassar memiliki karakteristik yang hampir sama, meliputi :

1. Klasifikasi kelas yang sama yaitu Balai Besar;
2. Lingkup kawasan yang memiliki Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
3. Melayani embarkasi/debarkasi haji.



## DAFTAR ISI

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                            | i   |
| Ringkasan Eksekutif .....                       | ii  |
| Daftar Isi .....                                | iv  |
| Daftar Gambar .....                             | v   |
| Daftar Tabel .....                              | vi  |
| Daftar Grafik .....                             | vii |
| BAB I Pendahuluan .....                         | 1   |
| A. Latar Belakang .....                         | 1   |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi .....                 | 2   |
| C. Visi dan Misi .....                          | 3   |
| D. Struktur Organisasi .....                    | 6   |
| E. Sumber Daya Manusia .....                    | 9   |
| F. Sistematika Penulisan .....                  | 14  |
| BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ..... | 16  |
| A. Perencanaan Kinerja .....                    | 16  |
| 1. Rencana Aksi Kegiatan .....                  | 16  |
| 2. Rencana Kinerja Tahunan .....                | 17  |
| B. Perjanjian Kinerja .....                     | 18  |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja .....             | 20  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....             | 20  |
| B. Realisasi Anggaran .....                     | 72  |
| BAB IV Penutup .....                            | 77  |
| A. Kesimpulan .....                             | 77  |
| B. Rencana Tindak Lanjut .....                  | 79  |
| Pustaka Acuan .....                             | 80  |
| Penyusun .....                                  | 81  |
| Lampiran .....                                  | 82  |

## DAFTAR GAMBAR

|              |                                                                                                   |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I.1   | Struktur Organisasi BBKK Makassar Tahun 2026.....                                                 | 7  |
| Gambar II.1  | Cascading, Tujuan, Sasaran, dan IKK BBKK Makassar<br>tahun 2026 .....                             | 16 |
| Gambar III.1 | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBKK Makassar<br>Tahun 2025 oleh Tim SKI BBKK Makassar ..... | 35 |
| Gambar III.2 | Nilai Kinerja Anggaran Dashboard Aplikasi SMART .....                                             | 43 |
| Gambar III.3 | Realisasi Anggran dari Aplikasi SAKTI .....                                                       | 51 |

## DAFTAR TABEL

|             |                                                                                                                                                                 |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel I.1   | Jabatan Struktural BBKK Makassar Tahun 2026 .....                                                                                                               | 10 |
| Tabel I.2   | Jabatan Fungsional Teknis BBKK Makassar Tahun 2026 .....                                                                                                        | 10 |
| Tabel I.3   | Jabatan Fungsional Administrasi BBKK Makassar<br>Tahun 2026.....                                                                                                | 11 |
| Tabel I.4   | Jabatan Fungsional Umum Teknis BBKK Makassar<br>Tahun 2026 .....                                                                                                | 11 |
| Tabel I.5   | Jabatan Fungsional Umum Administrasi BBKK Makassar<br>Tahun 2026.....                                                                                           | 11 |
| Tabel I. 6  | Jabatan Pelaksana (CPNS) BBKK Makassar Tahun 2026.....                                                                                                          | 11 |
| Tabel II.1  | Matriks RAK BBKK Makassar Tahun 2025-2029 Revisi<br>Januari 2026 .....                                                                                          | 17 |
| Tabel II.2  | Indikator Kinerja RKT BBKK Makassar Tahun 2026 .....                                                                                                            | 18 |
| Tabel II.3  | Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2026 .....                                                                                                               | 19 |
| Tabel II.4  | Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar<br>Tahun 2026.....                                                                                     | 19 |
| Tabel III.1 | Pengukuran Kinerja BBKK Makassar<br>Semester 1 Tahun 2026.....                                                                                                  | 20 |
| Tabel III.2 | Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase Pintu<br>Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor<br>Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah ..... | 22 |
| Tabel III.3 | Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana BBKK<br>Makassar Semester I Tahun 2026 .....                                                                         | 72 |
| Tabel III.4 | Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja BBKK<br>Makassar Semester I Tahun 2026 .....                                                                       | 73 |
| Tabel III.5 | Realisasi Anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output<br>(KRO) dan Rincian Output (RO) Kegiatan BBKK<br>Makassar Semester I Tahun 2026 .....                | 73 |
| Tabel III.6 | Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja<br>BBKK Makassar Semester I Tahun 2026 .....                                                        | 76 |
|             | Semester I Tahun 2025 .....                                                                                                                                     | 34 |

## DAFTAR GRAFIK

|               |                                                                                                                                  |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik I.1    | Distrtribusi ASN berdasarkan Jenis Jabatan BBKK<br>Makassar Tahun 2026 .....                                                     | 11 |
| Grafik I.2    | Distribusi ASN berdasarkan Golongan BBKK Makassar<br>Tahun 2026 .....                                                            | 12 |
| Grafik I.3    | Distribusi ASN menurut Jenjang Pendidikan BBKK<br>Makassar Tahun 2026 .....                                                      | 12 |
| Grafik III.1  | Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator ke-1<br>BBKK Makassar Semester I Tahun 2026 .....                          | 23 |
| Grafik III.2  | Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 BBKK Makassar<br>Semester 1 Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya.....                        | 23 |
| Grafik III.3  | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-1<br>BBKK Makassar Semester I Tahun 2026 dengan<br>Target Jangka Menengah .....   | 24 |
| Grafik III.4  | Perbandingan target nasional dengan realisasi<br>Semester I Tahun 2026 .....                                                     | 24 |
| Grafik III.5  | Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I<br>Tahun 2026 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam .....                   | 25 |
| Grafik III.6  | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-2<br>BBKK Makassar Semester I tahun 2026 .....                                    | 35 |
| Grafik III.7  | Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar<br>Semester 1 Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya .....                       | 36 |
| Grafik III.8  | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-2 BBKK<br>Makassar Semester I Tahun 2026<br>dengan Target Jangka Menengah .....   | 37 |
| Grafik III.9  | Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I<br>Tahun 2026 Indikator ke-2 dengan BBKK Medan,<br>Surabaya, dan Batam ..... | 37 |
| Grafik III.10 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-3<br>BBKK Makassar Semester I tahun 2026 .....                                    | 44 |
| Grafik III.11 | Perbandingan Perbandingan Realisasi Indikator Ke-3 BBKK<br>Makassar Semester 1 Tahun 2026 dengan<br>tahun sebelumnya .....       | 44 |
| Grafik III.12 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK                                                                            |    |

|               |                                                                                                                                  |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|               | Makassar Semester I Tahun 2026 dengan Target<br>Jangka Menengah.....                                                             | 45 |
| Grafik III.13 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I<br>Tahun 2026 Indikator ke-3 dengan BBKK Medan,<br>Surabaya, dan Batam ..... | 45 |
| Grafik III.14 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-5<br>BBKK Makassar Semester I tahun 2026 .....                                    | 51 |
| Grafik III.15 | Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar<br>Semester 1 Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya .....                       | 52 |
| Grafik III.16 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-5<br>BBKK Makassar Semester I Tahun 2026 dengan<br>Target Jangka Menengah .....   | 52 |
| Grafik III.17 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I<br>Tahun 2026 indikator ke-5 dengan BBKK Medan,<br>Surabaya, dan Batam ..... | 53 |
| Grafik III.18 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-6<br>BBKK Makassar Semester I tahun 2026 .....                                    | 60 |
| Grafik III.19 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-6 BBKK<br>Makassar Semester I Tahun 2026 dengan Target Jangka<br>Menengah .....   | 61 |
| Grafik III.20 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I<br>Tahun 2026 Indikator ke-6 dengan BBKK Medan,<br>Surabaya, dan Batam ..... | 61 |
| Grafik III.21 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-6<br>BBKK Makassar Semester I tahun 2026 .....                                    | 66 |
| Grafik III.22 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-7 BBKK<br>Makassar Semester I Tahun 2026 dengan Target Jangka<br>Menengah .....   | 67 |
| Grafik III.23 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I<br>Tahun 2026 Indikator ke-7 dengan BBKK Medan,<br>Surabaya, dan Batam ..... | 67 |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, BBKK Makassar merupakan unit pelaksana teknis (UPT) bidang Kekarantinaan Kesehatan yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan tanggal 31 Desember 2024, BBKK Makassar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKK Makassar dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan rencana kinerja Semester I tahun 2026 yang telah ditetapkan. Penyusunan LKj mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis dari Perpres tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026 terdapat 2 (dua) sasaran program Ditjen Penanggulangan Penyakit untuk BBKK Makassar yaitu :

1. Meningkatnya pengendalian factor risiko di pintu masuk negara;
2. Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan sasaran program tersebut mengacu pada 7 indikator, yaitu :

1. Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
2. Nilai SAKIP
3. Nilai Kinerja Anggaran
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
5. Persentase Realisasi Anggaran
6. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam
7. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK *zero tolerance*.

Capaian indikator tersebut akan dibahas dan dianalisa dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja (LKj) BBKK Makassar Semester I tahun 2026.

Beberapa isu strategis Balai Besar Keekarantinaan Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran, namun target kinerja dan kualitas layanan public harus tetap ditingkatkan
2. Tidak semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus menyewa ruangan.
3. Tenaga di wilker masih terbatas sedangkan kegiatan yang dilaksanakan mewakili semua kelompok Tim Kerja yang ada di induk, sehingga terdapat pendampingan petugas dari induk BBKK Makassar serta pemanfaatan tenaga kader untuk kegiatan tertentu sesuai dengna kompetensinya.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Keekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas di atas, UPT Bidang Keekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

### **C. VISI DAN MISI**

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden, yaitu “Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Visi Dirjen Penanggulangan Penyakit ditetapkan selaras dengan visi Kementerian Kesehatan yaitu Populasi bebas penyakit mendukung Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Balai Kekarantinaan Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen P2 menetapkan visi yang sejalan dengan visi Ditjen P2 yakni Pintu Masuk serta bandara dan pelabuhan domestik yang bebas dari penularan penyakit dan faktor risiko penyakit berpotensi KLB/wabah. Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Bersama Indonesia Maju,

Menuju Indonesia Emas 2045”, maka telah ditetapkan 8 (delapan) misi Presiden tahun 2025-2029, yakni :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna mendukung Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, sebagai berikut :

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;

4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju;
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif dan efisien.

Seiring dengan misi Kemenkes, maka misi dari Ditjen Penanggulangan Penyakit, yakni :

1. Menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit.
3. Memperkuat program imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
4. Mengendalikan risiko lingkungan terhadap kesehatan melalui pengawasan dan peningkatan kualitas sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan pengawasan lingkungan berbasis risiko
5. Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dengan mengembangkan sistem surveilans, dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/ wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi diwilayah dan pintu masuk negara
6. Meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui Perencanaan berbasis data, Transparansi anggaran dan pelaporan program, Monitoring dan evaluasi berkala dan objektif, Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola program

Adapun misi dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, yakni :

1. Meningkatkan sistem surveilans, kemampuan deteksi penyakit, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit berpotensi KKMMMD
2. Meningkatkan tata kelola pelayanan dan dukungan manajemen kekarantina kesehatan yang bersih dan akuntabel yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi
3. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di pintu masuk negara, wilayah buffer dan perimeter
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia
5. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi efektif dengan jejaring.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi dan tata kerja BBKK Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023. Struktur organisasi BBKK Makassar terdiri atas :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Instalasi

Struktur organisasi BBKK Makassar tahun 2026 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar I.1 berikut.



Gambar I.1  
Struktur Organisasi Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar Tahun 2026



**Uraian tugas masing-masing adalah :**

1. Sub Bagian Administrasi Umum
  - a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.
2. Instalasi
  - a. Unit pelayanan non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
  - b. Dipimpin oleh kepala instalasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi.
3. Wilayah Kerja BBKK Makassar
  - a. Memberikan pelayanan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
  - b. Dipimpin oleh kepala Wilker, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar.
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Makassar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
  - b. Dalam pelaksanaan tugas kelompok fungsional ditetapkan Ketua Tim Kerja.
  - c. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- d. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- f. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **E. SUMBER DAYA MANUSIA**

Jumlah pegawai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tahun 2026 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang ASN berdasarkan DUK Juni 2026 yang terdiri dari 130 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 9 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja). BBKK Makassar juga disupport oleh tenaga outsourcing satpam sebanyak 7 orang, sopir sebanyak 13 orang, dan cleaning service sebanyak 9 orang.

### **1. Menurut Jabatan:**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| a) ASN                                        | = 139 orang |
| 1) Jabatan Struktural                         | = 2 orang   |
| 2) Jabatan Fungsional Teknis (JFT)            | = 96 orang  |
| 3) Jabatan Fungsional Administrasi (JFT)      | = 16 orang  |
| 4) Jabatan Fungsional Umum Teknis (JFU)       | = 11 orang  |
| 5) Jabatan Fungsional Umum Administrasi (JFU) | = 7 orang   |
| 6) Jabatan Pelaksana (JP) (CPNS)              | = 7 orang   |
| b) Non ASN                                    | = 29 orang  |
| 1) Pengamanan Kantor (Satpam)                 | = 7 orang   |
| 2) Pengemudi (Sopir)                          | = 13 orang  |
| 3) Cleaning Service                           | = 9 orang   |

Tabel I.1, I.2, I.3, I.4, dan I.5 menunjukkan pengelompokan ASN berdasarkan jabatan.

Tabel I.1 Jabatan Struktural BBKK Makassar Tahun 2026

| No.           | Pejabat Struktural                  | Jumlah (Orang) |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 1.            | Kepala BBKK Makassar                | 1              |
| 2.            | Kepala Sub Bagian Administrasi Umum | 1              |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>2</b>       |

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa di BBKK Makassar terdapat 2 pejabat struktural yaitu Kepala BBKK Makassar dan Kasubag Adum.

Tabel I.2 Jabatan Fungsional Teknis BBKK Makassar Tahun 2026

| No.           | Fungsional Teknis                                 | Jumlah (Orang) |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Dokter Ahli Madya (JFT)                           | 4              |
| 2             | Dokter Gigi Ahli Madya (JFT)                      | 1              |
| 3             | Dokter Ahli Muda (JFT)                            | 12             |
| 4             | Perawat Ahli Madya (JFT)                          | 1              |
| 5             | Perawat Ahli Muda (JFT)                           | 3              |
| 6             | Perawat Ahli Pertama (JFT)                        | 6              |
| 7             | Perawat Penyelia (JFT)                            | 4              |
| 8             | Perawat Mahir (JFT)                               | 8              |
| 9             | Perawat Terampil (JFT)                            | 5              |
| 10            | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)     | 2              |
| 11            | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JFT) | 1              |
| 12            | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (JFT)     | 1              |
| 13            | Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (JFT)        | 1              |
| 14            | Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)            | 6              |
| 15            | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)             | 8              |
| 16            | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)          | 3              |
| 17            | Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)                 | 1              |
| 18            | Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)              | 2              |
| 19            | Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)              | 1              |
| 20            | Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)               | 3              |
| 21            | Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)            | 4              |
| 22            | Entomolog Kesehatan Penyelia (JFT)                | 1              |
| 23            | Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)                   | 2              |
| 24            | Entomolog Kesehatan Terampil (JFT)                | 1              |
| 25            | Sanitarian Ahli Madya (JFT)                       | 1              |
| 26            | Sanitarian Ahli Muda (JFT)                        | 6              |
| 27            | Sanitarian Ahli Pertama (JFT)                     | 5              |
| 28            | Sanitarian Mahir (JFT)                            | 1              |
| 29            | Sanitarian Terampil (JFT)                         | 2              |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>96</b>      |

Tabel I.3 Jabatan Fungsional Administrasi BBKK Makassar Tahun 2026

| No.           | Fungsional Administrasi                               | Jumlah (Orang) |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JFT)   | 1              |
| 2             | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JFT)    | 3              |
| 3             | Pranata Keuangan APBN Penyelia (JFT)                  | 1              |
| 4             | Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)                     | 3              |
| 5             | Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)                  | 1              |
| 6             | Perencana Ahli Muda (JFT)                             | 1              |
| 7             | Perencana Ahli Pertama (JFT)                          | 1              |
| 8             | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (JFT) | 1              |
| 9             | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (JFT)      | 1              |
| 10            | Arsiparis Ahli Muda (JFT)                             | 1              |
| 11            | Arsiparis Ahli Pertama (JFT)                          | 2              |
| <b>Jumlah</b> |                                                       | <b>16</b>      |

Tabel I.4 Jabatan Fungsional Umum Teknis BBKK Makassar Tahun 2026

| No.           | Fungsional Umum Teknis                     | Jumlah (Orang) |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1             | Penata Kelola Layanan Kesehatan (JFU)      | 5              |
| 2             | Pengelola Layanan Kesehatan (JFU)          | 3              |
| 3             | Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JFU) | 1              |
| 4             | Entomolog Kesehatan Ahli (JFU)             | 1              |
| 5             | Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)      | 1              |
| <b>Jumlah</b> |                                            | <b>11</b>      |

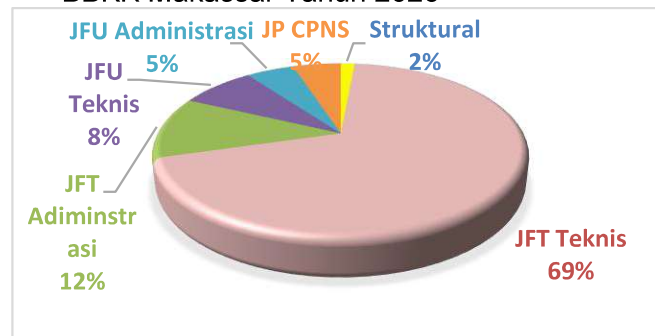
Tabel I.5 Jabatan Fungsional Umum Administrasi BBKK Makassar Tahun 2026

| No.           | Fungsional Umum Administrasi        | Jumlah (Orang) |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 1             | Penata Layanan Operasional (JFU)    | 6              |
| 2             | Pengelola Layanan Operasional (JFU) | 1              |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>7</b>       |

Tabel I.6 Jabatan Pelaksana (CPNS) BBKK Makassar Tahun 2026

| No.           | Pelaksana (CPNS)                                   | Jumlah (Orang) |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Epidemiolog Kesehatan Terampil (JP)                | 3              |
| 2             | Sanitarian Terampil (JP)                           | 3              |
| 3             | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (JP) | 1              |
| <b>Jumlah</b> |                                                    | <b>7</b>       |

Grafik I.1 Distribusi ASN berdasarkan Jenis Jabatan  
BBKK Makassar Tahun 2026



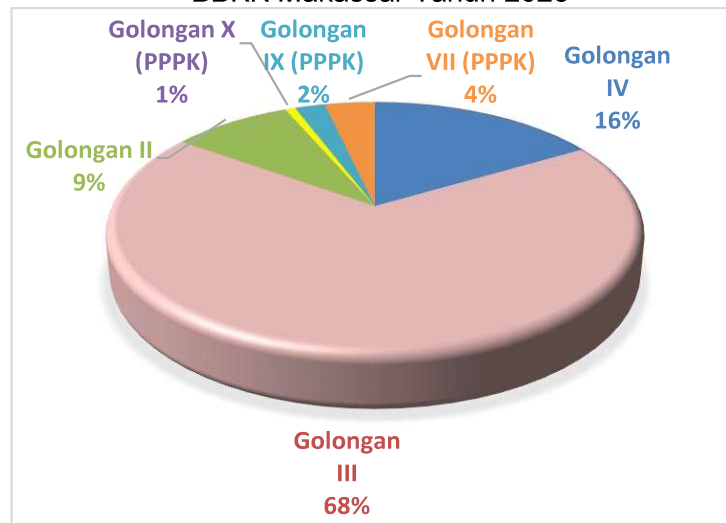
Grafik I.1 menunjukkan persentase terbesar pegawai BBKK Makassar adalah JFT Teknis sebesar 69% dan yang terkecil 2 % untuk pejabat structural.

JFU teknis dan administrasi akan berproses menjadi JFT sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk JP yang masih berstatus calon PNS, akan berubah statusnya menjadi JFT setelah menjadi PNS.

## 2. Menurut Golongan :

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| a) Golongan IV         | = | 23 orang |
| b) Golongan III        | = | 95 orang |
| c) Golongan II         | = | 12 orang |
| d) Golongan X (PPPK)   | = | 1 orang  |
| e) Golongan IX (PPPK)  | = | 3 orang  |
| f) Golongan VII (PPPK) | = | 5 orang  |

Grafik I.2 Distribusi ASN berdasarkan Golongan BBKK Makassar Tahun 2026

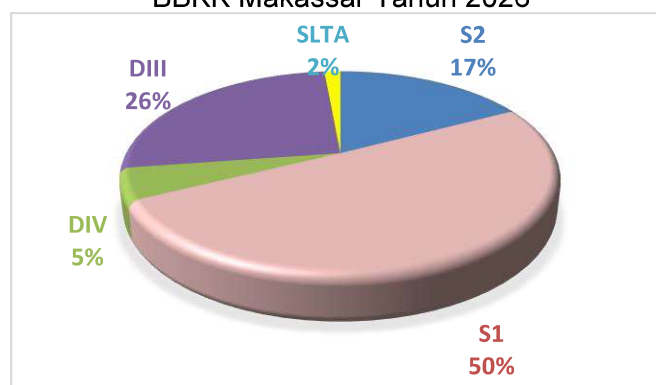


Berdasarkan grafik I.2 ASN BBKK Makassar terbesar berada pada Golongan III sebanyak 68% dan yang terkecil pada Golongan X sebesar 1%. Golongan VII, IX dan X merupakan golongan untuk ASN PPPK.

### 3. Menurut Pendidikan:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| a) S2   | = | 24 orang |
| b) S1   | = | 70 orang |
| c) DIV  | = | 7 orang  |
| d) DIII | = | 36 orang |
| e) SMA  | = | 2 orang  |

Grafik I.3 Distribusi ASN menurut Jenjang Pendidikan BBKK Makassar Tahun 2026



Berdasarkan Grafik I.3 distribusi ASN BBKK Makassar terbanyak pada jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 50% dan yang terkecil sebanyak 1% pada jenjang pendidikan SMA. Jenjang S1 dan DIII menempati urutan 1 dan 2 karena adanya kesempatan tugas belajar yang dibiayai oleh Kemenkes dengan mengikuti rangkaian aturan baik secara administrasi maupun akademik sesuai dengan MOU yang ditetapkan antara Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, sehingga ASN BBKK Makassar dapat mengupgrade jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensinya dari DIII ke Strata 1.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Membandingkan realisasi kinerja dengan 3 (tiga) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang meunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan mewujudkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan indicator dan rincian output.

#### **BAB IV Penutup**

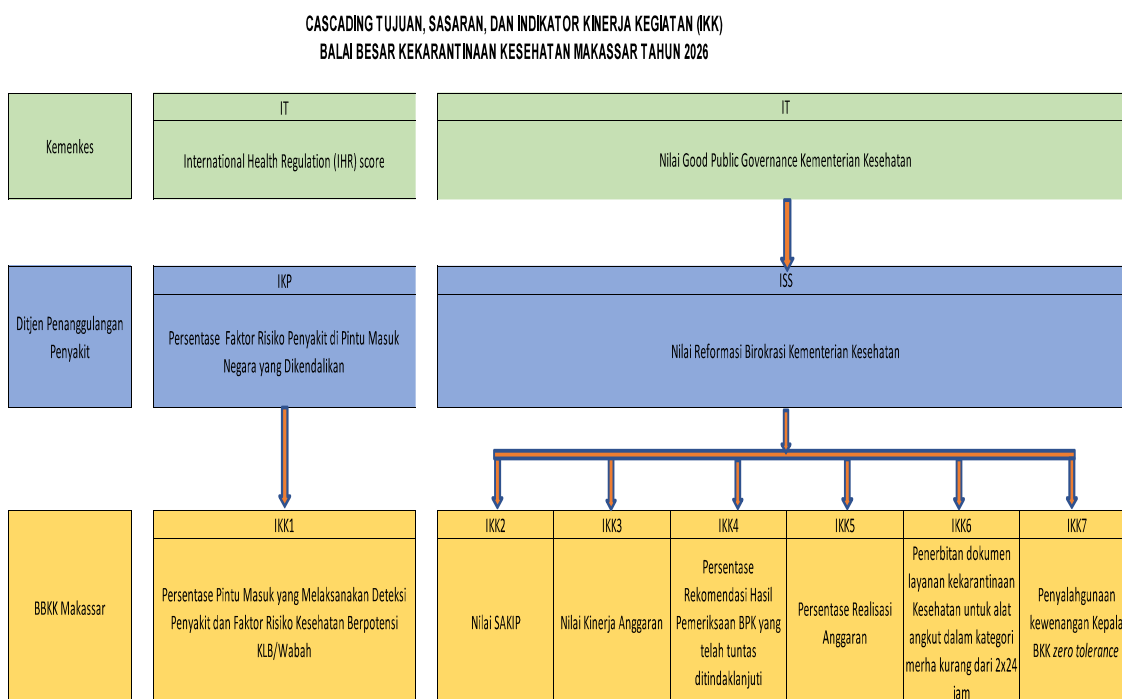
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas dua bagian yaitu Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026. Berikut ini cascading perencanaan kinerja tahun 2026 akan tergambar di Gambar II.1.



**Gambar II.1**  
Cascading, Tujuan, Sasaran, dan IKK BBKK Makassar tahun 2026

#### 1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

RAK Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Program Penanggulangan Penyakit serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. BBKK Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI. Olehnya itu, kegiatan yang

dilaksanakan di BKK harus mendukung program yang direncanakan pada Ditjen P2.

Matriks RAK 2025-2029 BBKK Makassar ditampilkan dalam tabel II.1 Revisi Januari 2026.

Tabel II.1 Matriks RAK BBKK Makassar  
Tahun 2025-2029 Revisi Januari 2026

| No | Sasaran                                                                           | Indikator                                                                                                     | Target |                  |                  |                  |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                                                                                   |                                                                                                               | 2025   | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
| 1  | Meningkatnya pengendalian factor risiko di pintu masuk negara                     | 1. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah |        | 76%              | 79%              | 82%              | 85%              |
| 2  | Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan | 2. Nilai SAKIP                                                                                                |        | 83               | 83               | 83               | 83               |
|    |                                                                                   | 3. Nilai Kinerja Anggaran                                                                                     | 85     | 92,75            | 92,75            | 92,95            | 93,15            |
|    |                                                                                   | 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti                             | 95%    | 95%              | 95%              | 95%              | 95%              |
|    |                                                                                   | 5. Persentase Realisasi Anggaran                                                                              | 96%    | 96%              | 96%              | 96%              | 96%              |
|    |                                                                                   | 6. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang Dari 2x24 Jam   |        | 95%              | 95%              | 95%              | 95%              |
|    |                                                                                   | 7. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance                                                        |        | 0 penyalahgunaan | 0 penyalahgunaan | 0 penyalahgunaan | 0 penyalahgunaan |

Dari tabel II.1 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2025-2029 Revisi Januari 2026 RAK BBKK Makassar terlihat pada indikator 1, 2, 6 dan 7 berbeda dengan tahun 2025.

## 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari RAK tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahunan kemudian menjadi acuan dalam

dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar tahun 2026, telah disusun indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel II.2 Indikator Kinerja RKT  
Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2026

| No | Sasaran                                                                           | Indikator                                                                                                     | Target           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya pengendalian factor risiko di pintu masuk negara                     | 1. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah | 76%              |
| 2  | Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan | 2. Nilai SAKIP                                                                                                | 83               |
|    |                                                                                   | 3. Nilai Kinerja Anggaran                                                                                     | 92,75            |
|    |                                                                                   | 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti                             | 95%              |
|    |                                                                                   | 5. Persentase Realisasi Anggaran                                                                              | 96%              |
|    |                                                                                   | 6. Penerbitan Dokumen Layanan Kekeantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang Dari 2x24 Jam    | 95%              |
|    |                                                                                   | 7. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance                                                        | 0 penyalahgunaan |

Sumber Data : RKT BBKK Makassar 2026

## B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar sebagai tanda kesanggupan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit selaku atasan langsung untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka

pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja awal Tahun 2026 yang ditandatangani pada Januari 2026 dapat dilihat pada tabel II.3.

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2026

| No | Sasaran                                                                           | Indikator                                                                                                     | Target           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya pengendalian factor risiko di pintu masuk negara                     | 1. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah | 76%              |
| 2  | Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan | 2. Nilai SAKIP                                                                                                | 83               |
|    |                                                                                   | 3. Nilai Kinerja Anggaran                                                                                     | 92,75            |
|    |                                                                                   | 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti                             | 95%              |
|    |                                                                                   | 5. Persentase Realisasi Anggaran                                                                              | 96%              |
|    |                                                                                   | 6. Penerbitan Dokumen Layanan Kekekarantina Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang Dari 2x24 Jam   | 95%              |
|    |                                                                                   | 7. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance                                                        | 0 penyalahgunaan |

Tabel II.4 Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2026

| No           | Kegiatan                                                                              | Anggaran                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1            | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit | Rp. 25.761.391.000,-        |
| 2            | Penyelenggaraan Pelayanan Kekekarantina Kesehatan                                     | Rp. 4.738.294.000,-         |
| <b>Total</b> |                                                                                       | <b>Rp. 30.499.685.000,-</b> |

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar untuk tahun 2026 melakukan pengukuran terhadap indikator yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan target serta membandingkannya dengan hasil tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja indikator dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sehingga diperoleh data capaian.

Hasil pengukuran kinerja akan menghasilkan data berupa informasi masing-masing indikator, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan program/kegiatan di masa akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Di samping itu pengukuran kinerja juga memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RAK dan Perjanjian Kinerja.

Sasaran yang akan dicapai dalam indikator kinerja yakni meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penanggulangan Penyakit.

Adapun indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar tahun 2026 tertera dalam tabel III.1 di bawah ini :

**Tabel III.1 Pengukuran Kinerja BBKK Makassar  
Semester I Tahun 2026**

| <b>No.</b> | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                                   | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1          | Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah | 76%           | 100%             | 131,58%        |
| 2          | Nilai SAKIP                                                                                                | 83            | 84,60            | 101,93%        |
| 3          | Nilai Kinerja Anggaran                                                                                     | 46,38         | 74,38            | 160,37%        |
| 4          | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti                             | 95%           |                  |                |

| No. | Indikator Kinerja                                                                                        | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 5   | Persentase Realisasi Anggaran                                                                            | 48%    | 48,48%    | 101,00% |
| 6   | Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang Dari 2x24 Jam | 95%    | 100,00%   | 105,26% |
| 7   | Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance                                                      | 0      | 0,00%     | 100,00% |

Berdasarkan tabel III.1 di atas terdapat 1 (satu) indikator yang tidak terdapat realisasi karena BBKK Makassar tidak menjadi sampling pemeriksaan BPK sampai Juni 2026.

Capaian indikator Semester I tahun 2026 akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut :

#### 1. INDIKATOR PERTAMA

##### **Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah**

##### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2) International Health Regulations (IHR) 2005;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB), Wabah, dan Krisis Kesehatan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

##### b. Pengertian

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase pintu masuk suatu wilayah yang sudah menjalankan kegiatan pengawasan kesehatan dalam mendeteksi penyakit dan factor risiko Kesehatan berpotensi KLB/wabah.

c. Definisi Operasional

Pintu masuk negara (Pelabuhan/bandar udara/PLBN) maupun Pelabuhan/bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan factor risiko Kesehatan berpotensi KLB/Wabah.

d. Rumus (cara perhitungan)

Jumlah pintu masuk negara (pelabuhan/bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah dibagi dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik dikali 100%.

e. Capaian Indikator

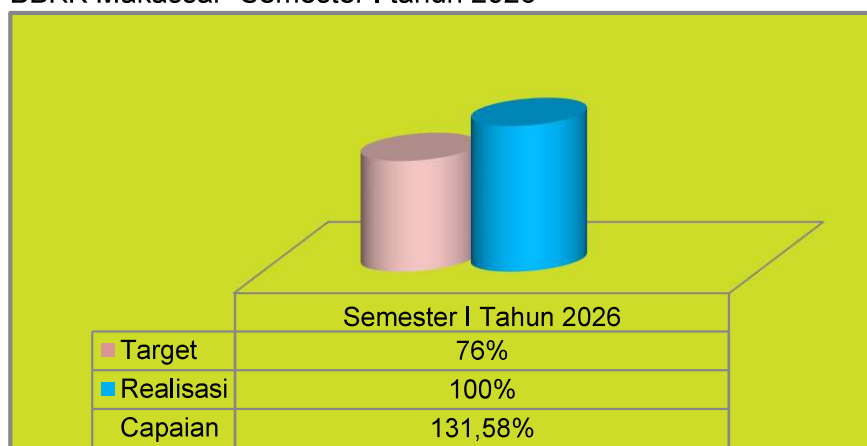
Tabel III.2 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah

| Parameter                                                                                                                                     | Target 2026 | Januari |           |         | Februari |           |         | Maret  |           |         | April  |           |         | Mei    |           |         | Juni   |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                                                                                                                                               |             | Target  | Realisasi | Capaian | Target   | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Terdapat 5 parameter perhitungan yakni:                                                                                                       |             |         |           |         |          |           |         |        |           |         |        |           |         |        |           |         |        |           |         |
| 1. Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan alat angkut                     | 90,00%      | 90,00%  | 100,00%   | 111,11% | 90,00%   | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% |
| 2. Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan orang/pelaku perjalanan            | 90,00%      | 90,00%  | 100,00%   | 111,11% | 90,00%   | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% |
| 3. Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan barang                          | 90,00%      | 90,00%  | 100,00%   | 111,11% | 90,00%   | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% |
| 4. Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan faktor risiko lingkungan           | 90,00%      | 90,00%  | 93,75%    | 104,17% | 90,00%   | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% |
| 5. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Surveilans Alat Angkut, Orang, Barang, dan Lingkungan Melalui Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan | 90,00%      | 90,00%  | 100,00%   | 111,11% | 90,00%   | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% | 90,00% | 100,00%   | 111,11% |
|                                                                                                                                               |             |         |           |         |          |           |         |        |           |         |        |           |         |        |           |         |        |           |         |
| Persentase                                                                                                                                    | 76,00%      | 76,00%  | 98,75%    | 129,93% | 76,00%   | 100,00%   | 131,58% | 76,00% | 100,00%   | 131,58% | 76,00% | 100,00%   | 131,58% | 76,00% | 100,00%   | 131,58% | 76,00% | 100,00%   | 131,58% |

- 1) Perbandingan antara target Semester I tahun 2026 dengan realisasi Semester I Tahun 2025 untuk indikator 1.



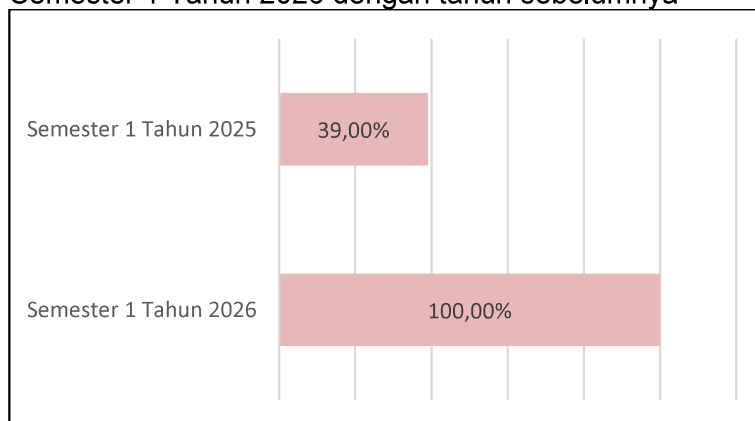
Grafik III.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-1 BBKK Makassar Semester I tahun 2026



Grafik III.1 menggambarkan antara target dan realisasi indikator 1, dapat dilihat realisasi 100%. Penetapan target untuk tahun 2026 ditetapkan dengan nilai 76% , dengan realisasi 100%, sehingga capaian menjadi 131,58%. Capaian lebih dari 100% dikarenakan realisasi melebihi target yang ditetapkan.

2) Perbandingan capaian Semester I tahun 2026 dengan capaian tahun sebelumnya

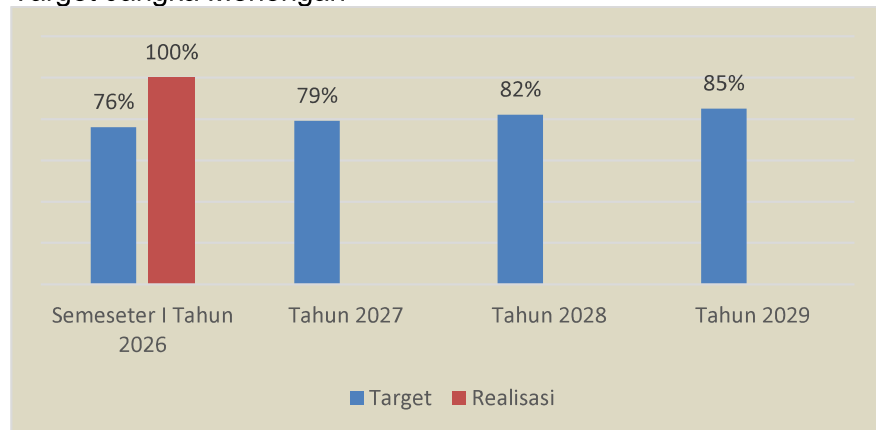
Grafik III.2 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 BBKK Makassar Semester 1 Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya



Dari grafik III.2 dapat dilihat capaian Semester I Tahun 2026 lebih besar dari capaian Semester I Tahun 2025.

- 3) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan target jangka menengah dapat dilihat dalam grafik III.3.

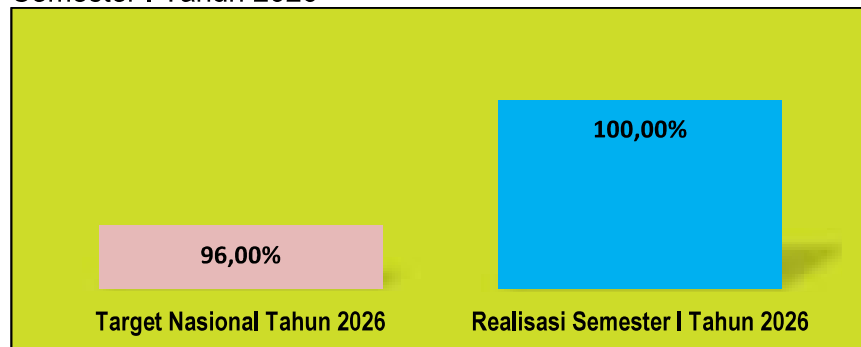
Grafik III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-1 BBKK Makassar Semester I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah



Grafik III.3 terlihat realisasi Semester I Tahun 2026 lebih besar dari target Semester, 2027, 2028, serta target 2029

- 4) Perbandingan antara Target Nasional dengan Realisasi Semester I Tahun 2026 dapat dilihat dalam grafik III.4.

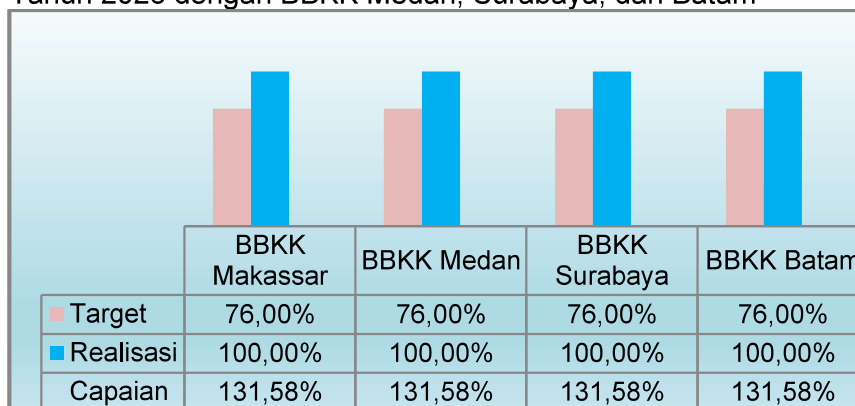
Grafik III.4 Perbandingan target nasional dengan realisasi Semester I Tahun 2026



Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 96% terlihat realisasi Semester I Tahun 2026 lebih besar dengan nilai 100%.

- 5) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam dapat dilihat dalam grafik III.5.

Grafik III.5 Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam



Grafik III.5 tergambar bahwa realisasi semua BBKK lebih besar dari target yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh capaian sebesar 131,58%.

f. Analisis Keberhasilan Kegiatan

Terdapat beberapa hal yang memberikan kontribusi terhadap tercapainya target Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah yakni :

- 1) Terselenggaranya pengawasan kekarantinaan kesehatan selama 24 jam pada pintu masuk strategis.
- 2) Meningkatnya koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Otoritas Bandar Udara, Imigrasi, Bea dan Cukai, serta operator pelabuhan dan bandar udara.
- 3) Optimalisasi pelaksanaan surveilans berbasis risiko melalui pemanfaatan sistem informasi digital dan pelaporan secara *real time*.
- 4) Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan simulasi penanggulangan KLB/wabah.
- 5) Tersedianya peralatan deteksi, alat pelindung diri, serta sarana pendukung pemeriksaan kesehatan yang memadai.

- 6) Meningkatnya kesadaran pengguna jasa transportasi dan operator alat angkut terhadap pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan kekarantinaan kesehatan.
- 7) Persentase pelaku perjalanan yang diskriming All Indonesia – SSHP dan juga melalui skrining suhu terlaksana 100% pada pelaku perjalanan dari Luar negeri (PPLN) baik pada penumpang maupun awak / personel alat angkut, dipengaruhi beberapa faktor keberhasilan yaitu :
  - a) dengan penerapan All Indonesia sebagai stopper pada cekpoin imigrasi, hal tersebut mendukung cakupan PPLN yang dilakukan skrining menjadi 100% karena kalau tidak mengisi All Indonesia maka PPLN tersebut tidak dapat melewati cek poin imigrasi Indonesia.
  - b) skrining suhu dilaksanakan dengan efektif dan berlapis, memastikan bahwa pelaku perjalanan yang masuk bebas dari penyakit potensial KLB/wabah, skrining di bandara dan dengan penumpang yang massive menggunakan thermal scanner dan thermal imager sehingga lebih efektif; dan untuk awak kapal menggunakan thermogun infra red dengan mengedepankan prinsip maximum protection with minimum restriction.
  - c) Surveilans migrasi malaria terlaksana dengan baik karena dari awal tahun sudah ditetapkan target Lokasi dan sasaran berdasarkan status endemisitas wilayah asal alat angkut, dan setiap wilker/ pos yang menjadi lokus diberikan akun tersendiri untuk pengisian melalui aplikasi e-sismal.
  - d) Pelaksanaan surveilans penyakit berptensi KLB/Wabah / Penyakit infeksi emerging dilakukan dengan mekanisme piket PHEIC yang dilaksanakan oleh setiap wilker dan pos. Sebagian wilker / pos menggunakan mekanisme anggaran SBK (standar biaya keluaran) untuk piket PHEIC disesuaikan dengan beban kerja pengawasan di wilker/posnya, dukungan lintas sektor sebagai surveilans berbasis Masyarakat /community based surveillance untuk menginformasikan

dengan segera bila terdapat/ ditemukan orang atau factor Risiko penyakit menular maupun factor Risiko potensial kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

- e) Pelaksanaan surveilans penyakit berptensi KLB/Wabah yang dilaporkan melalui EBS / SKDR < 24 jam terlaksana 100% hal ini terwujud dengan kolaborasi yang baik antar timker dan didukung dengan sarana prasarana yang baik dalam mendukung penegakkan diagnosis.
- 8) Persentase pencatatan dan pelaporan surveilans alat angkut, orang, barang, dan lingkungan secara tepat dan lengkap melalui SINKARKES/EBS SKDR/Buletin epidemiologi/laporan rutin, dipengaruhi beberapa faktor keberhasilan yaitu :
  - a) EBS /SKDR dalam hal ini terkait dengan SSHP terlaksana 100% karena didorong oleh pemanfaatan All Indonesia sebagai aplikasi CIQ menggunakan server milik Kemenimipas, sehingga cakupan sshp menjadi 100%
  - b) Buletin Mingguan BBKK Makassar dipublish tepat waktu dan lengkap setiap pekan di aplikasi SKDR dan Website [bbkkmakassar.kemkes,.go.id](http://bbkkmakassar.kemkes.go.id) berhasil mencapai target 100% karena dari awal tahun sudah dilakukan pembagian jadwal PIC setiap minggu epidemiologisnya, dan juga didorong penggunaan VISION (visualisasi laporan kinerja harian) dan menjadikan buletin mingguan sebagai SKP wajib petugas.
- 9. Persentase pencatatan dan pelaporan surveilans alat angkut, orang, barang, dan lingkungan secara tepat dan lengkap melalui SINKARKES/EBS SKDR/Buletin epidemiologi/laporan rutin, dipengaruhi beberapa faktor keberhasilan yaitu :
  - a) EBS /SKDR dalam hal ini terkait dengan SSHP terlaksana 100% karena didorong oleh pemanfaatan All Indonesia sebagai aplikasi CIQ menggunakan server milik Kemenimipas, sehingga cakupan sshp menjadi 100%
  - b) Buletin Mingguan BBKK Makassar dipublish tepat waktu dan lengkap setiap pekan di aplikasi SKDR dan Website [bbkkmakassar.kemkes,.go.id](http://bbkkmakassar.kemkes.go.id) berhasil mencapai target 100%

karena dari awal tahun sudah dilakukan pembagian jadwal PIC setiap minggu epidemiologisnya, dan juga didorong penggunaan VISION (visualisasi laporan kinerja harian) dan menjadikan buletin mingguan sebagai SKP wajib petugas.

10. Pertumbuhan layanan vaksinasi internasional yang semakin besar di wilayah BBKK Makassar.
11. Kolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam pelayanan kesehatan.
12. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar tercapai karena adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan serta peran lintas sektor yang mendukung tuisi dari BBKK Makassar.

g. Masalah yang dihadapi

- 1) Tingginya mobilitas orang, alat angkut, dan barang yang menyebabkan beban pengawasan semakin meningkat.
- 2) Belum meratanya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pada seluruh wilayah kerja, terutama pada pintu masuk dengan aktivitas tinggi.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, termasuk alat deteksi cepat, fasilitas isolasi sementara, dan perangkat teknologi informasi di beberapa wilayah kerja.
- 4) Belum optimalnya integrasi data antar instansi sehingga pertukaran informasi terkait faktor risiko kesehatan masih memerlukan waktu.
- 5) Munculnya penyakit infeksi emerging dan re-emerging yang memerlukan peningkatan kapasitas surveilans serta pembaruan prosedur operasional.
- 6) Kepatuhan sebagian pelaku perjalanan maupun operator alat angkut terhadap pelaporan kesehatan dan ketentuan kekarantinaan masih perlu ditingkatkan.
- 7) Masih banyak PPLN yang melakukan pengisian All Indonesia di bandara kedatangan sehingga memperlambat proses CIQ, dan

membutuhkan pendampingan petugas dalam pengisian All Indonesia;

- 8) Kalibrasi alat ukur suhu belum dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan kemampuan kalibrasi terhadap alat tersebut oleh Balai Pengamanan alat dan fasilitas Kesehatan (BPAFK)
- 9) Keterbatasan akses reagen malaria (RDT Malaria) terkadang pengadaan dari pusat terlambat sedangkan untuk pengadaan menggunakan anggaran BBKK Makassar tidak tersedia karena diinstruksikan untuk menunggu dropping dari pusat melalui Dinkes Provinsi/Kab/Kota.
- 10) Efisiensi anggaran menyebabkan anggaran piket PHEIC disesuaikan hingga 50%, meskipun tidak mempengaruhi jadwal piket dan kinerja petugas.
- 11) EBS SKDR belum mengakomodir, tagging ke lebih dari satu Alamat dan tagging UPT Kekarantinaan setempat, serta pemantauan akhir bagi PPLN yang dinotifikasi.
- 12) Ketersediaan tenaga yang piket masih terbatas sehingga menyebabkan adanya beban kerja yang berlebihan
- 13) masih terdapat sarana dan prasarana yang perlu peremajaan dan kalibrasi
- 14) Cakupan layanan BBKK Makassar yang terlalu luas mencakup 2 (dua) provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sehingga koordinasi dengan Wilker / Pos yang jaraknya jauh kurang maksimal.
- 15) EBS SKDR belum mengakomodir, tagging ke lebih dari satu Alamat dan tagging UPT Kekarantinaan setempat, serta pemantauan akhir bagi PPLN yang dinotifikasi.
- 16) Belum terdapat template pengisian buletin mingguan yang seragam bagi seluruh upt bidang kekarantinaan kesehatan sehingga variasi buletin terlalu banyak
- 17) Belum seluruh wilker terdapat petugas epidemiolog dan atau petugas yang memahami pengisian di EBS SKDR

- 18) Masih terdapat wilayah kerja/pos yang belum tepat waktu dan belum lengkap dalam pengisian laporan harian melalui aplikasi VISION
- 19) Layanan vaksinasi yang bertambah pesat sehingga membutuhkan dropping vaksin dari Pusat, namun sejak Desember 2025 vaksin Polio sudah tidak tersedia di BBKK Makassar.
- 20) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin masih dalam tahap proses pengembangan dan jumlah tenant terus bertambah sehingga pemeriksaan TPP/TFU belum dapat dilakukan secara menyeluruh

h. Usul Pemecahan Masalah

- 1) Melakukan penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan teknis mengenai deteksi dini penyakit serta manajemen kedaruratan kesehatan masyarakat.
- 2) Mengoptimalkan digitalisasi pengawasan melalui integrasi sistem informasi surveilans, pelaporan elektronik melalui googlespreedsheet, dashboard monitoring, dan analisis data secara *real time*.
- 3) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pertukaran informasi, pelaksanaan surveilans terpadu, serta respons cepat terhadap potensi KLB/wabah.
- 4) Melengkapi sarana dan prasarana pengawasan, termasuk alat deteksi kesehatan, perangkat teknologi informasi, kendaraan operasional, serta fasilitas penanganan awal kasus.
- 5) Melaksanakan pemetaan risiko secara berkala terhadap seluruh pintu masuk untuk menentukan prioritas pengawasan berdasarkan tingkat risiko epidemiologi.
- 6) Meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada operator alat angkut, pelaku perjalanan, dan masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan kekarantinaan kesehatan.



- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan untuk memastikan seluruh pintu masuk tetap memenuhi standar pelayanan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- 8) Meningkatkan cakupan pengisian All Indonesia dari origin/ atau Pelabuhan asal, serta meningkatkan pelibatan petugas imigrasi dan bea cukai serta petugas lainnya untuk membantu pendampingan pengisian All Indonesia di kedatangan
- 9) Bekerjasama dengan BPAFK untuk melakukan kalibrasi Thermal Scanner
- 10) Perlu didorong Kembali rencana pembukaan UPT Bidang kekarantinaan Kesehatan untuk wilayah provinsi Sulawesi Barat.
- 11) menambahkan fitur tagging UPT Kekarantinaan kesehatan dalam lebih dari 1 alamat dalam aplikasi EBS SKDR
- 12) Penambahan SDM melalui seleksi CPNS/PPPK/*Job Vacancy*
- 13) melakukan penyesuaian anggaran agar bisa mengakomodir pengadaan RDT malaria bila dropping dari pusat belum dapat dipenuhi.
- 14) perlu pengadaan/peremajaan alat – alat deteksi untuk mendukung pengawasan yang adekuat.
- 15) Penempatan petugas epidemiolog dan atau mengadakan pelatihan pengisian EBS SKDR
- 16) Menambahkan fitur tambah alamat dan tagging juput Bidang kekarantinaan kesehatan supaya pemantauan dan kerjasama pintu masuk dan wilayah lebih optimal
- 17) membuat template buletin yang seragam untuk semua UPT Bidang Kekarantinaan kesehatan
- 18) Membuka kesempatan kepada fasyankes di wilayah BBKK Makassar untuk kerja sama dalam pelayanan vaksinasi internasional.

i. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu

anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja i

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(3.905.636.000 \times 1,32) - 1.788.139.350}{3.905.636.000 \times 1,32} \times 100\%$$

$$E = 65,20\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{65,20\%}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 213,01\%$$

Untuk indikator 1 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.905.636.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.788.139.350,- serta capaian indikator sebesar 131,58%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 65,20%. Sehingga nilai efisiensi diperoleh sebesar 213,01%.

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator 1 penggunaan sumber daya efisien dengan nilai efisiensi di atas 50% yaitu 213,01%.

Selain dari penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Penggunaan alat skrining (*thermal scanner*) dengan sistem sensor lebih efektif dan tidak perlu membutuhkan operator yang

banyak sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan secara maksimal dengan menjaga jarak aman.

- 2) Penerapan interkoneksi aplikasi Sinkarkes dan Simponi dalam penerbitan dokumen kesehatan.
- 4) Inovasi Sehat Care yang memudahkan bagi pelanggan ataupun petugas untuk mendapatkan Formulir Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan secara Sistematis, Jelas, Hemat, dan terdata dengan baik.
- 5) Inovasi VISION (VISUALISASI INTEGRASI LAPORAN) merupakan aplikasi penyajian data laporan kinerja harian, yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan respon pemenuhan kebutuhan data baik untuk pimpinan dalam pengambilan keputusan, petugas BBKK Makassar maupun pihak eksternal yang membutuhkan data dan informasi terkait BBKK Makassar.
- 6) Inovasi SiValid ICV adalah layanan digital untuk validasi Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) yang cepat, aman, dan mudah. Biro Travel Haji dan Umrah melakukan penginputan data jamaah secara *online* dan memantau hasil validasi secara *real time*. Setelah divalidasi, hasil rekap dikirim melalui email untuk diberikan ke maskapai penerbangan.
- 7) Inovasi “TELPON MA (Emergency First Respon)” yang dikembangkan oleh BBKK Makassar merupakan terobosan pelayanan kegawatdaruratan terpadu di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang bertujuan untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat medis. Inovasi ini mengintegrasikan layanan call centre darurat dan penggunaan motor listrik (molis) sebagai first responder. Dengan dukungan peralatan seperti AED, oksigen, dan emergency kit.

## 2. INDIKATOR KEDUA

**Nilai SAKIP**

a. Dasar Hukum

- 1) Permenkes Nomor 950/Menkes/Per/VII/2010 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
- 4) Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Pengertian

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan parameter yang menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran negara untuk mencapai hasil (*outcome*) yang bermanfaat bagi masyarakat.

c. Definisi Operasional

Hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan oleh Tim SKI untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi, dan kualitas Unit Kerja dalam menerapkan SAKIP.

d. Rumus (cara perhitungan)

Indeks Penilaian (*Scoring Index*) berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam instrument evaluasi SAKIP untuk penilaian akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

e. Capaian Indikator

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR  
TAHUN 2025**

| No                          | Komponen/Sub Komponen/Kriteria          | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|
|                             |                                         |       | 2025                        |
| 1                           | Perencanaan Kinerja                     | 30,00 | 25,20                       |
| 2                           | Pengukuran Kinerja                      | 30,00 | 25,20                       |
| 3                           | Pelaporan Kinerja                       | 15,00 | 13,20                       |
| 4                           | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 21,00                       |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja |                                         |       | 84,60                       |
| Kategori Predikat           |                                         |       | A                           |

Gambar III.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBKK Makassar Tahun 2025 oleh Tim SKI BBKK Makassar

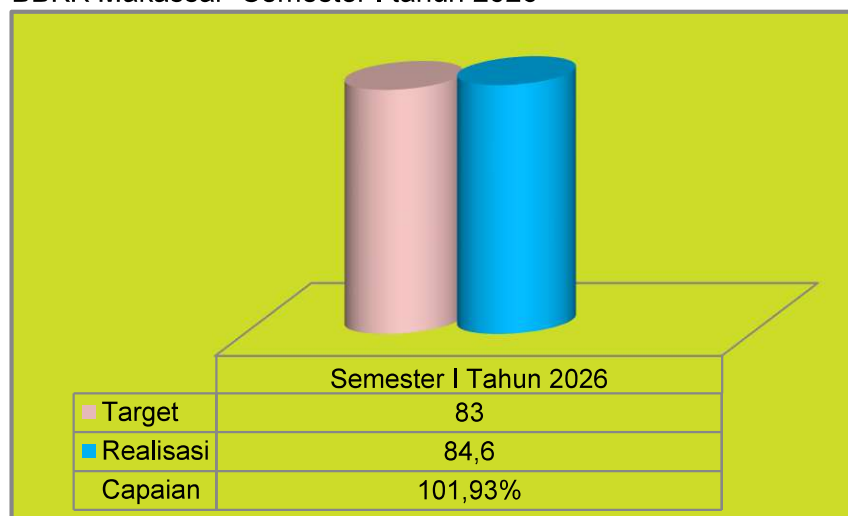
Pada Semester I tahun 2026 nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP BBKK Makassar tahun 2025 yang dilaksanakan dan direviu oleh SKI BBKK Makassar pada tanggal 18 April 2026, dengan nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 84,60, kategori predikat A.

$$\frac{Realisasi}{Target} = Capaian$$

$$\frac{84,60}{83} = 101,93$$

- 1) Perbandingan antara target Semester I tahun 2026 dengan realisasi Semester I Tahun 2025 untuk indikator 2.

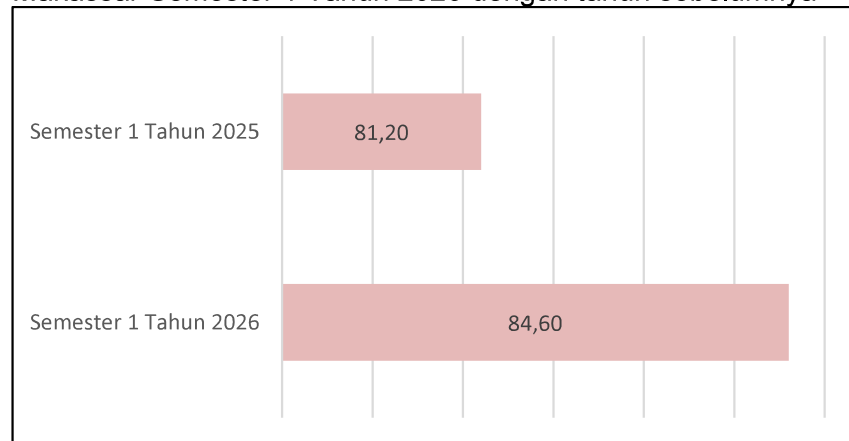
Grafik III.6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar Semester I tahun 2026



Grafik III.6 menggambarkan antara target dan realisasi indikator 1, dapat dilihat target untuk tahun 2026 ditetapkan dengan nilai 83, dengan realisasi 84,6, sehingga capaian menjadi 101,93%. Capaian lebih dari 100% dikarenakan realisasi melebihi target yang ditetapkan.

- 2) Perbandingan capaian Semester I tahun 2026 dengan capaian tahun sebelumnya

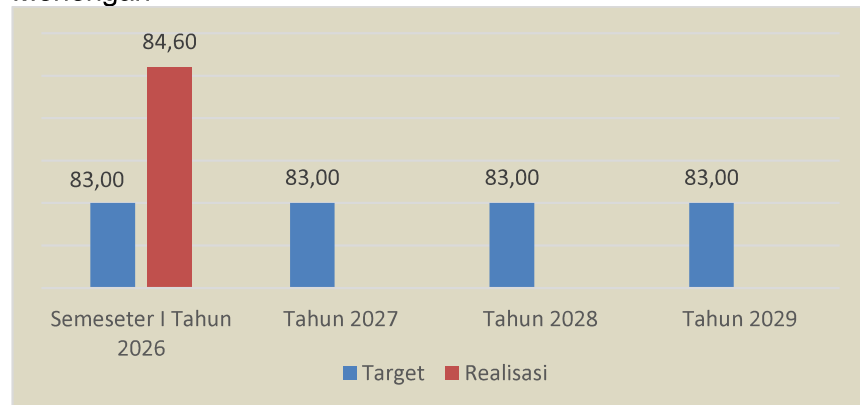
Grafik III.7 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar Semester 1 Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya



Dari grafik III.7 dapat dilihat realisasi Semester I Tahun 2026 lebih besar dari Semester I Tahun 2025. Walaupun tahun 2025 Nilai SAKIP tidak dijadikan sebagai indikator, namun evaluasi SAKIP rutin dilaksanakan sehingga terdapat nilai SAKIP setiap tahunnya.

- 3) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan target jangka menengah dapat dilihat dalam grafik III.8.

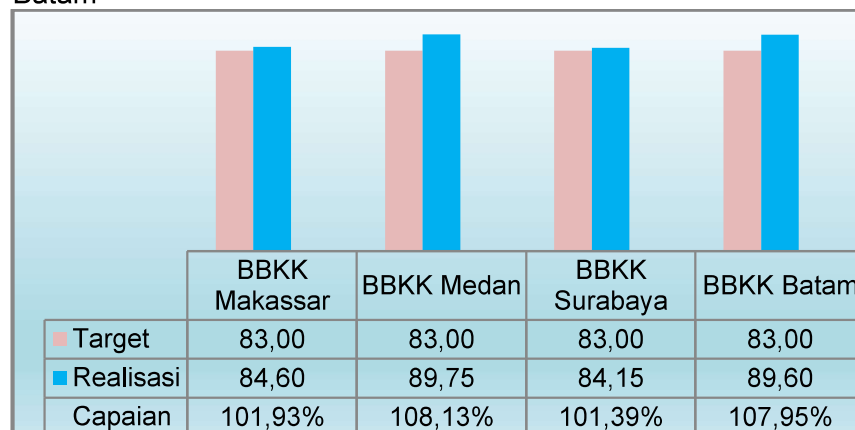
Grafik III.8 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar Semester I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah



Grafik III.8 terlihat realisasi Semester I Tahun 2026 lebih besar dari target Semester 2026, 2027, 2028, serta target 2029

- 4) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam dapat dilihat dalam grafik III.9.

Grafik III.9 Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 Indikator ke-2 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam



Grafik III.9 tergambar bahwa realisasi semua BBKK lebih besar dari target yang telah ditetapkan, realisasi terbesar pada BBKK Medan dan yang terkecil BBK Surabaya.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Komitmen yang kuat dari Kepala BBKK Makassar sebagai nahkoda dalam menjalankan tugas dan fungsi BBKK Makassar.
- 2) Keterlibatan Kepala BBKK Makassar yang menjadikan SAKIP sebagai alat kendali manajemen akan mendorong seluruh tim untuk mencapai target.
- 3) Sistem Cascading Kinerja yang selaras dengan visi misi organisasi.
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran yang dilakukan secara berkala.
- 5) Motivasi pegawai BBKK Makassar yang cukup besar dalam menciptakan inovasi yang dapat mendukung tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Keterbatasan anggaran dalam peningkatan kapasitas terkait tim SAKIP.
- 2) Keterbatasan anggaran dalam menciptakan suatu inovasi secara berkelanjutan.
- 3) Rekomendasi yang terbit belum dijadikan sebagai tindak lanjut perbaikan selanjutnya.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) *Update* ilmu dengan mengikuti peningkatan kapasitas terkait SAKIP secara daring yang tidak membutuhkan anggaran.
- 2) *Upgrade* inovasi yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.
- 3) Membuat matriks Plan Do Check Act, sehingga Rekomendasi yang sudah di Tindaklanjuti dapat digunakan untuk pembahasan perencanaan berikutnya. Untuk saat ini semua kendala yang ada dibahas pada pertemuan Coffee Morning setiap Senin pagi di BBKK Makassar yang dipimpin langsung oleh Kepala BBKK Makassar.



#### h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai Efisiensi

$$E = \frac{(0 \times 1,02) - 0}{0 \times 1,02} \times 100\%$$

$$E = 0\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\%$$

Untuk indikator 2 tidak terdapat alokasi anggaran karena kegiatan evaluasi SAKIP dilakukan dengan metode daring mulai dari tahap persiapan awal yang dilaksanakan oleh Tim Marvel Ditjen Penanggulangan Penyakit dengan cara daring, sampai tahap evaluasi yang dilaksanakan oleh SKI BBKK Makassar dengan system hybrid. Sehingga efisiensi bernilai 0, dengan nilai efisiensi sebesar 50, berarti untuk kegiatan pada indikator 2 bernilai efisien dari sisi anggaran.

Selain efisiensi dari anggaran, penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Penerapan interkoneksi aplikasi Sinkarkes dan Simponi dalam penerbitan dokumen kesehatan.

- 2) Inovasi Sehat Care yang memudahkan bagi pelanggan ataupun petugas untuk mendapatkan Formulir Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan secara Sistematis, Jelas, Hemat, dan terdata dengan baik.
- 3) Inovasi VISION (VISUALISASI INTEGRASI LAPORAN) merupakan aplikasi penyajian data laporan kinerja harian, yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan respon pemenuhan kebutuhan data baik untuk pimpinan dalam pengambilan keputusan, petugas BBKK Makassar maupun pihak eksternal yang membutuhkan data dan informasi terkait BBKK Makassar.
- 4) Inovasi SiValid ICV adalah layanan digital untuk validasi Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) yang cepat, aman, dan mudah. Biro Travel Haji dan Umrah melakukan penginputan data jamaah secara *online* dan memantau hasil validasi secara *real time*. Setelah divalidasi, hasil rekap dikirim melalui email untuk diberikan ke maskapai penerbangan.
- 5) Inovasi “TELPON MA (Emergency First Respon)” yang dikembangkan oleh BBKK Makassar merupakan terobosan pelayanan kegawatdaruratan terpadu di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang bertujuan untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat medis. Inovasi ini mengintegrasikan layanan call centre darurat dan penggunaan motor listrik (molis) sebagai first responder. Dengan dukungan peralatan seperti AED, oksigen, dan emergency kit.
- 6) Inovasi SiTOPENG Memuat data dan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa baik secara kontraktual maupun non kontraktual dengan pihak ketiga. Berisi spreadsheet monitoring dan penyimpanan file google drive data arsip pengadaan. Dengan adanya monitoring pengadaan sehingga dapat menjadi warning/alarm apabila terdapat belanja kontraktual yang harus segera dilapor kontrak ke KPPN sehingga tidak terlambat untuk dilaporkan. Selain itu memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memonitor proses pengadaan hingga pencairan anggarannya.

- 7) Inovasi D'Tawang merupakan akronim dari Dokumen PerTanggungjawaban Keuangan. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pegawai BBKK Makassar (baik yang di induk maupun di wilker) yang ingin memasukkan Pertanggungjawabannya untuk selanjutnya diproses pencairannya. seluruh proses pencairan dapat diakses dalam menu "form Monitoring Posisi Pertanggungjawaban". Jika sebelumnya dokumen pertanggungjawaban harus diubah beberapa kali sebelum di tandatangani oleh PPK dikarenakan adanya kesalahan, dengan aplikasi ini dokumen akan di print untuk ditandatangani oleh PPK setelah diverifikasi oleh verifikator.

### 3. INDIKATOR KETIGA

#### Nilai Kinerja Anggaran

##### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

b. Pengertian

Adalah pengukuran variable kinerja perencanaan anggaran (variabel efektifitas dan variabel efisiensi) dan variable pelaksanaan anggaran (8 parameter IKPA).

c. Definisi Operasional

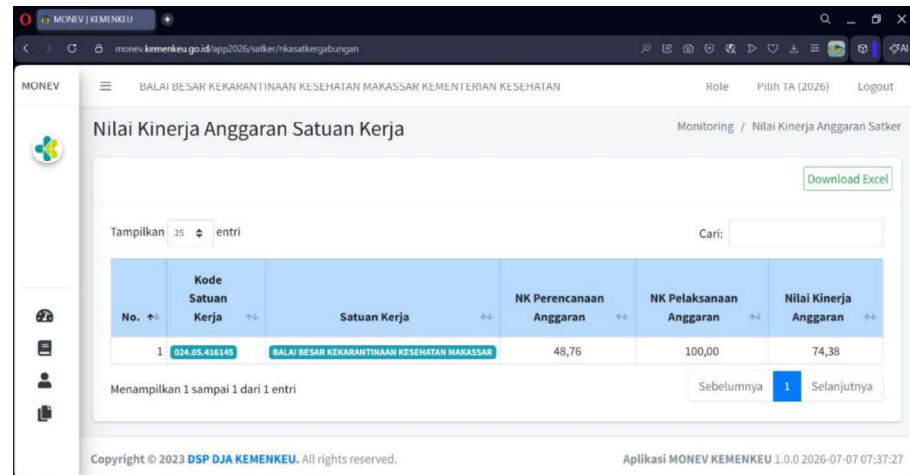
Nilai Kinerja Anggaran adalah Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e Monev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari : Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.

d. Definisi Operasional

50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA)

#### e. Capaian Indikator



| No. | Kode Satuan Kerja | Satuan Kerja                                 | NK Perencanaan Anggaran | NK Pelaksanaan Anggaran | Nilai Kinerja Anggaran |
|-----|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1   | 024.05.416145     | BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR | 48,76                   | 100,00                  | 74,38                  |

Gambar III.2 Nilai Kinerja Anggaran Dashboard Aplikasi SMART

Pada Semester I tahun 2026 Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari dashboard aplikasi SMART Kemenkeu dengan nilai 74,38, dengan rincian :

NKA = 50% NK Perencana Anggaran + 50% NK Pelaksanaan Anggaran

$$NKA = (50\% \times 48,76) + (50\% \times 100)$$

$$NKA = 24,38 + 50$$

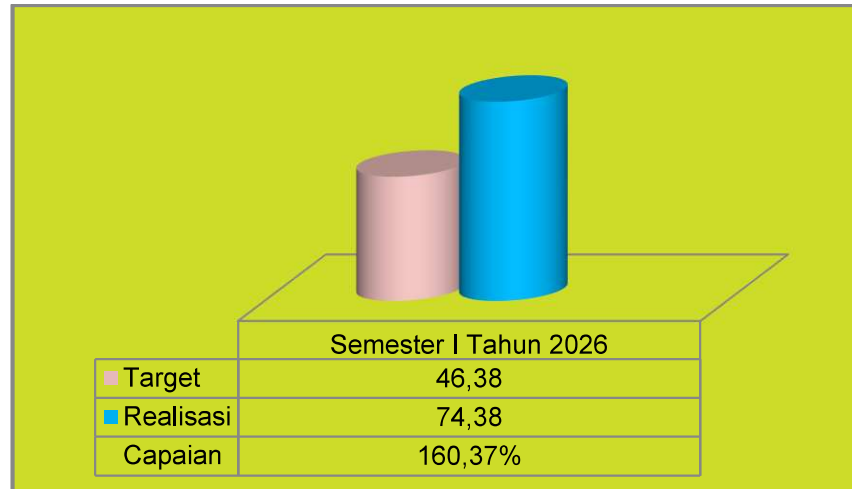
$$NKA = 74,38$$

$$\frac{Realisasi}{Target} = Capaian$$

$$\frac{74,38}{46,38} = 160,37$$

- 1) Perbandingan antara target Semester I tahun 2026 dengan realisasi Semester I Tahun 2025 untuk indikator 3.

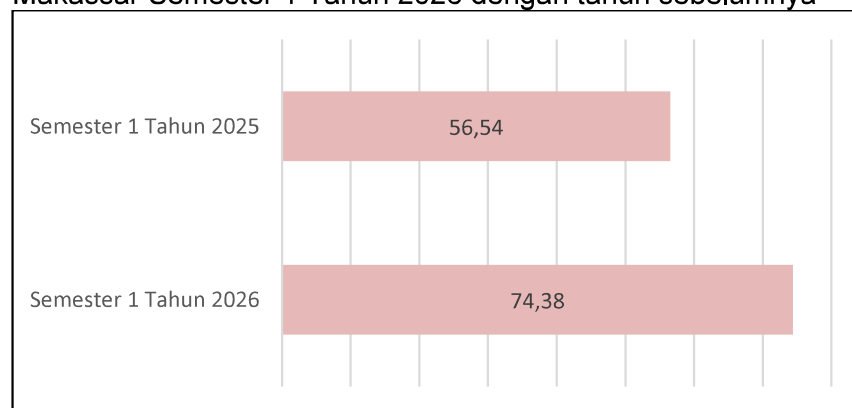
Grafik III.10 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-3 BBKK Makassar Semester I tahun 2026



Grafik III.10 menggambarkan antara target dan realisasi indikator 3, dapat dilihat target untuk Semester I tahun 2026 ditetapkan dengan nilai 46,38, dengan realisasi 74,38, sehingga capaian menjadi 160,37%. Capaian lebih dari 100% dikarenakan realisasi melebihi target yang ditetapkan.

- 2) Perbandingan capaian Semester I tahun 2026 dengan capaian tahun sebelumnya

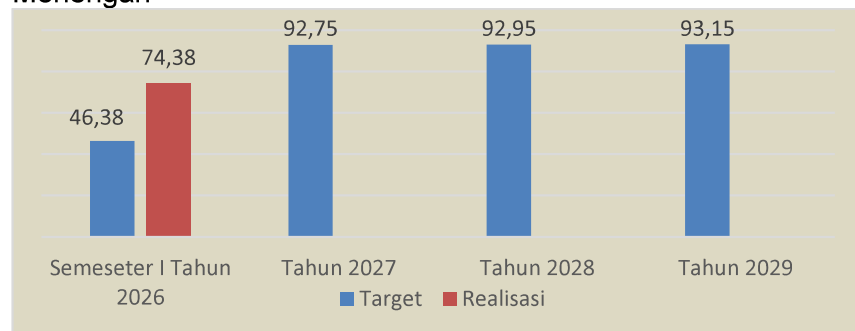
Grafik III.11 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-3 BBKK Makassar Semester 1 Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya



Dari grafik III.11 dapat dilihat realisasi Semester I Tahun 2026 lebih besar dari Semester I Tahun 2025.

- 3) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan target jangka menengah dapat dilihat dalam grafik III.12.

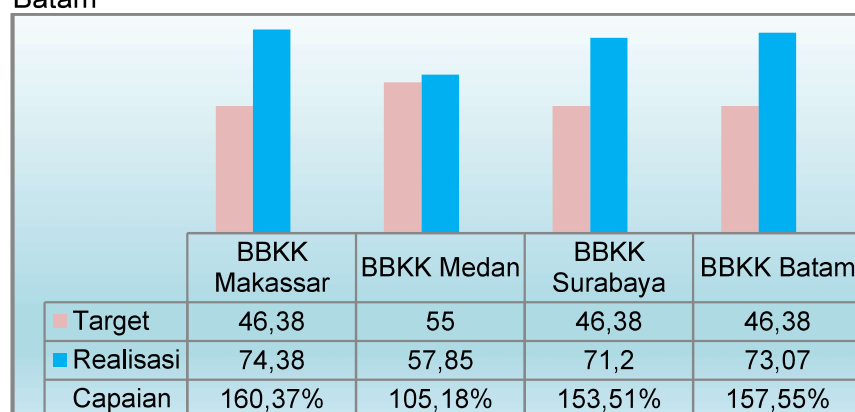
Grafik III.12 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK Makassar Semester I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah



Grafik III.12 terlihat realisasi Semester I Tahun 2026 lebih besar dari target Semester I Tahun 2026 dan diproyeksikan akan mencapai target di tahun 2027, 2028, dan 2029.

- 4) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam dapat dilihat dalam grafik III.13.

Grafik III.13 Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 Indikator ke-3 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam



Grafik III.13 tergambar bahwa realisasi semua BBKK lebih besar dari target yang telah ditetapkan, realisasi terbesar pada BBKK Makassar dan yang terkecil BBKK Medan, namun penetapan target terbesar di BBKK Medan.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi (monev) realisasi anggaran dan capaian realisasi output (CRO) berdasarkan RPK dan RPD yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala setiap triwulan.
- 2) Melaksanakan revisi kegiatan dan anggaran serta RPK dan RPD dalam rangka menyusun skala prioritas dalam merealisasikan anggaran untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang tidak terencana sebelumnya. Revisi kegiatan dan anggaran dilakukan baik pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), revisi Kanwil DJPb maupun revisi DJA.
- 3) Melaksanakan pembahasan menyeluruh terhadap CRO kegiatan yang terdapat dalam RKAKL terutama kegiatan dengan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) untuk menunjang nilai kinerja perencanaan anggaran sebagai salah satu parameter dalam nilai kinerja anggaran.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Seluruh pagu anggaran kegiatan teknis di BBKK Makassar bersumber PNPB, sedangkan ketersediaan PNPB di BBKK Makassar masih sebesar 31,49% sehingga berdampak pada realisasi anggaran dan CRO yang masih kurang.
- 2) Adanya efisiensi pagu anggaran pada bulan Januari s.d Mei 2026 yang mengakibatkan terbatasnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, sedangkan volume kegiatan (output) tidak dapat dilakukan revisi sehingga persentase realisasi anggaran masih relatif dan CRO masih relatif kecil, terutama untuk CRO SBKK.
- 3) Adanya kebijakan buka blokir pagu anggaran terhitung sejak 1 Juni 2026 yang mengakibatkan total pagu anggaran menjadi lebih besar dengan realisasi anggaran yang masih terbatas akibat dari efisiensi pagu anggaran sejak bulan Januari s.d Mei 2026, Sehingga persentase realisasi anggaran menjadi lebih kecil.



Selain itu kebijakan buka blokir pagu anggaran ini tidak dibarengi dengan ketersediaan PNBPN pada BBKK Makassar.

Hal ini berdampak pada rendahnya persentase realisasi anggaran, CRO serta nilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Mengajukan permintaan dropping vaksin dari pusat dalam rangka memberikan layanan vaksinasi di BBKK Makassar guna meningkatkan realisasi PNBPN agar dapat melaksanakan realisasi kegiatan dan anggaran sehingga persentase realisasi anggaran dan CRO serta nilai efektivitas dan efisiensi anggaran dapat ditingkatkan.
- 2) Melakukan edukasi dan promosi layanan kesehatan tentang pentingnya vaksinasi bagi pelaku perjalanan serta Persyaratan dan Rekomendasi Kesehatan bagi Pelancong ke Arab Saudi untuk Umrah dan pelaku perjalanan luar negeri lainnya guna menunjang pelayanan vaksinasi dan meningkatkan realisasi PNBPN.

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai Efisiensi

$$E = \frac{(0 \times 1,6) - 0}{0 \times 1,6} \times 100\%$$

$$E = 0\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\%$$

Untuk indikator 3 tidak terdapat alokasi anggaran karena kegiatan monitoring dan evaluasi nilai kinerja anggaran yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen Penanggulangan Penyakit dengan cara daring dan dilakukan secara hibryd oleh BBKK Makassar. Sehingga efisiensi bernilai 0, dengan nilai efisiensi sebesar 50, berarti untuk kegiatan pada indicator 3 bernilai efisien dari sisi anggaran.

Selain efisiensi dari anggaran, penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Inovasi SiTOPENG Memuat data dan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa baik secara kontraktual maupun non kontraktual dengan pihak ketiga. Berisi spreadsheet monitoring dan penyimpanan file google drive data arsip pengadaan. Dengan adanya monitoring pengadaan sehingga dapat menjadi warning/alarm apabila terdapat belanja kontraktual yang harus segera dilapor kontrak ke KPPN sehingga tidak terlambat untuk dilaporkan. Selain itu memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memonitor proses pengadaan hingga pencairan anggarannya.
- 2) Inovasi D'Tawang merupakan akronim dari Dokumen PerTanggungjawaban Keuangan. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pegawai BBKK Makassar (baik yang di induk maupun di wilker) yang ingin memasukkan Pertanggungjawabannya untuk selanjutnya diproses pencairannya. seluruh proses pencairan dapat diakses dalam menu "form Monitoring Posisi Pertanggungjawaban". Jika sebelumnya dokumen pertanggungjawaban harus diubah

beberapa kali sebelum di tandatangani oleh PPK dikarenakan adanya kesalahan, dengan aplikasi ini dokumen akan di print untuk ditandatangani oleh PPK setelah diverifikasi oleh verifikator.

#### 4. INDIKATOR KEEMPAT

##### **Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti**

##### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

##### b. Pengertian

Adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan entitas (seperti Kementerian atau pemerintah daerah) dalam melaksanakan seluruh saran perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Semakin tinggi persentasenya, semakin akuntabel dan patuh entitas tersebut dalam mengelola keuangan negara.

##### c. Definisi Operasional

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap

##### d. Rumus (cara perhitungan)

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap

dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Unit Eselon I.

e. Capaian Indikator

Sampai Juni 2026 BBKK Makassar belum dijadikan sebagai sampling audit oleh BPK, sehingga tidak terdapat realisasi pada indikator ke-3.

## 5. INDIKATOR KELIMA

### Persentase Realisasi Anggaran

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

b. Pengertian

Adalah penggunaan anggaran yang telah dialokasikan atau dianggarkan dalam satu periode tahun anggaran.

c. Definisi Operasional

Membandingkan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan.

d. Rumus (cara perhitungan)

Realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan.

## e. Capaian Indikator

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2026**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Juni 2026

Kementerian : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
Unit Organisasi : 05 DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
Satuan Kerja : 416145 BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

Hal 1 dari 28

| Uraian                                                                             | Pagu Revisi           | Lock Pagu | Periode Lalu          | Realisasi TA 2026<br>Periode Ini | s.d. Periode          | %              | SISA<br>ANGGARAN      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>                                                           | <b>30,499,685,000</b> | <b>0</b>  | <b>10,810,186,177</b> | <b>3,977,159,292</b>             | <b>14,787,345,469</b> | <b>48,48 %</b> | <b>15,712,336,531</b> |
| DZ Program Sistem Ketahanan Kesehatan                                              | 4,738,294,000         | 0         | 1,250,767,772         | 701,488,543                      | 1,952,256,315         | 41,20 %        | 2,786,037,685         |
| DZ.7960 Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantina Kesehatan                            | 4,738,294,000         | 0         | 1,250,767,772         | 701,488,543                      | 1,952,256,315         | 41,20 %        | 2,786,037,685         |
| PEA Koordinasi                                                                     | 60,280,000            | 0         | 16,120,000            | 1,635,000                        | 17,755,000            | 29,45 %        | 42,525,000            |
| PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah         | 60,280,000            | 0         | 16,120,000            | 1,635,000                        | 17,755,000            | 29,45 %        | 42,525,000            |
| PEA.001 (HS-20)                                                                    | 60,280,000            | 0         | 16,120,000            | 1,635,000                        | 17,755,000            | 29,45 %        | 42,525,000            |
| 051 Koordinasi pelaksanaan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah | 60,280,000            | 0         | 16,120,000            | 1,635,000                        | 17,755,000            | 29,45 %        | 42,525,000            |
| 051.0A Evaluasi layanan penyelenggaraan kesehatan haji                             | 10,810,000            | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 10,810,000            |
| 521211 Belanja Bahan                                                               | 6,310,000             | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 6,310,000             |
| 000001 Konsumsi (Makan dan Snack)                                                  | 5,838,000             | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 5,838,000             |
| 000002 Konsumsi                                                                    | 472,000               | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 472,000               |
| 522151 Belanja Jasa Profesi                                                        | 2,205,000             | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 2,205,000             |
| 000003 Honorarium Narasumber Lintas Sektor                                         | 405,000               | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 405,000               |
| 000431 Honorarium Narasumber Lintas Sektor                                         | 1,800,000             | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 1,800,000             |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                         | 2,295,000             | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 2,295,000             |
| 000004 Transport peserta luar                                                      | 1,700,000             | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 1,700,000             |
| 000005 Transport Narasumber                                                        | 595,000               | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 595,000               |
| 051.0B Koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji                                   | 9,350,000             | 0         | 7,660,000             | 0                                | 7,660,000             | 81,82 %        | 1,700,000             |
| 521211 Belanja Bahan                                                               | 8,500,000             | 0         | 7,660,000             | 0                                | 7,660,000             | 90,00 %        | 850,000               |
| 000006 Konsumsi (Snack)                                                            | 2,600,000             | 0         | 2,340,000             | 0                                | 2,340,000             | 90,00 %        | 260,000               |
| 000007 Konsumsi (Makan)                                                            | 5,900,000             | 0         | 5,310,000             | 0                                | 5,310,000             | 90,00 %        | 590,000               |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                         | 850,000               | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 850,000               |
| 000008 Transport peserta luar                                                      | 850,000               | 0         | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00 %         | 850,000               |
| 051.0C Pertemuan/Koordinasi LPLS program kekarantina kesehatan                     | 28,950,000            | 0         | 5,490,000             | 0                                | 5,490,000             | 18,96 %        | 23,460,000            |
| 521211 Belanja Bahan                                                               | 27,200,000            | 0         | 4,590,000             | 0                                | 4,590,000             | 16,88 %        | 22,610,000            |
| 000009 Konsumsi (Snack)                                                            | 8,320,000             | 0         | 1,404,000             | 0                                | 1,404,000             | 16,88 %        | 6,916,000             |

Gambar III.3 Realisasi Anggaran dari Aplikasi SAKTI

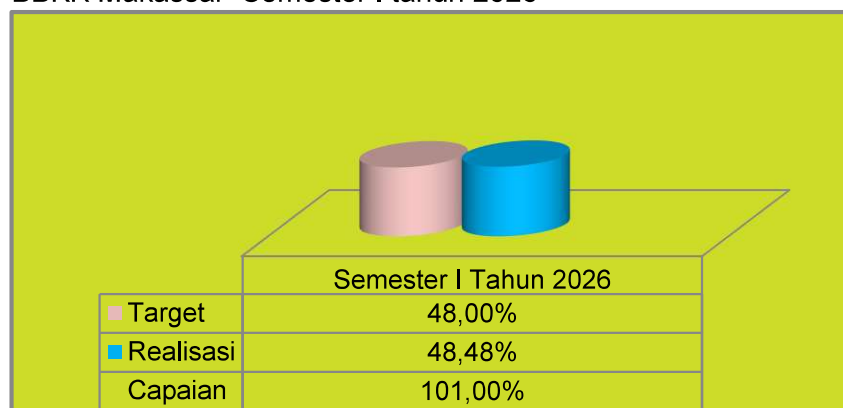
Pada Semester I tahun 2026 Persentase Realisasi Anggaran diperoleh dari aplikasi SAKTI sebesar 48,48%.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = \text{Capaian}$$

$$\frac{48,48\%}{48\%} = 101$$

- 5) Perbandingan antara target Semester I tahun 2026 dengan realisasi Semester I Tahun 2025 untuk indikator 5.

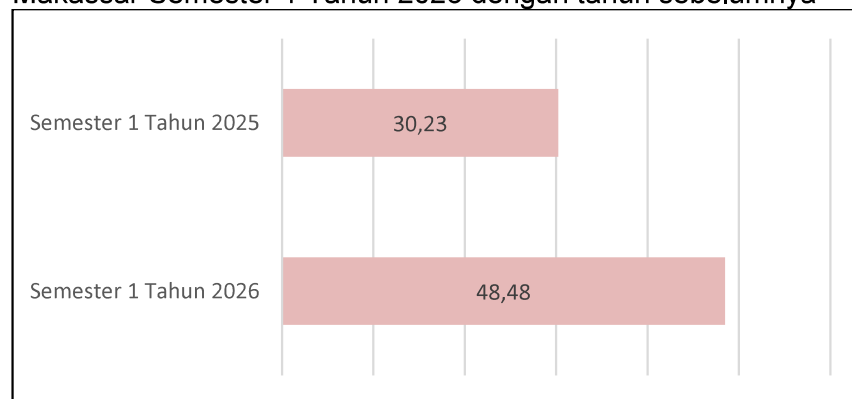
Grafik III.14 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar Semester I tahun 2026



Grafik III.14 menggambarkan antara target dan realisasi indikator 5, dapat dilihat target untuk Semester I tahun 2026 ditetapkan dengan nilai 48, dengan realisasi 48,48, sehingga capaian menjadi 101%. Capaian lebih dari 100% dikarenakan realisasi melebihi target yang ditetapkan.

- 6) Perbandingan capaian Semester I tahun 2026 dengan capaian tahun sebelumnya

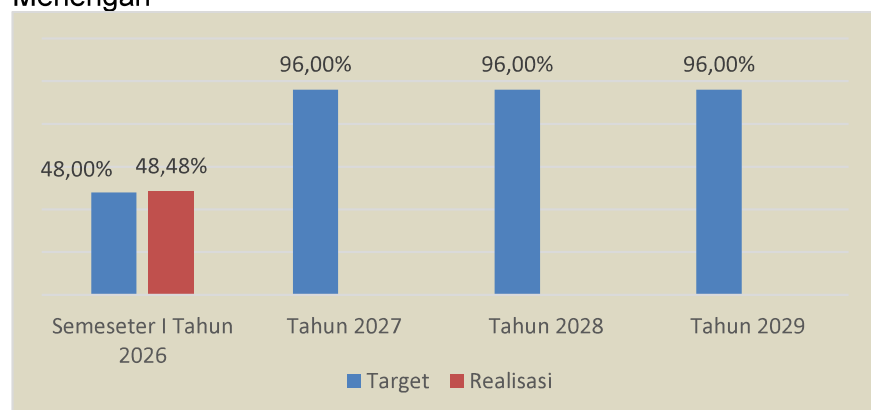
Grafik III.15 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar Semester 1 Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya



Dari grafik III.15 dapat dilihat realisasi Semester I Tahun 2026 lebih besar dari Semester I Tahun 2025.

- 7) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan target jangka menengah dapat dilihat dalam grafik III.16.

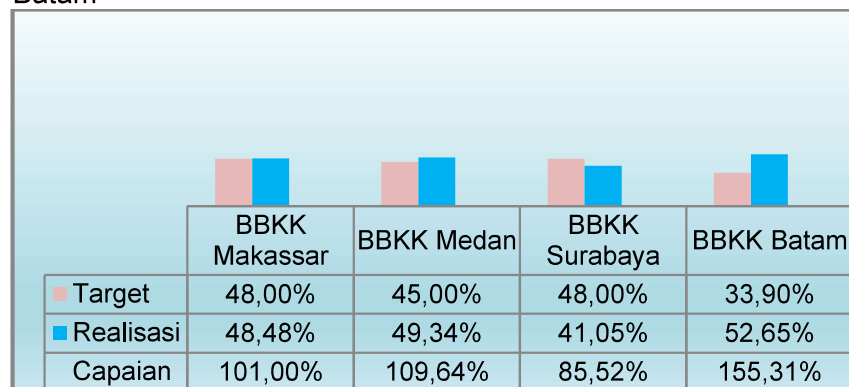
Grafik III.16 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-5 BBKK Makassar Semester I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah



Grafik III.16 terlihat realisasi Semester I Tahun 2026 lebih besar dari target Semester I Tahun 2026 dan diproyeksikan akan mencapai target di tahun 2027, 2028, dan 2029 sebesar 96%.

- 8) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam dapat dilihat dalam grafik III.17.

Grafik III.17 Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 indikator ke-5 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam



Grafik III.17 tergambar bahwa terdapat 1 BBKK yaitu BBKK Surabaya dengan realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan. Untuk BBKK lain melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga capaian bernilai di atas 100.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Realisasi Anggaran pada Semester I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi anggaran secara berkala dan terintegrasi. Monev dilakukan melalui kegiatan *coffee morning* yang melibatkan Kepala BBKK Makassar, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Ketua Tim Kerja, Wakil Ketua Tim Kerja, pengelola keuangan, serta pengelola perencanaan.

- 2) Melalui kegiatan *coffee morning* tersebut dilakukan pemantauan terhadap perkembangan realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian antara rencana pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD). Apabila terdapat kegiatan yang telah direncanakan dalam RPD namun belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dilakukan identifikasi terhadap kegiatan lain yang telah siap dilaksanakan dan dapat direalisasikan pada periode berjalan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dapat disesuaikan secara optimal untuk mendukung pencapaian target penarikan dana.
- 3) Selain itu, dilakukan pemantauan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, khususnya kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap realisasi anggaran. Apabila terdapat kendala dalam proses pengadaan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan realisasi, dilakukan percepatan, penyesuaian jadwal, atau pengalihan pelaksanaan kepada kegiatan lain yang telah siap direalisasikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko tidak tercapainya target realisasi anggaran pada bulan atau periode berjalan.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Ketidakpastian waktu kedatangan barang dari penyedia.  
Dalam proses pengadaan barang, waktu kedatangan barang sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan penyedia. Pejabat pengadaan atau PPK tidak dapat sepenuhnya mengintervensi atau memastikan secara pasti waktu barang tiba, karena batas waktu yang tercantum dalam surat pesanan atau kontrak merupakan jangka waktu penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan. Barang dapat tiba lebih cepat maupun lebih lambat dari waktu yang telah diperkirakan dalam perencanaan.
- 2) Realisasi anggaran tidak hanya bergantung pada barang atau pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, tetapi juga pada



tersedianya dokumen pendukung pencairan anggaran secara lengkap dan benar. Kelengkapan dokumen tersebut, seperti BAST, kuitansi, faktur, dan dokumen pendukung lainnya, dapat diterima pada waktu yang berbeda-beda sehingga memengaruhi waktu proses pencairan anggaran.

- 3) Pembatalan kontrak akibat penyedia tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai batas waktu kontrak. Terdapat pengadaan yang telah melalui proses kontrak dan telah lapor kontrak di KPPN, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam surat pesanan/kontrak, penyedia belum dapat mengirimkan atau menyerahkan barang yang diperjanjikan. Kondisi tersebut menyebabkan kontrak harus dilakukan pembatalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembatalan tersebut berdampak signifikan terhadap realisasi anggaran karena nilai kontrak cukup besar dan merupakan belanja modal, sehingga berpotensi menyebabkan target realisasi anggaran dan RPD yang telah direncanakan tidak tercapai sesuai jadwal.
- 4) Sumber dana anggaran BBKK Makassar sebagian besar berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga ketersediaan anggaran untuk membiayai kegiatan sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan PNBP. Meskipun telah memperoleh persetujuan dari Kanwil untuk menggunakan Maksimum Pencairan (MP) PNBP sebesar 60% dari target PNBP, penggunaan anggaran tersebut tetap perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi penerimaan PNBP.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Untuk mengantisipasi ketidakpastian waktu kedatangan barang, dilakukan pemantauan secara berkala terhadap progres pelaksanaan pengadaan dan komunikasi intensif dengan penyedia terkait status pemenuhan serta estimasi waktu pengiriman barang. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap

kegiatan atau pengadaan lain yang telah siap dilaksanakan sebagai alternatif apabila terdapat pengadaan yang berpotensi mengalami keterlambatan. Dengan demikian, realisasi anggaran dapat diarahkan kepada kegiatan lain yang siap direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan dampak keterlambatan terhadap pencapaian target realisasi anggaran.

- 2) Untuk mempercepat proses pencairan anggaran, dilakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan penyedia terkait pemenuhan dan penyampaian dokumen pendukung pembayaran. Untuk mengantisipasi keterlambatan penerimaan dokumen asli, khususnya pada pengadaan dengan penyedia yang berada di luar wilayah atau lokasi yang jauh, dilakukan koordinasi dengan penyedia agar dokumen pendukung pencairan anggaran dapat disampaikan terlebih dahulu dalam bentuk soft file untuk dilakukan pemeriksaan dan proses administrasi awal. Selanjutnya, dokumen asli tetap dimintakan dan ditunggu pengirimannya oleh penyedia sebagai bagian dari kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan anggaran, tanpa mengabaikan kewajiban pemenuhan dokumen asli sebagai bagian dari pertanggungjawaban administrasi.
- 3) Untuk meminimalkan risiko pembatalan kontrak, dilakukan monitoring secara berkala terhadap progres pelaksanaan kontrak, termasuk pemantauan terhadap kemampuan penyedia dalam memenuhi jadwal pengiriman dan penyelesaian pekerjaan. Apabila terdapat indikasi keterlambatan, dilakukan koordinasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta menentukan langkah tindak lanjut sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku. Apabila kontrak pada akhirnya harus dibatalkan, segera dilakukan pembatalan kontrak dengan penyedia dan melaporkan ke KPPN terkait pembatalan kontrak tersebut.

- 4) Penyusunan RPD dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan yang tersedia dari PNBPN dan besaran MP PNBPN yang telah disetujui. RPD disusun agar tidak melebihi batas MP PNBPN yang tersedia, namun tetap diarahkan untuk memenuhi target realisasi anggaran setiap periode. Dalam pelaksanaannya, dilakukan penentuan prioritas terhadap kegiatan dan pengadaan yang telah siap serta dapat segera direalisasikan, sehingga penggunaan anggaran dapat diarahkan terlebih dahulu pada kegiatan yang memiliki tingkat kesiapan dan urgensi lebih tinggi, sambil menunggu peningkatan realisasi penerimaan PNBPN dan tersedianya tambahan kemampuan pendanaan. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi penerimaan PNBPN, penggunaan MP, serta realisasi anggaran untuk memastikan keseimbangan antara kemampuan pendanaan dan kebutuhan belanja sampai dengan akhir tahun anggaran.

#### h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai Efisiensi

$$E = \frac{(25.761.391.000 \times 1) - 12.835.089.154}{25.761.391.000 \times 1} \times 100\%$$

$$E = 50,18\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{50,18}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 175,44\%$$

Untuk indikator 5 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp/ 25.761.391.000,-, dengan realisasi anggaran Rp. 12.835.089.154,-, dengan capaian bernilai 101, sehingga diperoleh efisiensi 50,18, dengan nilai efisiensi sebesar 175,44, berarti untuk kegiatan pada indikator 5 bernilai efisien dari sisi anggaran.

Selain efisiensi dari anggaran, penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Inovasi SiTOPENG Memuat data dan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa baik secara kontraktual maupun non kontraktual dengan pihak ketiga. Berisi spreadsheet monitoring dan penyimpanan file google drive data arsip pengadaan. Dengan adanya monitoring pengadaan sehingga dapat menjadi warning/alarm apabila terdapat belanja kontraktual yang harus segera dilapor kontrak ke KPPN sehingga tidak terlambat untuk dilaporkan. Selain itu memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memonitor proses pengadaan hingga pencairan anggarannya.
- 2) Inovasi D'Tawang merupakan akronim dari Dokumen PerTanggungjawaban Keuangan. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pegawai BBKK Makassar (baik yang di induk maupun di wilker) yang ingin memasukkan Pertanggungjawabannya untuk selanjutnya diproses pencairannya. seluruh proses pencairan dapat diakses dalam menu "form Monitoring Posisi Pertanggungjawaban". Jika sebelumnya dokumen pertanggungjawaban harus diubah beberapa kali sebelum di tandatangani oleh PPK dikarenakan adanya kesalahan, dengan aplikasi ini dokumen akan di print untuk ditandatangani oleh PPK setelah diverifikasi oleh verifikator.

## 6. INDIKATOR KEENAM

### **Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam**

#### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- 5) Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksana Kewaspadaan Wabah.

#### b. Pengertian

Adalah mengukur penerbitan dokumen pelayaran/penerbangan dalam kurun waktu kurang dari 48 jam sejak alat angkut dengan risiko penyakit tinggi (kategori merah) tiba di pintu masuk negara.

#### c. Definisi Operasional

Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil *risk based assesment* dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun.

d. Rumus (cara perhitungan)

Jumlah dokumen kedatangan yang diterbitkan kurang dari 2x24 jam dibagi total alat angkut kategori merah dikali 100%.

e. Capaian Indikator

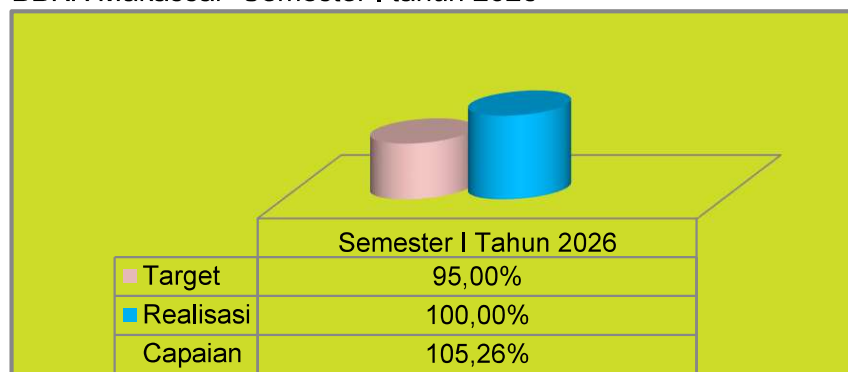
Pada Semester I tahun 2026 IKK Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam memperoleh realisasi sebesar 100% melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian di atas 100%.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = \text{Capaian}$$

$$\frac{100\%}{95\%} = 105,26$$

- 1) Perbandingan antara target Semester I tahun 2026 dengan realisasi Semester I Tahun 2025 untuk indikator 6.

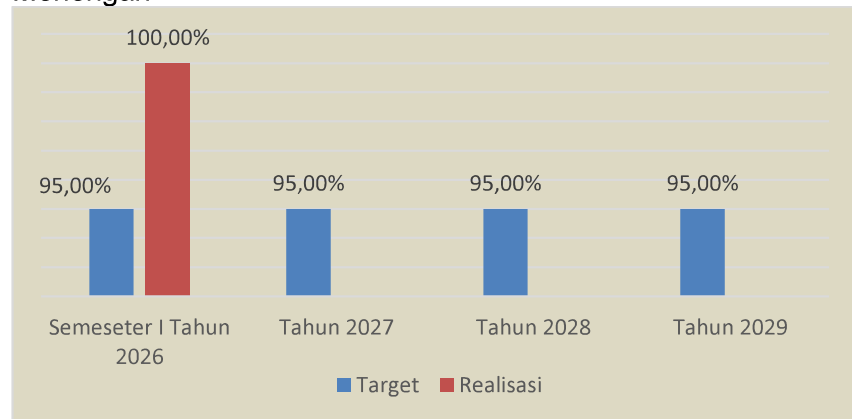
Grafik III.18 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Semester I tahun 2026



Grafik III.18 menggambarkan antara target dan realisasi indikator 6, dapat dilihat target untuk Semester I tahun 2026 ditetapkan dengan nilai 95%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian menjadi 105,26%. Capaian lebih dari 100% dikarenakan realisasi melebihi target yang ditetapkan.

- 2) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan target jangka menengah dapat dilihat dalam grafik III.19.

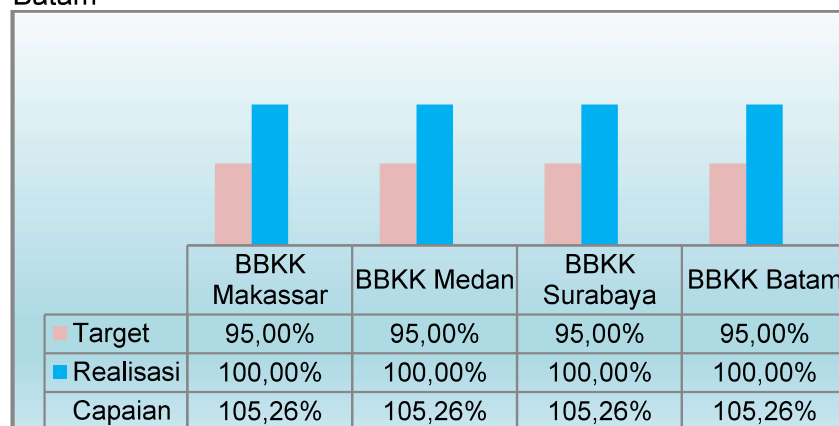
Grafik III.19 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-6 BBKK Makassar Semester I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah



Grafik III.19 terlihat realisasi Semester I Tahun 2026 lebih besar dari target Semester I Tahun 2026 dan diproyeksikan akan mencapai atau melampaui target di tahun 2027, 2028, dan 2029.

- 3) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam dapat dilihat dalam grafik III.20.

Grafik III.20 Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 Indikator ke-6 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam



Grafik III.20 tergambar bahwa terdapat seluruh BBKK memperoleh realisasi 100%, sehingga capaian di atas 100% karena target lebih kecil dari realisasi yang diperoleh.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Penerapan pengawasan kedatangan alat angkut berbasis risiko (Risk Based Assessment /RBA) dimana Dokumen *Maritime Health Declaration* (MHD) dan dokumen pendukung yang telah diunggah oleh agen pelayaran sebelum kapal tiba memangkas waktu verifikasi berkas.
- 2) Hasil *Risk Based Assessment* (RBA) kapal yang memberikan pengkategorian kedatangan kapal berdasarkan risiko memberikan petugas karantina untuk lebih focus pada kapal dengan status risiko tinggi sehingga dapat memangkas waktu layanan / pengawasan dalam penerbitan COP, Dimana. Sebelum adanya RBA, semua kapal luar negeri cenderung diperlakukan sama (*one-size-fits-all*), yang memicu penumpukan antrean pemeriksaan.
- 3) Kesiapsiagaan Petugas Piket 24 jam. Keberadaan petugas piket kekarantina di pelabuhan memfasilitasi pelayanan tanpa tertunda jam kerja.
- 4) Komitmen petugas karantina Kesehatan dan agen pelayaran dalam penerapan RBA dalam pengawasan kedatangan kapal memberikan dampak secara langsung dalam memangkas waktu layanan khususnya dalam penerbitan COP kurang dari 24 jam sejak pelaporan kedatangan.

f. Masalah yang dihadapi

- a. Terbatasnya jumlah petugas karantina di beberapa wilayah kerja dalam melakukan pengawasan kedatangan kapal menyebabkan kemungkinan adanya kesenjangan kualitas pengawasan terhadap kedatangan kapal dari luar negeri.
- b. Geografis Wilker Tersebar: Jarak tempuh dari pos/kantor ke lokasi sandar/labuh kapal asing di wilker sering kali membutuhkan waktu perjalanan darat/laut yang cukup lama, memotong efisiensi waktu petugas yang terbatas.
- c. SDM teknis yang terbatas difokuskan hanya untuk melakukan tindakan *on-board inspection* pada kapal yang teridentifikasi



berisiko sedang hingga tinggi sehingga mempercepat proses penerbitan COP

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Setiap penerbitan COP < 24 jam pada kapal RBA Merah harus disertai dengan *After Action Review* (AAR) untuk memastikan bahwa kecepatan waktu layanan tersebut betul adanya dan bukan karena adanya prosedur pengawasan yang longgar.
- 2) Alokasi petugas pada pos / wilker secara proporsional yang dengan jumlah kedatangan kapal dari luar negeri yang tinggi
- 3) Penyediaan sarana transportasi guna menunjang pengawasan kedatangan kapal khususnya wilker/pos yang memiliki Pelabuhan yang cukup jauh.

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai Efisiensi

$$E = \frac{(832.658.000 \times 1,05) - 163.116.965}{832.658.000 \times 1,05} \times 100\%$$

$$E = 81,39\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{81,39}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 253,47\%$$

Untuk indikator 6 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 832.658.000,-, dengan realisasi anggaran Rp. 163.116.965,-, dengan capaian bernilai 105,26, sehingga diperoleh efisiensi 81,39%, dengan nilai efisiensi sebesar 253,47%, berarti untuk kegiatan pada indikator 6 bernilai efisien dari sisi anggaran.

Selain efisiensi dari anggaran, penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Inovasi VISION (VISUALISASI INTEGRASI LAPORAN) merupakan aplikasi penyajian data laporan kinerja harian, yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan respon pemenuhan kebutuhan data baik untuk pimpinan dalam pengambilan keputusan, petugas BBKK Makassar maupun pihak eksternal yang membutuhkan data dan informasi terkait BBKK Makassar.

## 7. INDIKATOR KETUJUH

### **Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance***

#### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Pengertian

Adalah tidak ditemukannya adalah tindakan pelanggaran jabatan di mana seorang pimpinan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan Lembaga menerapkan kebijakan tanpa kompromi (menghukum atau memecat langsung) terhadap segala bentuk pelanggaran disiplin, kecurangan, gratifikasi, dan korupsi.

c. Definisi Operasional

Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang.

d. Rumus (cara perhitungan)

Jumlah penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang.

e. Capaian Indikator

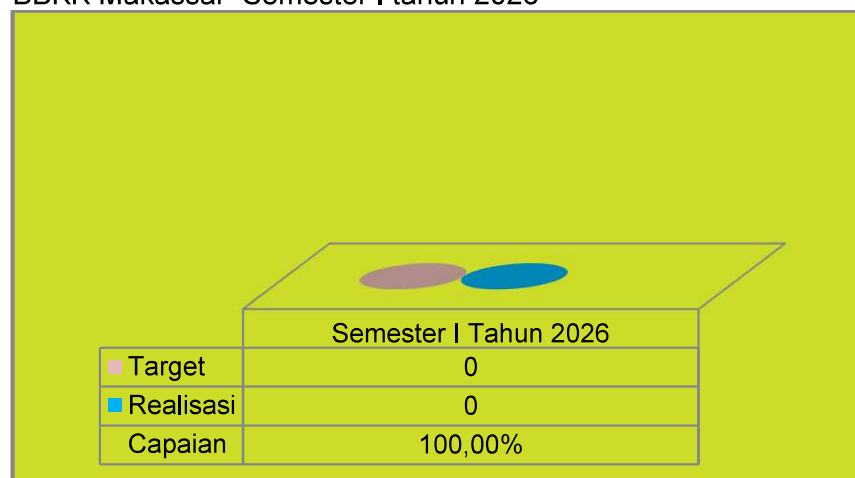
Pada Semester I tahun 2026 IKK Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance memperoleh realisasi sebesar 0 penyalahgunaan, artinya tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala BBKK Makassar selama Semester 1 Tahun 2026, sehingga capaian memperoleh nilai sebesar 100%.

$$\frac{Realisasi}{Target} = Capaian$$

$$1 \frac{0 \text{ penyalahgunaan}}{0 \text{ penyalahgunaan}} = 100$$

- 5) Perbandingan antara target Semester I tahun 2026 dengan realisasi Semester I Tahun 2025 untuk indikator 7.

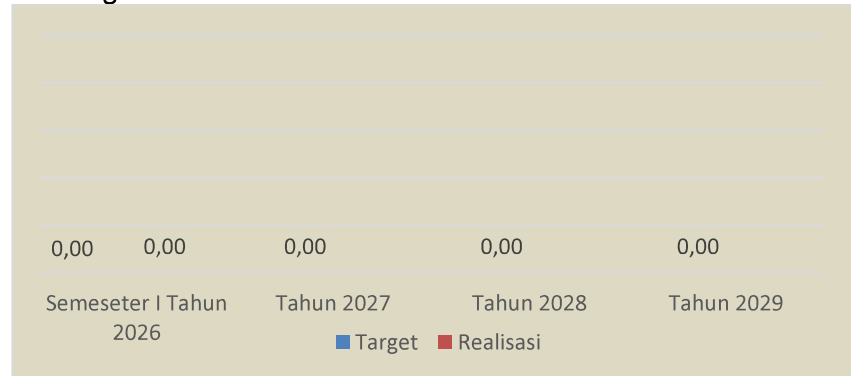
Grafik III.21 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Semester I tahun 2026



Grafik III.21 menggambarkan antara target dan realisasi indikator 7, dapat dilihat target untuk Semester I tahun 2026 ditetapkan dengan 0 penyalahgunaan, dan untuk Semester 1 Tahun 2026 tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan dari Kepala BBKK Makassar, sehingga capaian sebesar 100%.

- 2) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan target jangka menengah dapat dilihat dalam grafik III.22.

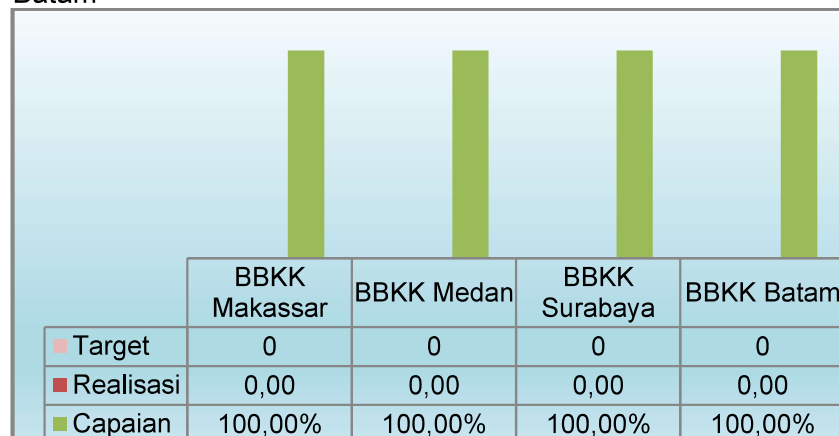
Grafik III.22 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-7 BBKK Makassar Semester I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah



Grafik III.22 terlihat realisasi Semester I Tahun 2026 sesuai dengan target yang ditetapkan dan diproyeksikan akan mencapai target di tahun 2027, 2028, dan 2029 dengan 0 penyalahgunaan.

- 3) Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam dapat dilihat dalam grafik III.23.

Grafik III.23 Perbandingan antara Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 Indikator ke-7 dengan BBKK Medan, Surabaya, dan Batam



Grafik III.23 tergambar bahwa seluruh BBKK memperoleh realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, karena seluruh Kepala BBKK yang digambarkan dalam grafik tersebut tidak ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan selama Semester I Tahun 2026, sehingga capaian menjadi 100%.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Respons Cepat dan Pembentukan Tim Investigasi: Pimpinan instansi menunjukkan respons cepat dengan membentuk tim pendalaman segera setelah adanya temuan dugaan gratifikasi. Tindakan ini mencerminkan komitmen awal terhadap kebijakan *Zero Tolerance* dan upaya untuk menegakkan integritas.
- 2) Keterlibatan Satuan Kepatuhan Internal (SKI): Kehadiran anggota SKI dalam tim pendalaman merupakan langkah positif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP 60/2008. Keterlibatan SKI diharapkan dapat memastikan objektivitas dan independensi dalam proses pendalaman.
- 3) Identifikasi Maladministrasi: Tim berhasil mengidentifikasi adanya maladministrasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendalaman telah dilakukan dan menemukan adanya penyimpangan dari prosedur atau standar administrasi yang seharusnya, yang merupakan langkah awal penting dalam perbaikan tata kelola.
- 4) Tindakan Pembinaan (Coaching): Pemberian *coaching* sebagai rekomendasi dan tindak lanjut menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki perilaku dan pemahaman pegawai yang melakukan maladministrasi. Ini dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam pendekatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama jika maladministrasi tersebut bersifat ringan dan tidak disengaja.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Inkonsistensi dengan Kebijakan *Zero Tolerance* dan Dugaan Gratifikasi: Kebijakan *Zero Tolerance* mengindikasikan tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan korupsi seperti gratifikasi. Namun, dugaan awal adalah gratifikasi, yang merupakan tindak pidana korupsi serius berdasarkan UU 20/2001. Jika hasil pendalaman hanya menemukan maladministrasi dan sanksinya hanya *coaching*, hal

ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesesuaian dengan kebijakan *Zero Tolerance* dan beratnya dugaan awal.

- 2) Kesenjangan antara Dugaan Awal dan Hasil Akhir: Perubahan dari dugaan gratifikasi menjadi temuan maladministrasi, dan sanksi dari potensi pidana menjadi *coaching*, mengindikasikan adanya kesenjangan dalam proses pendalaman atau interpretasi temuan. Maladministrasi, meskipun pelanggaran, memiliki tingkat keseriusan yang berbeda dengan gratifikasi.
- 3) Kesesuaian Sanksi dengan Peraturan Disiplin PNS: Berdasarkan PP 94/2021 dan Peraturan BKN 6/2022, *coaching* bukanlah bentuk hukuman disiplin formal. Hukuman disiplin terbagi menjadi ringan, sedang, dan berat, dengan tingkatan sanksi yang jelas [5, 6]. Jika maladministrasi yang ditemukan cukup serius, atau jika unsur gratifikasi tidak sepenuhnya tereliminasi, sanksi *coaching* mungkin tidak memadai dan berpotensi melanggar ketentuan disiplin PNS.
- 4) Potensi Konflik Kepentingan dalam Tim Pendalaman: Meskipun melibatkan SKI, komposisi tim yang juga terdiri dari tata usaha, kepegawaian, dan keuangan, perlu dipastikan tidak ada potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil pendalaman, terutama jika ada keterkaitan personal atau struktural dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
- 5) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Jika proses pendalaman dan alasan perubahan dari dugaan gratifikasi menjadi maladministrasi tidak dijelaskan secara transparan, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan pegawai dan publik, serta mengurangi kepercayaan terhadap komitmen *Zero Tolerance* pimpinan.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Re-evaluasi dan Klasifikasi Pelanggaran: Melakukan re-evaluasi terhadap temuan maladministrasi untuk memastikan apakah ada unsur gratifikasi yang terlewat atau tidak terbukti secara optimal. Jika ada, kasus harus ditindaklanjuti sesuai UU Tipikor. Jika murni

- maladministrasi, perlu diklasifikasikan tingkatannya (ringan, sedang, berat) sesuai PP 94/2021 dan Peraturan BKN 6/2022, dan diberikan sanksi disiplin yang sesuai, bukan hanya *coaching*.
- 2) Peningkatan Kapasitas Tim Pendalaman: Memberikan pelatihan khusus kepada anggota tim pendalaman, terutama terkait identifikasi gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan penerapan peraturan disiplin PNS. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap temuan ditangani dengan tepat sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.
  - 3) Standardisasi Prosedur Penanganan Pelanggaran: Mengembangkan dan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terperinci untuk penanganan setiap dugaan pelanggaran, mulai dari pelaporan, investigasi, penentuan jenis pelanggaran, hingga penjatuhan sanksi. SOP ini harus mengacu pada seluruh dasar hukum yang relevan dan memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan *Zero Tolerance*.
  - 4) Penguatan Peran SKI: Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada SKI untuk melakukan audit investigatif secara independen dalam kasus-kasus dugaan gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang yang serius. Hasil audit SKI harus menjadi dasar utama dalam penentuan jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan.
  - 5) Sosialisasi Komprehensif Kebijakan *Zero Tolerance*: Melakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh mengenai kebijakan *Zero Tolerance*, termasuk konsekuensi hukum dan disipliner dari setiap jenis pelanggaran (gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maladministrasi), kepada seluruh pegawai. Penekanan harus diberikan pada perbedaan antara *coaching* dan hukuman disiplin formal.
  - 6) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Membangun mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran yang lebih transparan dan akuntabel, misalnya dengan menyediakan saluran pengaduan yang aman dan memastikan bahwa setiap kasus



ditindaklanjuti dengan jelas dan hasilnya dikomunikasikan secara internal (dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku).

#### h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai Efisiensi

$$E = \frac{(0 \times 1) - 0}{0 \times 1} \times 100\%$$

$$E = 0\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\%$$

Untuk indikator 7 tidak terdapat alokasi anggaran yang mendukung IKK tersebut, namun pelaksanaan kegiatan tetap berjalan khususnya penilaian Pimpinan BBKK Makassar sebagai role model yang dimonitoring dan evaluasi oleh Tim Pokja I Pembangunan Zona Integritas serta Tim SKI BBKK Makassar. Sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar 50%.

Selain efisiensi dari anggaran, penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Monev yang dilakukan oleh Tim Pokja I Tim Pembangunan Zona Integritas secara berkala dalam penilaian terhadap Pimpinan BBKK Makassar sebagai role model;
- 2) Tim SKI yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai :
  1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko;
  3. melaksanakan pemantauan Pengendalian Intern; dan
  4. melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan.

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Berdasarkan Sumber Dana

Realisasi Anggaran berdasarkan sumber dana dapat dilihat dalam tabel III.3 di bawah ini.

Tabel III.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana  
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar  
Semester I Tahun 2026

| No | Sumber Dana                          | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | Capaian (%)   |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | Rupiah Murni (RM)                    | 25.761.391.000        | 12.621.772.165        | 48,99%        |
| 2  | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 4.738.294.000         | 2.165.573.304         | 45,70%        |
|    | <b>Total</b>                         | <b>30.499.685.000</b> | <b>14.787.345.469</b> | <b>48,48%</b> |

### 2. Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel III.4 di bawah ini.

**Tabel III.4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja  
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar  
Semester I Tahun 2026**

| No | Jenis Belanja   | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | Capaian (%)   |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | Belanja Pegawai | 21.737.872.000        | 11.017.999.535        | 50,69%        |
| 2  | Belanja Barang  | 8.328.864.000         | 3.538.012.934         | 42,48%        |
| 3  | Belanja Modal   | 432.949.000           | 231.333.000           | 53,43%        |
|    | <b>Total</b>    | <b>30.499.685.000</b> | <b>14.787.345.469</b> | <b>48,48%</b> |

### **3. Berdasarkan Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output**

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dapat dilihat dalam tabel III.5

**Tabel III.5 Realisasi Anggaran berdasarkan  
Klasifikasi Rincian Output (KRO)  
dan Rincian Output (RO) Kegiatan  
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Semester I Tahun 2026**

| KODE                 | URAIAN                                                                                    | VOL  | SATUAN   | ANGGARAN (Rp)         | REALISASI (Rp)        | CAPAIAN        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>BBKK Makassar</b> |                                                                                           |      |          | <b>30,499,685,000</b> | <b>14,787,345,469</b> | <b>48.48 %</b> |
| DZ                   | Program Sistem Ketahanan Kesehatan                                                        |      |          | 4,738,294,000         | 1,952,256,315         | 41.20 %        |
| DZ.7960              | Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan                                         |      |          | 4,738,294,000         | 1,952,256,315         | 41.20 %        |
| PEA                  | Koordinasi                                                                                | 12   | kegiatan | 60,280,000            | 17,755,000            | 29.45 %        |
| PEA.001              | Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS-29)              | 12   | kegiatan | 60,280,000            | 17,755,000            | 29.45 %        |
| PEF                  | Sosialisasi dan Diseminasi                                                                | 150  | orang    | 38,286,000            | 0                     | 0.00 %         |
| PEF.001              | Sosialisasi pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah (HS-29) | 150  | orang    | 38,286,000            | 0                     | 0.00 %         |
| QAA                  | Pelayanan Publik kepada masyarakat                                                        | 8500 | Orang    | 49,864,000            | 1,534,310             | 3.08 %         |

| KODE    | URAIAN                                                        | VOL  | SATUAN  | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN |
|---------|---------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------|---------|
| QAA.001 | Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (HS-29) | 8500 | Orang   | 49,864,000    | 1,534,310      | 3.08 %  |
| QAH     | Pelayanan Publik Lainnya                                      | 1994 | layanan | 3,753,971,000 | 1,402,788,504  | 37.37 % |
| QAH.016 | Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan (HS-29)         | 19   | layanan | 193,978,000   | 37,034,123     | 19.09 % |
| QAH.017 | Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut (HS-29)        | 81   | layanan | 987,530,000   | 214,002,639    | 21.67 % |
| QAH.U02 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara   | 318  | layanan | 279,840,000   | 73,170,000     | 26.15 % |
| QAH.U07 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD               | 124  | layanan | 152,024,000   | 11,820,000     | 7.78 %  |
| QAH.U08 | Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis   | 131  | layanan | 383,961,000   | 104,950,794    | 27.33 % |
| QAH.U09 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare             | 124  | layanan | 59,768,000    | 5,030,000      | 8.42 %  |
| QAH.U11 | Layanan survei faktor risiko penyakit DBD                     | 444  | layanan | 159,840,000   | 35,369,312     | 22.13 % |
| QAH.U12 | Layanan survei faktor risiko penyakit malaria                 | 30   | layanan | 51,600,000    | 12,438,794     | 24.11 % |
| QAH.U13 | Layanan survei faktor risiko penyakit diare                   | 300  | layanan | 159,000,000   | 26,301,388     | 16.54 % |
| QAH.U14 | Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS                | 35   | layanan | 45,990,000    | 30,302,600     | 65.89 % |
| QAH.U15 | Layanan survei faktor risiko penyakit TB                      | 14   | layanan | 68,530,000    | 37,032,093     | 54.04 % |
| QAH.U19 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan      | 254  | layanan | 156,210,000   | 32,981,700     | 21.11 % |
| QAH.U20 | Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria             | 60   | layanan | 58,200,000    | 13,371,161     | 22.97 % |

| KODE    | URAIAN                                                                   | VOL | SATUAN  | ANGGARAN (Rp)  | REALISASI (Rp) | CAPAIAN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|----------------|---------|
| QAH.U25 | Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi dalam kota                    | 30  | layanan | 514,500,000    | 509,821,400    | 99.09 % |
| QAH.U28 | Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi dalam kota                    | 30  | layanan | 483,000,000    | 259,162,500    | 53.66 % |
| RAB     | Sarana Bidang Kesehatan                                                  | 26  | Paket   | 835,893,000    | 530,178,501    | 63.43 % |
| RAB.001 | Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29)  | 26  | Paket   | 835,893,000    | 530,178,501    | 63.43 % |
| WA      | Program Dukungan Manajemen                                               |     |         | 25,761,391,000 | 12,835,089,154 | 49.82 % |
| WA.4815 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit |     |         | 25,761,391,000 | 12,835,089,154 | 49.82 % |
| EBA     | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                      | 1   | Layanan | 25,425,695,000 | 12,621,772,165 | 49.64 % |
| EBA.994 | Layanan Perkantoran                                                      | 1   | Layanan | 25,425,695,000 | 12,621,772,165 | 49.64 % |
| EBB     | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                                    | 5   | Unit    | 317,430,000    | 213,316,989    | 67.20 % |
| EBB.951 | Layanan Sarana Internal                                                  | 5   | Unit    | 317,430,000    | 213,316,989    | 67.20 % |
| EBC     | Layanan Manajemen SDM Internal                                           | 2   | Orang   | 18,266,000     | 0              | 0.00 %  |
| EBC.996 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan                                         | 2   | Orang   | 18,266,000     | 0              | 0.00 %  |

#### 4. Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar

Realisasi anggaran berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2026.

Tabel III.6 Realisasi Anggaran berdasarkan  
Indikator Perjanjian Kinerja  
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Semester I Tahun 2026

| No | Sasaran                                                                                                      | Indikator                                                                                                                     | Kinerja |           |             | Anggaran       |                |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|    |                                                                                                              |                                                                                                                               | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi (Rp)   | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 1  | Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah | 1. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah                 | 76%     | 100%      | 131,58%     | 3.905.636.000  | 1.788.139.350  | 45,78%      |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya                        | 2. Nilai SAKIP                                                                                                                | 83      | 84,60     | 101,93%     | 0              | 0              | 0%          |
|    |                                                                                                              | 3. Nilai Kinerja Anggaran                                                                                                     | 46,38   | 74,38     | 160,37%     | 0              | 0              | 0%          |
|    |                                                                                                              | 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit | 95%     | 0,00      | 0,00%       | 0              | 0              | 0%          |
|    |                                                                                                              | 5. Persentase Realisasi Anggaran                                                                                              | 48%     | 48,48%    | 101,00%     | 25.761.391.000 | 12.835.089.154 | 49.82%      |
|    |                                                                                                              | 6. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam                   | 95%     | 100,00%   | 105,26%     | 832.658.000    | 163.116.965    | 19,59%      |
|    |                                                                                                              | 7. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK <i>Zero Tolerance</i>                                                                 | 0       | 0         | 100,00%     | 0              | 0              | 0%          |

## **BAB IV P E N U T U P**

### **A. KESIMPULAN**

Pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja berdasarkan Target kinerja BBKK Makassar Semester I tahun 2026 yang tertulis di dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Dirjen P2 dengan Kepala BBKK Makassar, dapat disimpulkan :

1. Terdapat 7 indikator dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar tahun 2026, meliputi :
  - a. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah dengan target 76% realisasi 100% dengan nilai capaian 131,58%;
  - b. Nilai SAKIP dengan target 83 realisasi 84,60 dengan nilai capaian 101,93%;
  - c. Nilai Kinerja Anggaran dengan target 46,38 realisasi 74,38 dengan nilai capaian 160,37%;
  - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan target 95% realisasi 0 dengan nilai capaian 0%;
  - e. Persentase Realisasi Anggaran dengan target 48% realisasi 48,48% dengan nilai capaian 101%;
  - f. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam dengan target 95% realisasi 100% dengan nilai capaian 105,26%;
  - g. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance dengan target 0 penyalahgunaan realisasi 0 penyalahgunaan dengan nilai capaian 100%.

Secara keseluruhan indikator mencapai target yang telah ditetapkan, dengan nilai rata-rata capaian sebesar 116,69%.
2. Selama kurun waktu 2023, 2024, 2025, dan Semester I Tahun 2026 BBKK Makassar memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar :
  - a. Tahun 2023 dengan rata-rata capaian sebesar 104,19%.
  - b. Tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar 107,08%.

- c. Tahun 2025 dengan rata-rata capaian sebesar 107,06%.
  - d. Semester I Tahun 2026 dengan rata-rata capaian sebesar 116,69%.
- Rata-rata capaian kinerja tahunan paling rendah di tahun 2023 sebesar 104,19% dan tertinggi di Semester I Tahun 2026 sebesar 116,69%.
3. Perbandingan rata-rata capaian kinerja Semester I tahun 2026 dengan BKK dengan klasifikasi yang sama yaitu BBKK Medan, BBKK Surabaya dan BBKK Batam sebesar :
    - a. BBKK Makassar sebesar 116,69%;
    - b. BBKK Medan sebesar 109,29%;
    - c. BBKK Surabaya sebesar 111,79%;
    - d. BBKK Batam sebesar 117,43%.

Rata-rata capaian kinerja paling rendah berada di BBKK Medan dan yang paling tinggi adalah capaian kinerja BBKK Batam.
  4. Peran sumber daya dalam mewujudkan realisasi kinerja sangatlah penting, dalam menganalisis efisiensi sumber daya diperoleh nilai efisiensi untuk setiap indikator yaitu :
    - a. indikator 1 sebesar 213,01%;
    - b. indikator 2 sebesar 50%;
    - c. indikator 3 sebesar 50%;
    - d. indikator 4 sebesar 0%;
    - e. indikator 5 sebesar 175,44%;
    - f. indikator 6 sebesar 253,47%;
    - g. indikator 7 sebesar 50%;

Efisiensi sumber daya terbesar terdapat pada indikator 6 sebesar 253,47% dan untuk indikator 4 nilai efisiensi nihil karena tidak terdapat realisasi hasil kinerja untuk Semester I Tahun 2026.
  5. Anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator BBKK Makassar untuk Semester I tahun 2026 sebesar Rp. 14.786.345.469,- dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 30.499.685.000,-, sehingga realisasi menjadi 48,48% dengan capaian 101% karena target untuk Semester I tahun 2026 sebesar 48%.



## **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk meningkatkan capaian kinerja BBKK Makassar di Semester berikutnya, terdapat rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan :

1. Melakukan monitoring terhadap kinerja perencanaan anggaran sebagai parameter nilai kinerja anggaran sehingga diharapkan NKA tahun 2026 dapat terealisasi maksimal atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap RPK dan RPD untuk memaksimalkan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## PUSTAKA ACUAN

**Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia** Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan

**Peraturan MENPAN-RB RI** Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

**Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia** Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

**Rencana Strategis (Renstra)** Kemenkes Tahun 2025-2029

**Rencana Aksi Program (RAP)** Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2025-2029

**Rencana Aksi Kegiatan (RAK)** BBKK Makassar Tahun 2025-2029, BBKK Makassar Revisi ke-1 Januari 2026

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** BBKK Makassar tahun anggaran 2026

**Daftar Urut Kepangkatan (DUK)** BBKK Makassar, Juni tahun 2026

## **PENYUSUN**

|                  |   |                                                                                                                                         |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengarah         | : | Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan<br>Makassar                                                                                  |
| Penanggung Jawab | : | Kasubag Adum                                                                                                                            |
| Ketua            | : | Arni Angriany Amir, ST                                                                                                                  |
| Anggota          | : | Mardiyana, SKM, M.Adm.Kes<br>Andi Kudrat, SKM<br>Nining Ayu Purnama, S.Kom<br>Arfiani, SKM<br>Amriana Amin, SE<br>Saydaturrizky, AMd.Ak |

# LAMPIRAN

# Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2026



## BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Farchanny Tri Adryanto  
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murti Utami  
Jabatan : Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,  
  
Murti Utami

Pihak Pertama,  
  
Achmad Farchanny Tri Adryanto

Halaman 1 dari 3

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis/<br>Program/Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)                                                                                                     |
| I   | <b>Tujuan 3:<br/>Sistem Ketahanan<br/>Kesehatan yang tangguh<br/>dan responsif</b><br>Sasaran Program:<br>Meningkatnya pengendalian<br>faktor risiko di pintu masuk<br>negara                                                                                                                                                                  | <b>IT 3 International Health<br/>Regulations (IHR) score</b><br><br>IKP 24.2 Persentase Faktor risiko<br>penyakit di pintu masuk<br>negara yang<br>dikendalikan<br><br>IKK 24.2.1 Persentase Pintu<br>masuk yang<br>melaksanakan deteksi<br>penyakit dan faktor<br>risiko kesehatan<br>berpotensi<br>KLB/Wabah                                                                     | <br><br><br><br><br><br>76%                                                                             |
| II  | <b>Tujuan 6:<br/>Kementerian Kesehatan<br/>yang agile, efektif, dan<br/>efisien</b><br>Sasaran Strategis 6.1<br>Meningkatnya kualitas tata<br>kelola Kementerian<br>Kesehatan<br>024.05.WA Program<br>Dukungan Manajemen<br><br>Sasaran Program:<br>Meningkatnya Tata Kelola<br>Organisasi dan<br>Pengendalian Intern<br>Kementerian Kesehatan | <b>IT 6 Nilai Good Public<br/>Governance<br/>Kementerian<br/>Kesehatan**</b><br><br>ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi<br>Kementerian Kesehatan*<br><br><br><br>IKM 33.1 Nilai SAKIP<br><br>IKM 33.2 Nilai Kinerja Anggaran<br><br>IKM 33.4 Persentase Rekomendasi<br>Hasil Pemeriksaan BPK<br>yang telah tuntas<br>ditindaklanjuti<br><br>IKD 33.1 Persentase Realisasi<br>Anggaran | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>83<br>(Nilai)<br><br>92,75<br>(Nilai)<br><br>95%<br><br><br>96% |

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis/<br>Program/Sasaran Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                   | Target                             |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (1) | (2)                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                                 | (4)                                |
|     |                                                      | IKD 33.1.2 Peningkatan dokumen<br>layanan kekeantinaan<br>Kesehatan untuk alat<br>angku dalam kategori<br>merah kurang dari<br>2x24 jam<br><br>IKD 33.1.3 Penyalahgunaan<br>kewenangan Kepala<br>BKK zero tolerance | 95%<br><br>0<br>penyalahgu<br>naan |

Keterangan:  
\* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)  
\*\* : Kolaborasi (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)  
IKM : Indikator Kinerja Mandatory Program Dukungan Manajemen  
IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

| Kegiatan                                                                                    | Anggaran                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di<br>Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit | Rp. 25.761.391.000,-        |
| 2. Penyelenggaraan Pelayanan Kekeantinaan<br>Kesehatan                                      | Rp. 4.738.294.000,-         |
| <b>Total Anggaran DIPA Balai Besar Kekeantinaan<br/>Kesehatan Makassar</b>                  | <b>Rp. 30.499.685.000,-</b> |

Pihak Kedua,  
  
Murti Utami

Jakarta, Januari 2026  
Pihak Pertama,  
  
Achmad Farchanny Tri Adryanto

Halaman 3 dari 3

## SK Tim Pengelola SAKIP



**Kementerian Kesehatan**  
**BBKK Makassar**

Jalan Bendera Sultan Hasanuddin Makassar, Maros  
Sulawesi Selatan 90552  
 (0411) 4834926  
 <http://bbkkmakassar.com>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**  
**NOMOR : HK.02.03/C.IX.3/3869/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

- Menimbang:**
- bahwa dalam upaya peningkatan tugas dan fungsi pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;
  - bahwa untuk tercapainya point 1 tersebut di atas, salah satunya melalui peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tentang Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;
- Mengingat:**
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:**
- KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR.



- KESATU** : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KEDUA** : Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;
- KETIGA** : Tugas Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah :
- Melakukan koordinasi untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan restu atas laporan kinerja;
  - Melakukan inventarisasi data dukung yang diperlukan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 27 Agustus 2024

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan  
Makassar,



**Agus Jamaludin**

Lampiran :  
Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan  
Kesehatan Makassar Tentang Tim Pengelola  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar  
Nomor : HK.02.03/C.IX.3/3869/2024  
Tanggal : 27 Agustus 2024

**TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

|                  |   |                                                     |
|------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Pengarah         | : | Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Sub Bagian Administrasi Umum                 |
| Ketua            | : | Arni Angriany Amir, ST                              |
| Sekretaris       | : | Nining Ayu Purnama, S.Kom                           |
| Anggota          | : | Mardiyana, SKM, M.Adm.Kes                           |
|                  |   | Andi Kudrat, SKM                                    |
|                  |   | Arfiani, SKM                                        |
|                  |   | Amriana Amin, SE                                    |
|                  |   | Saydaturrizky, AMd.Ak                               |

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan  
Makassar,



**Agus Jamaludin, SKM, M.Kes**  
NIP 196908221993031005



## SOP Pengumpulan Data Kinerja

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2P</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>Kemenkes</b><br/><b>BBKK Makassar</b></p> </div> <p style="text-align: center;"><b>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR</b></p>         | <b>NOMOR SOP</b>                                                          | : OT.02.02/1.2/0403/2023                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TGL. PEMBUATAN</b>                                                     | : 14 November 2018                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>REVISI</b>                                                             | : Ke-3                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TANGGAL EFEKTIF</b>                                                    | : 21 Juni 2024                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DISAHKAN OLEH</b>                                                      | <div style="text-align: center;">  <p><b>KEPALA</b><br/>Agus Jamaludin, SKM, M.Kes<br/>NIP. 196908221993031005</p> </div> |
| <b>SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NAMA SOP</b>                                                           | <b>PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>DASAR HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>                                            |                                                                                                                                                                                                              |
| 1. IHR Tahun 2005<br>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah<br>3. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan | 1. Umum, minimal SLTA sederajat<br>2. Memahami Tata Administrasi Arsip    |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>KETERKAITAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>                                           |                                                                                                                                                                                                              |
| 1. SOP Pengukuran Kinerja<br>2. SOP Pengarsipan Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Alat Tulis Kantor<br>2. Jaringan Internet<br>3. Printer<br>4. Komputer |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PERINGATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Buku Penomoran Surat;<br>2. Lembar Disposisi, dll                      |                                                                                                                                                                                                              |

### PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

| NO | KEGIATAN                                                                                            | PELAKSANA                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | MUTU BAKU                                                                                    |          |                                                                                              | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                     | KEPALA BALAI                                                                        | KASUBAG ADUM                                                                        | KETUA TIM KERJA                                                                     | PERENCANA                                                                           | KELENGKAPAN                                                                                  | WAKTU    | OUTPUT                                                                                       |            |
| 1  | Memerintahkan pengumpulan data kinerja                                                              |  |  |                                                                                     |                                                                                     | SK Tim Penyusun Lakip, Surat dan Disposisi                                                   | 1 hari   | Disposisi                                                                                    |            |
| 2  | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Timker dan Subag Adum |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                              | 1 hari   | Format Pengumpulan Data dan informasi Kinerja                                                |            |
| 3  | Mengisi form kinerja masing-masing Timker Timker dan Subag Adum                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     | Format Pengumpulan Data dan informasi Kinerja                                                | 3 hari   | Format Pengumpulan Data dan informasi dari Timker dan Subag Adum                             |            |
| 4  | Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing Timker dan Subag Adum               |                                                                                     |                                                                                     |  |  | Format Pengumpulan Data dan informasi dari Timker dan Subag Adum                             | 1 hari   | Hasil Kompilasi Pengumpulan Data dan Informasi dari Timker dan Subag Adum                    |            |
| 5  | Memverifikasi semua data kinerja untuk bahan final laporan kinerja bulanan                          |                                                                                     |                                                                                     |  |  | Hasil Kompilasi Pengumpulan Data dan Informasi dari Timker dan Subag Adum diverifikasi       | 3 hari   | Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi Hasil Pengukuran Kinerja yang telah diverifikasi |            |
| 6  | Melaporkan hasil verifikasi data kinerja ke Kasubag Adum                                            |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     | Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi Hasil Pengukuran Kinerja yang telah diverifikasi | 30 menit | Data Kinerja                                                                                 |            |
| 7  | Melakukan input data kinerja ke dalam format rekapitulasi bulanan                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     | File format data kinerja laporan bulanan                                                     | 1 hari   | File format data kinerja laporan bulanan                                                     |            |
| 8  | Menyimpan data kinerja bulanan                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     | File format data kinerja laporan bulanan                                                     | 30 menit | Arsip file format data kinerja laporan bulanan                                               |            |

## SOP Pengukuran Kinerja

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2P</b><br><br><br><br><b>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR</b>                                                                                                                                                          | <b>NOMOR SOP</b>                                                          | : OT.02.02/1.2/0404/2023                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TGL. PEMBUATAN</b>                                                     | : 12 November 2018                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>REVISI</b>                                                             | : Ke-3                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TANGGAL EFEKTIF</b>                                                    | : 21 Juni 2024                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DISAHKAN OLEH</b>                                                      | <br><b>Agus Jamaludin, SKM, M.Kes</b><br><b>NIP. 196908221993031005</b> |
| <b>SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NAMA SOP</b>                                                           | <b>PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA</b>                                                                                                                         |
| <b>DASAR HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>                                            |                                                                                                                                                            |
| 1. IHR Tahun 2005<br>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah<br>3. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan | 1. Umum, minimal SLTA sederajat<br>2. Memahami Tata Administrasi Arsip    |                                                                                                                                                            |
| <b>KETERKAITAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>                                           |                                                                                                                                                            |
| 1. SOP Pengumpulan Data Kinerja<br>2. SOP Pengarsipan Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Alat Tulis Kantor<br>2. Jaringan Internet<br>3. Printer<br>4. Komputer |                                                                                                                                                            |
| <b>PERINGATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                                           |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Buku Penomoran Surat;<br>2. Lembar Disposisi, dll                      |                                                                                                                                                            |

| NO | KEGIATAN                                                                                                           | PELAKSANA                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | MUTU BAKU                                                          |          |                                                                                                        | KETERANGAN             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                    | KEPALA BALAI                                                                        | KASUBAG ADUM                                                                        | TIM PENYUSUN LKJ                                                                    | PERENCANA                                                                           | KELENGKAPAN                                                        | WAKTU    | OUTPUT                                                                                                 |                        |
| 1  | Memerintahkan penyusunan pengukuran kinerja                                                                        |  |  |  |                                                                                     | SK Tim Penyusun LKJ, Surat dan Format                              | 1 hari   | Disposisi                                                                                              |                        |
| 2  | Mengolah data dan menganalisa data kinerja dari pengumpulan data kinerja ke dalam kertas kerja perhitungan kinerja |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     | Disposisi dan data kinerja                                         | 1 hari   | Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja                                                                |                        |
| 3  | Memeriksa dan melakukan koreksi hasil perhitungan kinerja                                                          |                                                                                     |                                                                                     |  |  | Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja                            | 3 hari   | Hasil Koreksi Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja                                                  |                        |
| 4  | Melakukan pengesahan atas kertas kerja perhitungan kinerja yang telah valid                                        |  |  |                                                                                     |                                                                                     | Hasil Koreksi Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja              | 1 hari   | Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang sudah disahkan                                                   |                        |
| 5  | Menyusun hasil perhitungan kinerja ke dalam format laporan kinerja                                                 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     | Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang sudah Format laporan kinerja | 1 hari   | Format laporan kinerja                                                                                 |                        |
| 6  | Memeriksa dan melakukan koreksi atas draft laporan kinerja                                                         |                                                                                     |                                                                                     |  |  | Format laporan kinerja                                             | 2 hari   | Draft Laporan Kinerja                                                                                  |                        |
| 7  | Mengesahkan draft laporan kinerja yang telah valid                                                                 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     | Draft Laporan Kinerja                                              | 30 menit | Draft Laporan Kinerja yang sudah disahkan                                                              |                        |
| 8  | Penandatanganan Laporan kinerja oleh Kepala Balai                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Draft Laporan Kinerja yang sudah disahkan                          | 30 menit | Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai                                                    |                        |
| 9  | Penggandaan laporan kinerja dan pengiriman ke Eselon 1 via email atau Jasa Kirim                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  | Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai                | 30 menit | Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai terkirim ke Eselon 1 dan diarsipkan oleh Arsiparis | SOP Pengukuran Kinerja |

**Kertas Kerja Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan  
BBKK Makassar Semester I Tahun 2026**

**Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar**  
**Tahun 2026**

Sasaran: Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah  
Indikator IKM 24.2.1 : Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah

[illegible]

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                      | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----|
|                                                                                                              | Jan                            | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |    |
| 14 Pos Pelabuhan Paotere                                                                                     | OK                             | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| 15 Pos Pelabuhan Perikanan Untia                                                                             | OK                             | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| 16 Pos Pelabuhan Siwa                                                                                        | OK                             | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| <b>A Pengawasan Kedatangan Alat Angkut (Deklarasi Kesehatan, Sertifikat Persetujuan Karantina Kesehatan)</b> |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| <b>1 Jumlah COP &amp; Gendec</b>                                                                             |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a Bandara Hasanuddin                                                                                         | 87                             | 84  | 82  | 75  | 52  | 80  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                  | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                     | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                             | 2                              | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                            | 0                              | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                               | 5                              | 5   | 3   | 6   | 2   | 6   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                          | 0                              | 3   | 2   | 1   | 0   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                  | 6                              | 5   | 1   | 6   | 5   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                                                                    | 0                              | 1   | 2   | 2   | 3   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                                                                    | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                                                                  | 1                              | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                                                                                | 4                              | 3   | 3   | 5   | 2   | 5   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m Pos Pelabuhan Majene                                                                                       | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                                                                      | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                                                                              | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                                                                         | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| <b>B Pengawasan Keberangkatan Alat Angkut (Sertifikat Persetujuan)</b>                                       |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| <b>2 Jumlah PHQC &amp; Gendec</b>                                                                            |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a Bandara Hasanuddin                                                                                         | 88                             | 80  | 79  | 69  | 59  | 70  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                  | 16                             | 19  | 23  | 19  | 11  | 15  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                     | 150                            | 130 | 145 | 167 | 88  | 142 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                             | 67                             | 63  | 39  | 60  | 55  | 71  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                            | 94                             | 88  | 126 | 122 | 122 | 139 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                               | 191                            | 158 | 177 | 183 | 171 | 165 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                          | 77                             | 71  | 91  | 94  | 88  | 87  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                  | 404                            | 375 | 387 | 396 | 449 | 411 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                                                                    | 89                             | 85  | 114 | 91  | 71  | 68  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                                                                    | 22                             | 19  | 23  | 25  | 23  | 27  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                                                                  | 134                            | 103 | 119 | 133 | 116 | 121 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                                                                                | 101                            | 79  | 51  | 62  | 99  | 95  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m Pos Pelabuhan Majene                                                                                       | 13                             | 7   | 10  | 12  | 2   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                                                                      | 45                             | 53  | 53  | 69  | 55  | 69  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                                                                              | 12                             | 4   | 10  | 19  | 8   | 11  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                                                                         | 111                            | 113 | 134 | 121 | 127 | 99  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| <b>C Pengawasan Sanitasi Alat Angkut (Sertifikat Sanitasi)</b>                                               |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| <b>3 Jumlah Sanitasi Alat Angkut</b>                                                                         |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a Bandara Hasanuddin                                                                                         | 137                            | 116 | 115 | 139 | 108 | 121 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                  | 22                             | 23  | 29  | 44  | 32  | 60  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                     | 150                            | 130 | 145 | 154 | 88  | 141 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                             | 67                             | 65  | 45  | 53  | 59  | 75  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                            | 94                             | 43  | 38  | 122 | 119 | 139 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                               | 191                            | 158 | 177 | 183 | 171 | 165 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                          | 77                             | 70  | 90  | 94  | 88  | 87  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                  | 404                            | 377 | 387 | 396 | 411 | 411 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                                                                    | 0                              | 10  | 10  | 0   | 10  | 10  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                |                                                           | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----|
|                                                        |                                                           | Jan                            | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |    |
| j                                                      | Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 22                             | 19  | 23  | 25  | 23  | 27  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k                                                      | Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 134                            | 103 | 119 | 133 | 116 | 121 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l                                                      | Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 98                             | 71  | 50  | 64  | 101 | 100 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m                                                      | Pos Pelabuhan Majene                                      | 13                             | 7   | 10  | 12  | 2   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n                                                      | Pos Pelabuhan Paotere                                     | 45                             | 53  | 53  | 69  | 55  | 69  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o                                                      | Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 14                             | 5   | 10  | 19  | 8   | 11  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p                                                      | Pos Pelabuhan Siwa                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| <b>4 Jumlah Dokumen SSCEC</b>                          |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a                                                      | Bandara Hasanuddin                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b                                                      | Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 0                              | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c                                                      | Wilker Pelabuhan Bajoe                                    | 9                              | 8   | 7   | 13  | 14  | 10  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d                                                      | Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 0                              | 2   | 6   | 6   | 3   | 7   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e                                                      | Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 7                              | 7   | 3   | 5   | 9   | 6   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f                                                      | Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 8                              | 14  | 8   | 12  | 21  | 11  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g                                                      | Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 5                              | 1   | 8   | 6   | 7   | 5   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h                                                      | Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 12                             | 20  | 14  | 14  | 18  | 21  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i                                                      | Wilker Pelabuhan Malili                                   | 14                             | 11  | 5   | 8   | 11  | 5   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| j                                                      | Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 1                              | 1   | 2   | 8   | 3   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k                                                      | Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 10                             | 1   | 4   | 2   | 3   | 5   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l                                                      | Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 6                              | 12  | 3   | 4   | 7   | 9   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m                                                      | Pos Pelabuhan Majene                                      | 3                              | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n                                                      | Pos Pelabuhan Paotere                                     | 2                              | 6   | 5   | 11  | 14  | 10  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o                                                      | Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 4                              | 1   | 1   | 6   | 3   | 6   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p                                                      | Pos Pelabuhan Siwa                                        | 0                              | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| <b>5 Jumlah Dokumen SSCC</b>                           |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a                                                      | Bandara Hasanuddin                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b                                                      | Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c                                                      | Wilker Pelabuhan Bajoe                                    | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d                                                      | Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e                                                      | Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f                                                      | Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g                                                      | Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 1                              | 4   | 1   | 1   | 3   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h                                                      | Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 4                              | 1   | 1   | 1   | 6   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i                                                      | Wilker Pelabuhan Malili                                   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| j                                                      | Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k                                                      | Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l                                                      | Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m                                                      | Pos Pelabuhan Majene                                      | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n                                                      | Pos Pelabuhan Paotere                                     | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o                                                      | Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p                                                      | Pos Pelabuhan Siwa                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| <b>D Pengawasan Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan</b> |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| <b>6 Jumlah Sertifikat P3K Alat Angkut</b>             |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a                                                      | Bandara Hasanuddin                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b                                                      | Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 16                             | 19  | 31  | 44  | 32  | 60  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c                                                      | Wilker Pelabuhan Bajoe                                    | 9                              | 8   | 7   | 13  | 14  | 10  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d                                                      | Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 1                              | 2   | 5   | 5   | 3   | 6   | 6    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e                                                      | Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 4                              | 5   | 2   | 4   | 8   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f                                                      | Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 8                              | 13  | 8   | 12  | 20  | 11  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g                                                      | Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 58                             | 54  | 62  | 67  | 64  | 56  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h                                                      | Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 16                             | 18  | 15  | 15  | 22  | 24  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i                                                      | Wilker Pelabuhan Malili                                   | 8                              | 9   | 4   | 6   | 8   | 3   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |



| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                          |                                                           | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----|
|                                                                                  |                                                           | Jan                            | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |    |
| j                                                                                | Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 1                              | 1   | 1   | 8   | 3   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k                                                                                | Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 134                            | 103 | 119 | 133 | 116 | 121 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l                                                                                | Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 65                             | 47  | 37  | 47  | 64  | 61  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m                                                                                | Pos Pelabuhan Majene                                      | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n                                                                                | Pos Pelabuhan Paotere                                     | 2                              | 6   | 5   | 11  | 14  | 10  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o                                                                                | Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 4                              | 1   | 1   | 6   | 3   | 6   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p                                                                                | Pos Pelabuhan Siwa                                        | 4                              | 4   | 0   | 2   | 3   | 3   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| E Pengawasan Riwayat Faktor Risiko Perjalanan Alat Angkut (Buku Kesehatan Kapal) |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| 7 Jumlah Buku Kesehatan Kapal                                                    |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a                                                                                | Bandara Hasanuddin                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b                                                                                | Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 0                              | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c                                                                                | Wilker Pelabuhan Bajoe                                    | 2                              | 2   | 6   | 5   | 3   | 3   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d                                                                                | Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 1                              | 1   | 0   | 1   | 0   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e                                                                                | Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 3                              | 4   | 7   | 6   | 15  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f                                                                                | Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 5                              | 2   | 3   | 8   | 7   | 5   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g                                                                                | Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 1                              | 1   | 2   | 2   | 6   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h                                                                                | Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 7                              | 10  | 11  | 11  | 5   | 3   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i                                                                                | Wilker Pelabuhan Malili                                   | 0                              | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| j                                                                                | Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 2                              | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k                                                                                | Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 1                              | 0   | 2   | 1   | 0   | 3   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l                                                                                | Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 1                              | 1   | 1   | 1   | 7   | 6   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m                                                                                | Pos Pelabuhan Majene                                      | 4                              | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n                                                                                | Pos Pelabuhan Paotere                                     | 0                              | 1   | 3   | 4   | 4   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o                                                                                | Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 4                              | 1   | 1   | 2   | 1   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p                                                                                | Pos Pelabuhan Siwa                                        | 3                              | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| F Pengawasan Kualitas Air pada Alat Angkut                                       |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| 8 Pengawasan Kualitas Air pada Alat Angkut                                       |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a                                                                                | Bandara Hasanuddin                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b                                                                                | Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c                                                                                | Wilker Pelabuhan Bajoe                                    | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d                                                                                | Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e                                                                                | Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f                                                                                | Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g                                                                                | Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h                                                                                | Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 2                              | 1   | 1   | 3   | 0   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i                                                                                | Wilker Pelabuhan Malili                                   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| j                                                                                | Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k                                                                                | Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l                                                                                | Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m                                                                                | Pos Pelabuhan Majene                                      | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n                                                                                | Pos Pelabuhan Paotere                                     | 0                              | 0   | 5   | 11  | 14  | 10  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o                                                                                | Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p                                                                                | Pos Pelabuhan Siwa                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 9 Jumlah Kegiatan Pengawasan Disinseksi Alat Angkut                              |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a                                                                                | Bandara Hasanuddin                                        | 35                             | 34  | 24  | 31  | 30  | 45  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b                                                                                | Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c                                                                                | Wilker Pelabuhan Bajoe                                    | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d                                                                                | Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e                                                                                | Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f                                                                                | Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g                                                                                | Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 0                              | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |

[illegible]



| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                    | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       | Jumlah Realisasi | PJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                            | Jan                            | Feb     | Mar     | Apr     | Mei     | Jun     | Juli  | Agt   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   |                  |    |
| Jumlah pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan orang/pelaku perjalanan dibagi seluruh jumlah pintu masuk maupun Pelabuhan/ bandara domestik dikali 100%            |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| Pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan minimal 2 dari pengawasan orang/pelaku perjalanan berikut:                                                                         | 100.00%                        | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |                  |    |
| 1 Bandara Hasanuddin                                                                                                                                                                                       | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 2 Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                                                                                                                | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 3 Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                                                                                                                   | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 4 Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                                                                                                                           | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 5 Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                                                                                                                          | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 6 Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                                                                                                                             | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 7 Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                                                                                                                        | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 8 Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                                                                                                                | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 9 Wilker Pelabuhan Malili                                                                                                                                                                                  | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 10 Wilker Pelabuhan Palopo                                                                                                                                                                                 | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 11 Wilker Pelabuhan Parepare                                                                                                                                                                               | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 12 Wilker Pelabuhan Pasangkayu                                                                                                                                                                             | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 13 Pos Pelabuhan Majene                                                                                                                                                                                    | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 14 Pos Pelabuhan Paotere                                                                                                                                                                                   | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 15 Pos Pelabuhan Perikanan Untia                                                                                                                                                                           | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 16 Pos Pelabuhan Siwa                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| <b>A Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Pelaku Perjalanan (Status Vaksinasi Pelaku Perjalanan, Sertifikat Izin Angkut Orang Sakit, Sertifikat Laik Terbang dan Laik Layar, Skrining Pelaku Perjalanan)</b> |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| <b>1 Jumlah Pelayanan Vaksinasi Internasional</b>                                                                                                                                                          |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| a Bandara Hasanuddin                                                                                                                                                                                       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                                                                                                                | 108                            | 60      | 5       | 7       | 35      | 58      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                                                                                                                   | 33                             | 0       | 5       | 0       | 0       | 17      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                                                                                                                           | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                                                                                                                          | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                                                                                                                             | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                                                                                                                        | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                                                                                                                | 31                             | 20      | 23      | 3       | 2       | 3       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                                                                                                                                                                  | 199                            | 150     | 56      | 95      | 133     | 308     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                                                                                                                                                                | 45                             | 18      | 16      | 18      | 9       | 7       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                                                                                                                                                                              | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| m Pos Pelabuhan Majene                                                                                                                                                                                     | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                                                                                                                                                                            | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                                                                                                                                                                       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |    |
| <b>2 Jumlah SSHP Merah, Oren, Kuning</b>                                                                                                                                                                   |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| a Bandara Hasanuddin                                                                                                                                                                                       | 17959                          | 17291   | 15837   | 11867   | 7009    | 24106   |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| Hijau (Tidak Beresiko)                                                                                                                                                                                     | 17875                          | 17214   | 15739   | 11772   | 6219    | 22779   |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| Kuning (Daerah Terjangkit)                                                                                                                                                                                 | 42                             | 45      | 37      | 78      | 781     | 334     |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| Merah (Bergejala)                                                                                                                                                                                          | 42                             | 32      | 61      | 17      | 9       | 993     |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                                                                                                                |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                                                                                                                   |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                                                                                                                           |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                                                                                                                          |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                                                                                                                             |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                                                                                                                        | 25                             | 23      | 3       | 0       | 1       | 26      |       |       |       |       |       |       |                  |    |





| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                |                                                           | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----|
|                                                                                        |                                                           | Jan                            | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |    |
| e                                                                                      | Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f                                                                                      | Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g                                                                                      | Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h                                                                                      | Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i                                                                                      | Wilker Pelabuhan Malili                                   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| j                                                                                      | Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k                                                                                      | Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l                                                                                      | Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m                                                                                      | Pos Pelabuhan Majene                                      | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n                                                                                      | Pos Pelabuhan Paotere                                     | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o                                                                                      | Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p                                                                                      | Pos Pelabuhan Siwa                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| <b>9 Jumlah Pelaksanaan Surveilans Penyakit Berpotensi KLB/Wabah (Migrasi Malaria)</b> |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a                                                                                      | Bandara Hasanuddin                                        | 9                              | 84  | 55  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b                                                                                      | Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 20                             | 50  | 34  | 71  | 35  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c                                                                                      | Wilker Pelabuhan Bajoe                                    |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| d                                                                                      | Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 0                              | 25  | 0   | 23  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e                                                                                      | Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| f                                                                                      | Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 0                              | 13  | 41  | 20  | 12  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g                                                                                      | Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 0                              | 35  | 0   | 16  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h                                                                                      | Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 0                              | 20  | 0   | 15  | 23  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i                                                                                      | Wilker Pelabuhan Malili                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| j                                                                                      | Wilker Pelabuhan Palopo                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| k                                                                                      | Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 25                             | 39  | 0   | 25  | 40  | 27  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l                                                                                      | Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| m                                                                                      | Pos Pelabuhan Majene                                      |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| n                                                                                      | Pos Pelabuhan Paotere                                     | 0                              | 42  | 0   | 20  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o                                                                                      | Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| p                                                                                      | Pos Pelabuhan Siwa                                        | 0                              | 14  | 0   | 16  | 0   | 0   |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| <b>10 Jumlah Pelaksanaan Surveilans Penyakit Berpotensi KLB/Wabah (PIE)</b>            |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a                                                                                      | Bandara Hasanuddin                                        |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| b                                                                                      | Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| c                                                                                      | Wilker Pelabuhan Bajoe                                    |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| d                                                                                      | Wilker Pelabuhan Belang Belang                            |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| e                                                                                      | Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| f                                                                                      | Wilker Pelabuhan Biringkassi                              |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| g                                                                                      | Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| h                                                                                      | Wilker Pelabuhan Makassar                                 |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| i                                                                                      | Wilker Pelabuhan Malili                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| j                                                                                      | Wilker Pelabuhan Palopo                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| k                                                                                      | Wilker Pelabuhan Parepare                                 |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| l                                                                                      | Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| m                                                                                      | Pos Pelabuhan Majene                                      |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| n                                                                                      | Pos Pelabuhan Paotere                                     |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| o                                                                                      | Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| p                                                                                      | Pos Pelabuhan Siwa                                        |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| <b>11 Jumlah Pelaksanaan surveilans penyakit berpotensi KLB/wabah (TB)</b>             |                                                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a                                                                                      | Bandara Hasanuddin                                        | 0                              | 0   | 94  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b                                                                                      | Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 133 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |



| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                             |  | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       | Jumlah Realisasi | PJ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                     |  | Jan                            | Feb     | Mar     | Apr     | Mei     | Jun     | Juli  | Agt   | Sep   | Okt   | Nov   |                  |             |
| 14 Jumlah Pengawasan Pelaku Perjalanan pada Situasi Khusus dan/atau Kedaruratan Medis                                                                                                               |  |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |                  |             |
| a Bandara Hasanuddin                                                                                                                                                                                |  | 392,704                        | 320,442 | 449742  | 393765  | 342529  | 386080  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                                                                                                         |  | 3115                           | 2614    | 5639    | 3963    | 2876    | 3873    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                                                                                                            |  | 13352                          | 10914   | 16891   | 12276   | 5499    | 16226   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                                                                                                                    |  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                                                                                                                   |  | 8238                           | 6595    | 14171   | 7853    | 9019    | 12573   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                                                                                                                      |  | 816                            | 715     | 612     | 800     | 725     | 872     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                                                                                                                 |  | 446                            | 380     | 2497    | 1064    | 1232    | 1848    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                                                                                                         |  | 39797                          | 34541   | 55931   | 51133   | 40565   | 53324   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                                                                                                                                                           |  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                                                                                                                                                           |  | 100                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                                                                                                                                                         |  | 43405                          | 31104   | 65237   | 48497   | 38763   | 55464   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                                                                                                                                                                       |  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| m Pos Pelabuhan Majene                                                                                                                                                                              |  | 644                            | 471     | 1240    | 863     | 0       | 257     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                                                                                                                                                             |  | 184                            | 88      | 165     | 447     | 456     | 460     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                                                                                                                                                                     |  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                                                                                                                                                                |  | 8959                           | 7501    | 14011   | 9048    | 14839   | 11372   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| E Pengawasan dan/atau Pelaksanaan Tindakan Penanggulangan pada Orang                                                                                                                                |  |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |                  |             |
| 15 Jumlah Pengawasan dan/atau Pelaksanaan Tindakan Penanggulangan pada Orang                                                                                                                        |  |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |                  |             |
| a Bandara Hasanuddin                                                                                                                                                                                |  | 17553                          | 13818   | 17805   | 16198   | 14062   | 15662   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                                                                                                         |  | 384                            | 3044    | 6148    | 4433    | 3215    | 4300    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                                                                                                            |  | 1624                           | 12650   | 18846   | 14240   | 6428    | 18106   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                                                                                                                    |  | 460                            | 443     | 308     | 330     | 411     | 432     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                                                                                                                   |  | 1647                           | 8189    | 16747   | 10109   | 11364   | 15041   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                                                                                                                      |  | 2237                           | 2741    | 2947    | 3094    | 2770    | 3059    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                                                                                                                 |  | 901                            | 1046    | 3469    | 1969    | 1921    | 2650    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                                                                                                         |  | 12120                          | 46189   | 68481   | 63010   | 52739   | 54497   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                                                                                                                                                           |  | 522                            | 551     | 723     | 605     | 473     | 379     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                                                                                                                                                           |  | 370                            | 283     | 409     | 382     | 376     | 422     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                                                                                                                                                         |  | 5036                           | 35692   | 70224   | 53733   | 42572   | 60121   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                                                                                                                                                                       |  | 675                            | 548     | 388     | 425     | 657     | 487     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| m Pos Pelabuhan Majene                                                                                                                                                                              |  | 192                            | 605     | 1446    | 1053    | 12      | 319     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                                                                                                                                                             |  | 184                            | 308     | 165     | 826     | 799     | 909     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                                                                                                                                                                     |  | 140                            | 50      | 100     | 190     | 80      | 110     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                                                                                                                                                                |  | 1659                           | 9228    | 16088   | 10786   | 16702   | 12847   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |             |
| III Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan barang                                                                               |  | 100.00%                        | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%            | Tim Kerja 2 |
| Definisi Operasional:<br>Pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan minimal 1 dari pengawasan barang berikut:                                                          |  |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |                  |             |
| Cara Perhitungan:<br>Jumlah pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan barang dibagi seluruh jumlah pintu masuk maupun Pelabuhan/ bandara domestik dikali 100% |  |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |                  |             |
| Pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan minimal 1 dari pengawasan barang berikut:                                                                                   |  | 100.00%                        | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%            |             |

[illegible]





| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       | Jumlah Realisasi | PJ          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jan                            | Feb     | Mar     | Apr     | Mei     | Jun     | Juli  | Agt   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   |                  |             |
| j Wilker Pelabuhan Palopo<br>k Wilker Pelabuhan Parepare<br>l Wilker Pelabuhan Pasangkayu<br>m Pos Pelabuhan Majene<br>n Pos Pelabuhan Paotere<br>o Pos Pelabuhan Perikanan Untia<br>p Pos Pelabuhan Siwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |             |
| IV Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan faktor risiko lingkungan<br><br>Definisi Operasional:<br>Pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan minimal 1 dari pengawasan lingkungan berikut:<br><br>Cara Perhitungan:<br>Jumlah pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik yang melakukan pengawasan lingkungan dibagi seluruh jumlah pintu masuk maupun Pelabuhan/ bandara domestik dikali 100%<br><br>Pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan minimal 1 dari pengawasan lingkungan berikut: | 93.75%                         | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |                  | Tim Kerja 3 |
| 1 Bandara Hasanuddin<br>2 Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju<br>3 Wilker Pelabuhan Bajoe<br>4 Wilker Pelabuhan Belang Belang<br>5 Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba<br>6 Wilker Pelabuhan Biringkassi<br>7 Wilker Pelabuhan Garongkong Barru<br>8 Wilker Pelabuhan Makassar<br>9 Wilker Pelabuhan Malili<br>10 Wilker Pelabuhan Palopo<br>11 Wilker Pelabuhan Parepare<br>12 Wilker Pelabuhan Pasangkayu<br>13 Pos Pelabuhan Majene<br>14 Pos Pelabuhan Paotere<br>15 Pos Pelabuhan Perikanan Untia<br>16 Pos Pelabuhan Siwa                                                                                    | 93.75%                         | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK                             | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      |       |       |       |       |       |       |                  |             |
| A Inspeksi Kesehatan Lingkungan (Media Air, Udara, Pangan, Sarana dan Bangunan, dan Vektor Binatang dan Pembawa Penyakit) Sesuai SBMKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |             |
| 1 Form Inspeksi Hygiene & Sanitasi TTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |             |
| a Bandara Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                              | 1       | 2       | 9       | 53      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                              | 1       | 1       | 2       | 1       | 1       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                              | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                              | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                              | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                              | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |
| m Pos Pelabuhan Majene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                  |             |

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                     | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----|
|                                                             | Jan                            | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |    |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                     | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| <b>2 Form Inspeksi Hygiene &amp; Sanitasi TPP</b>           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a Bandara Hasanuddin                                        | 12                             | 2   | 10  | 15  | 33  | 7   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 0                              | 3   | 3   | 2   | 4   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                    | 4                              | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 7                              | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 2                              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 5                              | 5   | 26  | 4   | 3   | 3   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 4                              | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 15                             | 15  | 15  | 16  | 16  | 16  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m Pos Pelabuhan Majene                                      | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                     | 4                              | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| <b>3 Form Inspeksi Sarana PAB</b>                           |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a Bandara Hasanuddin                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                    | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 2                              | 1   | 1   | 3   | 0   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| m Pos Pelabuhan Majene                                      | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                     | 0                              | 0   | 5   | 11  | 14  | 10  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                        | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| <b>4 Rekapitulasi Hasil Survei Vektor</b>                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| a Survei Aedes Aegypti (Jumlah Kontainer)                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| 1) Bandara Hasanuddin                                       | 294                            | 263 | 272 | 161 | 265 | 251 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 2) Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan       | 123                            | 176 | 118 | 147 | 126 | 184 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 3) Wilker Pelabuhan Bajoe                                   | 622                            | 593 | 608 | 704 | 652 | 718 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 4) Wilker Pelabuhan Belang Belang                           | 10                             | 10  | 10  | 8   | 133 | 152 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 5) Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                          | 152                            | 24  | 0   | 169 | 121 | 250 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 6) Wilker Pelabuhan Biringkassi                             | 404                            | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 7) Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                        | 28                             | 43  | 43  | 41  | 42  | 42  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 8) Wilker Pelabuhan Makassar                                | 168                            | 168 | 183 | 181 | 197 | 196 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 9) Wilker Pelabuhan Malili                                  | 0                              | 20  | 0   | 20  | 20  | 20  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 10) Wilker Pelabuhan Palopo                                 | 71                             | 57  | 70  | 64  | 98  | 85  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 11) Wilker Pelabuhan Parepare                               | 187                            | 179 | 184 | 178 | 175 | 164 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 12) Wilker Pelabuhan Pasangkayu                             | 58                             | 58  | 51  | 49  | 43  | 45  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 13) Pos Pelabuhan Majene                                    | 19                             | 12  | 11  | 20  | 14  | 20  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan               | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----|
|                                                       | Jan                            | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |    |
| 14) Pos Pelabuhan Paotere                             | 180                            | 190 | 155 | 135 | 171 | 161 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 15) Pos Pelabuhan Perikanan Untia                     | 34                             | 68  | 33  | 55  | 50  | 32  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 16) Pos Pelabuhan Siwa                                | 96                             | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| b Survei Anopheles (Jumlah Habitat)                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| 1) Bandara Hasanuddin                                 | 24                             | 22  | 12  | 16  | 10  | 13  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 2) Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan | 11                             | 11  | 11  | 11  | 4   | 5   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 3) Wilker Pelabuhan Bajoe                             | 21                             | 21  | 50  | 50  | 50  | 50  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 4) Wilker Pelabuhan Belang Belang                     | 6                              | 6   | 6   | 6   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 5) Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                    | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 6) Wilker Pelabuhan Biringkassi                       | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 7) Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                  | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 8) Wilker Pelabuhan Makassar                          | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 9) Wilker Pelabuhan Malili                            | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 10) Wilker Pelabuhan Palopo                           | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 11) Wilker Pelabuhan Parepare                         | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 12) Wilker Pelabuhan Pasangkayu                       | 7                              | 6   | 6   | 7   | 7   | 6   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 13) Pos Pelabuhan Majene                              | 3                              | 4   | 4   | 3   | 4   | 3   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 14) Pos Pelabuhan Paotere                             | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 15) Pos Pelabuhan Perikanan Untia                     | 0                              | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 16) Pos Pelabuhan Siwa                                | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| c Survei Tikus (Jumlah Perangkap)                     |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| 1) Bandara Hasanuddin                                 | 440                            | 0   | 0   | 440 | 400 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 2) Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan | 240                            | 0   | 232 | 176 | 212 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 3) Wilker Pelabuhan Bajoe                             | 400                            | 0   | 400 | 300 | 0   | 300 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 4) Wilker Pelabuhan Belang Belang                     | 0                              | 400 | 0   | 0   | 204 | 200 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 5) Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                    | 400                            | 0   | 400 | 0   | 0   | 400 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 6) Wilker Pelabuhan Biringkassi                       | 200                            | 0   | 200 | 0   | 200 | 200 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 7) Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                  | 0                              | 400 | 0   | 400 | 400 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 8) Wilker Pelabuhan Makassar                          | 400                            | 400 | 400 | 0   | 400 | 400 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 9) Wilker Pelabuhan Malili                            | 0                              | 400 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 10) Wilker Pelabuhan Palopo                           | 400                            | 0   | 400 | 400 | 0   | 400 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 11) Wilker Pelabuhan Parepare                         | 400                            | 0   | 400 | 400 | 400 | 400 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 12) Wilker Pelabuhan Pasangkayu                       | 0                              | 400 | 0   | 400 | 0   | 400 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 13) Pos Pelabuhan Majene                              | 400                            | 0   | 400 | 400 | 0   | 400 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 14) Pos Pelabuhan Paotere                             | 400                            | 400 | 0   | 400 | 0   | 400 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 15) Pos Pelabuhan Perikanan Untia                     | 400                            | 0   | 0   | 400 | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 16) Pos Pelabuhan Siwa                                | 0                              | 400 | 0   | 400 | 400 | 400 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| d Survei Lalat (Jumlah Bangunan Disurvei)             |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |
| 1) Bandara Hasanuddin                                 | 6                              | 6   | 3   | 3   | 3   | 5   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 2) Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan | 2                              | 3   | 2   | 1   | 5   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 3) Wilker Pelabuhan Bajoe                             | 10                             | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 4) Wilker Pelabuhan Belang Belang                     | 6                              | 6   | 6   | 6   | 4   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 5) Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                    | 2                              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 6) Wilker Pelabuhan Biringkassi                       | 2                              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 7) Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                  | 4                              | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 8) Wilker Pelabuhan Makassar                          | 5                              | 5   | 5   | 5   | 5   | 8   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 9) Wilker Pelabuhan Malili                            | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 10) Wilker Pelabuhan Palopo                           | 2                              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 11) Wilker Pelabuhan Parepare                         | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 12) Wilker Pelabuhan Pasangkayu                       | 5                              | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 13) Pos Pelabuhan Majene                              | 3                              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |
| 14) Pos Pelabuhan Paotere                             | 6                              | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |







[illegible]

[illegible]



| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                          |                                   | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----|--|--|
|                                                                                                                  |                                   | Jan                            | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |    |  |  |
| 4                                                                                                                | Wilker Pelabuhan Belang Belang    | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 5                                                                                                                | Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 6                                                                                                                | Wilker Pelabuhan Biringkassi      | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 7                                                                                                                | Wilker Pelabuhan Garongkong Barru | 25                             | 23  | 3   | 0   | 1   | 26  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 8                                                                                                                | Wilker Pelabuhan Makassar         | 167                            | 193 | 60  | 108 | 143 | 80  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 9                                                                                                                | Wilker Pelabuhan Malili           | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 10                                                                                                               | Wilker Pelabuhan Palopo           | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 11                                                                                                               | Wilker Pelabuhan Parepare         | 39                             | 3   | 11  | 5   | 147 | 39  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 12                                                                                                               | Wilker Pelabuhan Pasangkayu       | 127                            | 114 | 111 | 117 | 115 | 148 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 13                                                                                                               | Pos Pelabuhan Majene              | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 14                                                                                                               | Pos Pelabuhan Paotere             | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 15                                                                                                               | Pos Pelabuhan Perikanan Untia     | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| 16                                                                                                               | Pos Pelabuhan Siwa                | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                  |    |  |  |
| C Jumlah Buletin Epidemiologi Mingguan yang Dipublish di Website BBKK Makassar https://bbkkmakassar.kemkes.go.id |                                   | 4                              | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 1    |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| D Laporan Bulanan Simkespel                                                                                      |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| 1 Laporan Bulanan Pelabuhan                                                                                      |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| a Bandara Hasanuddin                                                                                             |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                      |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                         |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                                 |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                                |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                                   |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                              |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                      |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                                                                        |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                                                                        |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                                                                      |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                                                                                    |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| m Pos Pelabuhan Majene                                                                                           |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                                                                          |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                                                                                  |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                                                                             |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
|                                                                                                                  |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| 2 Laporan Bulanan Bandara                                                                                        |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| a Bandara Hasanuddin                                                                                             |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju                                                      |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                                                                         |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                                 |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                                |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                                   |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                              |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                      |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                                                                        |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                                                                        |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                                                                      |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                                                                                    |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| m Pos Pelabuhan Majene                                                                                           |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                                                                          |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                                                                                  |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                                                                             |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |
| 3 Laporan Bulanan Pelayanan Kesehatan                                                                            |                                   |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |    |  |  |

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                     | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       | Jumlah Realisasi | PJ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|----|
|                                                             | Jan                            | Feb     | Mar     | Apr     | Mei     | Jun     | Juli  | Agt   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   |                  |    |
| a Bandara Hasanuddin                                        | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                    | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                   | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| m Pos Pelabuhan Majene                                      | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                     | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                        | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| 4 Laporan Bulanan PRL                                       |                                |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| a Bandara Hasanuddin                                        | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| b Wilker Bandar Udara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| c Wilker Pelabuhan Bajoe                                    | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| d Wilker Pelabuhan Belang Belang                            | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| e Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                           | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| f Wilker Pelabuhan Biringkassi                              | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| g Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                         | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| h Wilker Pelabuhan Makassar                                 | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| i Wilker Pelabuhan Malili                                   | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| j Wilker Pelabuhan Palopo                                   | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| k Wilker Pelabuhan Parepare                                 | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| l Wilker Pelabuhan Pasangkayu                               | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| m Pos Pelabuhan Majene                                      | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| n Pos Pelabuhan Paotere                                     | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| o Pos Pelabuhan Perikanan Untia                             | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| p Pos Pelabuhan Siwa                                        | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |       |       |       |       |       |       |                  |    |
| Persentase                                                  | 98.75%                         | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0                |    |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,

Kepala BBKK Makassar



dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM

NIP 196902192002121003

**Kertas Kerja Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar**  
**Triwulan II Tahun 2026**

**Sasaran: Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah**  
**Indikator IKM 24.2.1 : Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah**

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2026 | April  |           |         | Mei    |           |         | Juni   |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah<br><br>*setiap pintu masuk internasional/ domestik memenuhi kriteria apabila melaksanakan pengawasan/pemeriksaan untuk ke 4 nya/ seluruhnya<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>Jumlah Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dibagi dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik dikali 100%<br><br>*jumlah total pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik : 336<br><br>Terdapat 5 parameter perhitungan yakni: |             |        |           |         |        |           |         |        |           |         |
| 1 Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan alat angkut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90.00%      | 90.00% | 100.00%   | 111.11% | 90.00% | 100.00%   | 111.11% | 90.00% | 100.00%   | 111.11% |
| 2 Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan orang/pelaku perjalanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90.00%      | 90.00% | 100.00%   | 111.11% | 90.00% | 100.00%   | 111.11% | 90.00% | 100.00%   | 111.11% |
| 3 Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90.00%      | 90.00% | 100.00%   | 111.11% | 90.00% | 100.00%   | 111.11% | 90.00% | 100.00%   | 111.11% |

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                     | Target 2026   | April         |                |                | Mei           |                |                | Juni          |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                             |               | Target        | Realisasi      | Capaian        | Target        | Realisasi      | Capaian        | Target        | Realisasi      | Capaian        |
| 4 Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan faktor risiko lingkungan          | 90.00%        | 90.00%        | 100.00%        | 111.11%        | 90.00%        | 100.00%        | 111.11%        | 90.00%        | 100.00%        | 111.11%        |
| 5 Persentase Pencatatan dan Pelaporan Surveilans Alat Angkut, Orang, Barang, dan Lingkungan Melalui Sistem Informasi Kekarantinaa Kesehatan | 90.00%        | 90.00%        | 100.00%        | 111.11%        | 90.00%        | 100.00%        | 111.11%        | 90.00%        | 100.00%        | 111.11%        |
| <b>Persentase</b>                                                                                                                           | <b>76.00%</b> | <b>76.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>131.58%</b> | <b>76.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>131.58%</b> | <b>76.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>131.58%</b> |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,

Kepala BBKK Makassar



Dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM

NIP 196902192002121003

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan Makassar  
Tahun 2026

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Indikator IKM 33.1 : Nilai SAKIP

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Faktor Risiko Per Bulan Tahun 2026 |       |       |       |       |       |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jan                                       | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |            |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan oleh Tim SKI untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi, dan kualitas Unit Kerja dalam menerapkan SAKIP<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>Indeks Penilaian (Scoring Index) berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam instrumen evaluasi SAKIP. |                                           |       |       |       |       |       |      |     |     |     |     |     |                  |            |
| Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81.20                                     | 81.20 | 81.20 | 84.60 | 84.60 | 84.60 |      |     |     |     |     |     | 84.60            | Subag Adum |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,

Kepala BBKK Makassar



dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM  
NIP 196902192002121003

**Kertas Kerja Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar**  
**Triwulan II Tahun 2026**

**Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**  
**Indikator IKD 33.1 : Persentase Realisasi Anggaran**

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                  | Target 2026   | April         |               |               | Mei           |               |               | Juni          |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Target        | Realisasi     | Capaian       | Target        | Realisasi     | Capaian       | Target        | Realisasi     | Capaian        |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Membandingkan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>Realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Persentase</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>96.00%</b> | <b>32.00%</b> | <b>29.02%</b> | <b>90.69%</b> | <b>40.00%</b> | <b>37.17%</b> | <b>92.93%</b> | <b>48.00%</b> | <b>48.48%</b> | <b>101.00%</b> |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,  
Kepala BBKK Makassar



*[Signature]*  
Dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM  
NIP 196902192002121003

18 April 2026

Nomor : PS.03.01/C.IX.3.31/5018/2026  
Lampiran : Lembar Kerja Evaluasi (LKE) terlampir  
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintahan pada Satuan Kerja BBKK  
Makassar Tahun 2025

Yth. Kepala BBKK Makassar  
di

Tempat

Sehubungan telah dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Kerja BBKK Makassar Tahun 2025 oleh Tim SKI, berikut terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja BBKK Makassar Tahun 2025. Selanjutnya mohon dapat segera menindaklanjuti rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Maros,  
Ketua Satuan Kepatuhan Internal (SKI)



dr.Juniarty Naim,MKM.  
NIP 197606302005012001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan/Eselon I Kemenkes RI
2. Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemenkes RI
3. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI cq. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**  
**SATUAN KERJA BBKK MAKASSAR**  
**TAHUN 2025**

**NOMOR** : PS.03.01/C.IX.3.31/5018/2026  
**TANGGAL** : Tanggal 18 April 2026



## **LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA BBKK MAKASSAR TAHUN 2025**

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 pada satuan kerja BBKK Makassar, dapat disampaikan sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

#### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
5. Surat Tugas Kepala nomor PR.01.05/C.IX.3/5001/2026 tanggal 17 April 2026 Perihal Melaksanakan Reviu SAKIP terhadap Tim SAKIP BBKK Makassar

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### **C. Tujuan Evaluasi**

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP.
2. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit satuan kerja.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas satuan kerja.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP adalah:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan akuntabilitas kinerja untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara daring melalui metode:

1. Penelaahan dokumen
2. Analisis dan interpretasi
3. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

1. Nama Satuan Kerja : BBKK Makassar
2. Alamat Satuan Kerja : Jl.Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
3. Pimpinan Satuan Kerja: dr.Achmad Farchanny Tri Adrianto,MKM

G. Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 satuan kerja BBKK Makassar adalah sebesar 107,06%. Dengan kondisi dari total 8 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, semua indikator mencapai target yang telah ditetapkan.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan membuat inovasi sesuai dengan rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2024.

## II. Gambaran Hasil Evaluasi

A. Kondisi

Hasil Evaluasi pada satuan kerja BBKK Makassar tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 84,60 dengan kategori **A (Memuaskan)**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja  
Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja dengan nilai 25,20.

Permasalahan pada komponen Perencanaan Kinerja adalah:  
Tidak terdapat permasalahan pada komponen Perencanaan Kinerja.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan nilai 25,20.

Permasalahan pada komponen Pengukuran Kinerja yaitu:

- a. Belum adanya analisa capaian kinerja Semester II dengan refocusing organisasi
- b. Belum adanya analisa capaian kinerja Semester II dengan strategi
- c. Belum adanya analisa keterkaitan capaian kinerja Semester II dengan kebijakan

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,20.

Permasalahan pada komponen Pelaporan Kinerja yaitu:

Tidak terdapat permasalahan pada komponen Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 21,00.

Permasalahan pada komponen Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu:

- a. Belum ada surat pernyataan terkait tidak adanya temuan/kerugian negara

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala BBKK Makassar, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja

- a. Melengkapi analisa capaian kinerja dengan refocusing organisasi
- b. Melengkapi analisa capaian kinerja dengan strategi
- c. Melengkapi analisa keterkaitan capaian kinerja dengan kebijakan

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Membuat surat pernyataan terkait tidak adanya temuan/kerugian negara

### III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja BBKK Makassar Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

B. Dorongan terhadap Implementasi Akuntabilitas Kinerja

Satuan kerja diharapkan dapat berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan capaian kinerja yang diharapkan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada satuan kerja BBKK Makassar. Kami menghargai upaya Bapak beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di satuan kerja BBKK Makassar.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Maros,

Ketua Satuan Kepatuhan Internal (SKI)



dr. Juniarty Naim, MKM.

NIP 197606302005012001

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR  
TAHUN 2025**

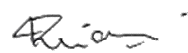
| No                          | Komponen/Sub Komponen/Kriteria          | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|
|                             |                                         |       | 2025                        |
| 1                           | Perencanaan Kinerja                     | 30.00 | 25.20                       |
| 2                           | Pengukuran Kinerja                      | 30.00 | 25.20                       |
| 3                           | Pelaporan Kinerja                       | 15.00 | 13.20                       |
| 4                           | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 21.00                       |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja |                                         |       | 84.60                       |
| Kategori Predikat           |                                         |       | A                           |

| No | Catatan (harus spesifik dan rinci)                                            | Keterangan                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Belum adanya analisa capaian kinerja Semester II dengan refocusing organisasi | Catatan dibuat rinci dan spesifik, misal: |
| 2  | Belum adanya analisa capaian kinerja Semester II dengan strategi              |                                           |
| 3  | Belum adanya analisa keterkaitan capaian kinerja Semester II dengan kebijakan |                                           |
| 4  | Belum ada surat pernyataan terkait tidak adanya temuan/kerugian negara        |                                           |
| 5  |                                                                               |                                           |
| 6  |                                                                               |                                           |
| 7  |                                                                               |                                           |
| 8  |                                                                               |                                           |
|    |                                                                               |                                           |
|    |                                                                               |                                           |
|    |                                                                               |                                           |
|    |                                                                               |                                           |

| No | Catatan Lainnya |
|----|-----------------|
| 1  |                 |
| 2  |                 |
| 3  |                 |
| 4  |                 |
| 5  |                 |
| 6  |                 |
| 7  |                 |
| 8  |                 |
| 9  |                 |
| 10 |                 |
| 11 |                 |
| 12 |                 |

| No | Rekomendasi (harus spesifik)                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Melengkapi analisa capaian kinerja dengan refocusing organisasi      |
| 2  | Melengkapi analisa capaian kinerja dengan strategi                   |
| 3  | Melengkapi analisa keterkaitan capaian kinerja dengan kebijakan      |
| 4  | Membuat surat pernyataan terkait tidak adanya temuan/kerugian negara |
| 5  |                                                                      |
| 6  |                                                                      |
| 7  |                                                                      |
| 8  |                                                                      |
| 9  |                                                                      |
| 10 |                                                                      |
| 11 |                                                                      |
| 12 |                                                                      |

Tim Penyusun SAKIP



**Arni Angriany Amir, ST**  
NIP 197601132008042001

Maros, 18 April 2026  
SKI Satker BBKK Makassar  
Anggota



**drg. Arifa Setiani Thamrin, M. Kes**  
NIP 197512302006042023

Kepala  
BBKK Makassar



**dr. Achmad Fathanny Tri Adrianto, MKM**  
NIP 196902192002121003

Ketua

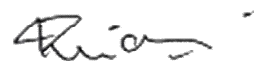


**dr. Juniarty Naim, MKM.**  
NIP 197606302005012001

**LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR  
TAHUN 2025**

| No                                                     | Komponen/Sub Komponen/Kriteria                                                                                                                                                                                                                       | Bobot        | Nilai        |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>                                               | <b>PERENCANAAN KINERJA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>30.00</b> | <b>25.20</b> | <b>84.00%</b> |
| 1.a                                                    | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia                                                                                                                                                                                                           | 6.00         | 6            | 100.00%       |
| 1.b                                                    | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 9.00         | 7.2          | 80.00%        |
| 1.c                                                    | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan                                                                                                                                                                  | 15.00        | 12           | 80.00%        |
| <b>2</b>                                               | <b>PENGUKURAN KINERJA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>30.00</b> | <b>25.20</b> | <b>84.00%</b> |
| 2.a                                                    | Pengukuran Kinerja telah dilakukan                                                                                                                                                                                                                   | 6.00         | 6            | 100.00%       |
| 2.b                                                    | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan                                                                                               | 9.00         | 7.2          | 80.00%        |
| 2.c                                                    | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien                                                                                           | 15.00        | 12           | 80.00%        |
| <b>3</b>                                               | <b>PELAPORAN KINERJA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>15.00</b> | <b>13.20</b> | <b>88.00%</b> |
| 3.a                                                    | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja                                                                                                                                                                                                  | 3.00         | 2.4          | 80.00%        |
| 3.b                                                    | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya                                                                      | 4.50         | 4.05         | 90.00%        |
| 3.c                                                    | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya                                                                                                                          | 7.50         | 6.75         | 90.00%        |
| <b>4</b>                                               | <b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>25.00</b> | <b>21.00</b> | <b>84.00%</b> |
| 4.a                                                    | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                           | 5.00         | 5            | 100.00%       |
| 4.b                                                    | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai                                                                                                                                        | 7.50         | 6            | 80.00%        |
| 4.c                                                    | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja                                                                              | 12.50        | 10           | 80.00%        |
| <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja / Kategori Predikat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |              | <b>84.60</b> | <b>A</b>      |

Tim Penyusun SAKIP



**Arni Angriany Amir,ST**  
NIP 197601132008042001

Maros,18 April 2026  
SKI Satker BBKK Makassar  
Ketua



**dr. Junlarty Naim,MKM.**  
NIP 197606302005012001

Mengetahui  
Kepala BBKK Makassar



**dr. Achmad Farchanny Tri Adrianto, MKM**  
NIP 196902192002121003

| No        | Komponen/Sub Komponen/Kriteria                                                                                                                                                                                                                       | Bobot | Instansi |       | Catatan                                     | Daftar Evidence                                                                                                                                                                                                                                     | Tambah |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Jawaban  | Nilai |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1         | PERENCANAAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                  | 30.00 |          | 25.2  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1.a       | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia                                                                                                                                                                                                           | 6.00  | AA       | 6     | (Diisi catatan yang terdapat                | - Jika seluruh kriteria terpenuhi namun usia dokumen belum 1                                                                                                                                                                                        |        |
| Kriteria: |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |       | 100.00                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1         | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.                                                                                                                                                                                                         |       |          |       | 1                                           | Petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2025 dan SOP Penyusunan RAK BBKK Makassar                                                                                                                                            |        |
| 2         | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.                                                                                                                                                                                                 |       |          |       | 1                                           | Nilai 1 untuk satker/uker                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 3         | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.                                                                                                                                                                                                |       |          |       | 1                                           | RAP dan RAK BBKK Makassar (5 Tahun)                                                                                                                                                                                                                 | RAK    |
| 4         | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.                                                                                                                                                                                                  |       |          |       | 1                                           | RKT 2026 (1 Tahun)                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 5         | Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.                                                                                                                                                                                       |       |          |       | 1                                           | RAK 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 6         | Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.                                                                                                                                                                                        |       |          |       | 1                                           | RKA-K/L Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|           | Usia Dokumen                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |       | 5 tahun                                     | Renstra atau dokumen yang setara berkesinambungan dari tahun pertama sd tahun berikutnya terakhir                                                                                                                                                   |        |
| 1.b       | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 9.00  | BB       | 7.2   | (Diisi catatan yang terdapat pada kriteria) | - Jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai maksimal BB<br>- Jika hanya 10 kriteria terpenuhi maka $10/11 \times 100\% = 91\%$ sehingga nilai maksimal B                                                                             |        |
| Kriteria: |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |       | 100.00                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1         | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.                                                                                                                                                                                                       |       |          |       | 1                                           | RAK telah ditandatangani                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2         | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.                                                                                                                                                                                        |       |          |       | 1                                           | Telah dipublikasikan di website BBKK Makassar dan aplikasi e-                                                                                                                                                                                       |        |
| 3         | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.                                                                                                                                                |       |          |       | 1                                           | Analisis IKU telah sesuai dengan tupoksi satker                                                                                                                                                                                                     |        |
| 4         | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.                                                                                                                                                 |       |          |       | 1                                           | Matriks Keselarasan Tujuan/Sasaran/IKU                                                                                                                                                                                                              |        |
| 5         | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.                                                                                                                                                                               |       |          |       | 1                                           | Analisis IKU telah SMART (seluruh IKU)                                                                                                                                                                                                              |        |
| 6         | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).                                                |       |          |       | 1                                           | IKU Tahun awal RSB<br>IKU Tahun evaluasi<br>Dalam 1 periode IKU dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Terhadap perubahan tersebut tetap dianggap sustainabel apabila perubahan IKU yang dilakukan dapat mempercepat pencapaian tujuan organisasi. |        |
| 7         | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.                                                                                                                                               |       |          |       | 1                                           | Analisis target kinerja untuk kriteria achievable, menantang dan realistis                                                                                                                                                                          |        |
| 8         | Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).                                                                           |       |          |       | 1                                           | Cascading PK dengan Kontrak Kinerja Pegawai di setiap level jabatan.<br>Dokumen yang menunjukkan hubungan keselarasan hasil yang ingin dicapai mulai Kepala Satker (IKK/PK) sampai ke staf (IKI/SKP)                                                |        |
| 9         | Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).                                                              |       |          |       | 1                                           | Analisis Renstra atau dokumen yang setara/RKT/RA telah menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)                                                |        |
| 10        | Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja                                                                                                                                                                               |       |          |       | 1                                           | Absensi dan Notulen Rapat Perencanaan Kinerja                                                                                                                                                                                                       |        |
| 11        | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.                                                                                                                                                                                        |       |          |       | 1                                           | Absensi dan Notulen Rapat Perencanaan Kinerja                                                                                                                                                                                                       |        |
|           | Terdapat upaya inovatif terkait kualitas perencanaan kinerja                                                                                                                                                                                         |       |          |       | Tidak Ada                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1.c       | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan                                                                                                                                                                  | 15.00 | BB       | 12    | (Diisi catatan yang terdapat pada kriteria) | - Jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai maksimal BB<br>- Jika hanya 7 kriteria terpenuhi maka $7/8 \times 100\% = 87,5\%$ sehingga nilai maksimal B                                                                              |        |
| Kriteria: |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |       | 100.00                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1         | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.                                                                                                                                                                              |       |          |       | 1                                           | Rencana Aksi telah memuat anggaran per prog/kegiatan                                                                                                                                                                                                |        |
| 2         | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.                                                                                                                                                                              |       |          |       | 1                                           | Rencana Aksi dan bukti pelaksanaan aktivitas                                                                                                                                                                                                        |        |

|                                                             |                                                                                                                                                            |       |    |      |                                             |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                           | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.                                      |       |    |      | 1                                           | Hasil capaian kinerja dan Pembahasan penetapan target kinerja                                                                                                         |
| 4                                                           | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala                                                          |       |    |      | 1                                           | Laporan Monitoring Rencana Aksi Triwulan                                                                                                                              |
| 5                                                           | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya                              |       |    |      | 1                                           | Hasil Reviu RAK                                                                                                                                                       |
| 6                                                           | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil                                                                |       |    |      | 1                                           | Hasil Reviu RAK                                                                                                                                                       |
| 7                                                           | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan                                             |       |    |      | 1                                           | Absensi dan Notulen Rapat Pengukuran Kinerja                                                                                                                          |
| 8                                                           | Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan                                                       |       |    |      | 1                                           | SKP Pegawai                                                                                                                                                           |
| Terdapat upaya inovatif terkait manfaat perencanaan kinerja |                                                                                                                                                            |       |    |      | Tidak Ada                                   |                                                                                                                                                                       |
| 2                                                           | PENGUKURAN KINERJA                                                                                                                                         | 30.00 |    | 25.2 |                                             |                                                                                                                                                                       |
| 2.a                                                         | Pengukuran Kinerja telah dilakukan                                                                                                                         | 6.00  | AA | 6    | (Diisi catatan yang terdapat                | - Jika seluruh kriteria terpenuhi namun usia dokumen belum 1                                                                                                          |
| Kriteria:                                                   |                                                                                                                                                            |       |    |      | 100.00                                      |                                                                                                                                                                       |
| 1                                                           | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.                                                                                   |       |    |      | 1                                           | Pedoman aplikasi pemantik dan SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja                                                                                             |
| 2                                                           | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.                                                                 |       |    |      | 1                                           | DO dan formula perhitungan IKK                                                                                                                                        |
| 3                                                           | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.                                                                     |       |    |      | 1                                           | Pedoman dan SOP Pengumpulan Data Kinerja;                                                                                                                             |
| Usia Dokumen                                                |                                                                                                                                                            |       |    |      | 1 tahun                                     | Semua dokumen tersebut masih berkesimbangan dari tahun pertama pengukuran sd tahu terakhir pengukuran                                                                 |
| 2.b                                                         | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan     | 9.00  | BB | 7.2  | (Diisi catatan yang terdapat pada kriteria) | - Jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai maksimal BB<br>- Jika hanya 6 kriteria terpenuhi maka $6/7 \times 100\% = 86\%$ sehingga nilai maksimal B  |
| Kriteria:                                                   |                                                                                                                                                            |       |    |      | 100.00                                      |                                                                                                                                                                       |
| 1                                                           | Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian                                                               |       |    |      | 1                                           | Bukti keterlibatan pimpinan dalam pengukuran capaian kinerja (notulen rapat pembahasan capaian kinerja)                                                               |
| 2                                                           | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.                                                                |       |    |      | 1                                           | Analisis relevansi dan kecukupan data kinerja                                                                                                                         |
| 3                                                           | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.                                                                             |       |    |      | 1                                           | Analisis relevansi dan kecukupan data kinerja                                                                                                                         |
| 4                                                           | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.                                                                                                         |       |    |      | 1                                           | Laporan Monitoring IKK Triwulan                                                                                                                                       |
| 5                                                           | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.                                            |       |    |      | 1                                           | Laporan Monitoring Kinerja Individu;<br>Laporan Monitoring Kinerja Instalasi/Unit<br>(ambil salah satu bagian, mulai dari atasan sampai staf)                         |
| 6                                                           | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).                                                                                |       |    |      | 1                                           | Bukti pemakaian aplikasi untuk pengumpulan data kinerja                                                                                                               |
| 7                                                           | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)                                                                               |       |    |      | 1                                           | Bukti pemakaian aplikasi untuk pengukuran kinerja                                                                                                                     |
| Terdapat upaya inovatif terkait kualitas pengukuran kinerja |                                                                                                                                                            |       |    |      | Tidak Ada                                   |                                                                                                                                                                       |
| 2.c                                                         | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15.00 | BB | 12   | (Diisi catatan yang terdapat pada kriteria) | - Jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai maksimal BB<br>- Jika hanya 9 kriteria terpenuhi maka $9/10 \times 100\% = 90\%$ sehingga nilai maksimal B |
| Kriteria:                                                   |                                                                                                                                                            |       |    |      | 100.00                                      |                                                                                                                                                                       |
| 1                                                           | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.                                            |       |    |      | 1                                           | Bukti pemberian/pengurangan tunjangan berdasarkan pencapaian kinerja (minimal SOP)                                                                                    |
| 2                                                           | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.                                             |       |    |      | 1                                           | Bukti penempatan/penghapusan jabatan berdasarkan pencapaian kinerja (minimal SOP)<br>Hasil evaluasi struktur organisasi; Peta Jabatan; Anjab; ABK                     |
| 3                                                           | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.                                                                                 |       |    |      | 1                                           | Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi refocusing                                                                                                                |
| 4                                                           | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.                                                                         |       |    |      | 1                                           | Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi strategi                                                                                                                  |
| 5                                                           | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.                                                                        |       |    |      | 1                                           | Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi kebijakan                                                                                                                 |
| 6                                                           | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.                                                                        |       |    |      | 1                                           | Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi aktifitas                                                                                                                 |



|           |                                                                                                                                                                                |              |    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.                                                                                             |              |    |             | 1                                           | Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi anggaran                                                                                                                                            |
| 8         | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.                                                                                                            |              |    |             | 1                                           | Bukti efisiensi anggaran<br>Hal apa yang dilakukan untuk mencapai efisiensi anggaran tersebut                                                                                                   |
| 9         | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.                                                                                                    |              |    |             | 1                                           | Absensi dan Notulen Rapat Pengukuran Kinerja yang menggambarkan upaya/evaluasi dalam pencapaian kinerja                                                                                         |
| 10        | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.                                                                                                              |              |    |             | 1                                           | Absensi dan Notulen Rapat Pengukuran Kinerja yang                                                                                                                                               |
|           | <b>Terdapat upaya inovatif terkait manfaat pengukuran kinerja</b>                                                                                                              |              |    |             | <b>Tidak Ada</b>                            |                                                                                                                                                                                                 |
| 3         | <b>PELAPORAN KINERJA</b>                                                                                                                                                       | <b>15.00</b> |    | <b>13.2</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                 |
| 3.a       | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja                                                                                                                            | 3.00         | BB | 2.4         | (Diisi catatan yang terdapat pada kriteria) | - Jika seluruh kriteria terpenuhi namun usia dokumen belum 1 tahun maka nilai maksimal BB<br>- Jika hanya 5 kriteria terpenuhi maka $5/6 \times 100\% = 83\%$ sehingga nilai maksimal B         |
| Kriteria: |                                                                                                                                                                                |              |    |             | <b>100.00</b>                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.                                                                                                                                         |              |    |             | 1                                           | LAKIP                                                                                                                                                                                           |
| 2         | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.                                                                                                                          |              |    |             | 1                                           | Laporan Monev Pencapaian Kinerja per triwulan                                                                                                                                                   |
| 3         | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.                                                                                                                                     |              |    |             | 1                                           | LAKIP yang telah ditandatangani                                                                                                                                                                 |
| 4         | Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.                                                                                                                                         |              |    |             | 1                                           | Hasil reviu internal LAKIP                                                                                                                                                                      |
| 5         | Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.                                                                                                                                  |              |    |             | 1                                           | Bukti publikasi LAKIP di website, e-Performance                                                                                                                                                 |
| 6         | Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.                                                                                                                         |              |    |             | 1                                           | Bukti penyampaian LAKIP                                                                                                                                                                         |
|           | <b>Usia Dokumen</b>                                                                                                                                                            |              |    |             | <b>&lt; 1 tahun</b>                         |                                                                                                                                                                                                 |
| 3.b       | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya | 4.50         | A  | 4.05        | (Diisi catatan yang terdapat pada kriteria) | - Jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai maksimal BB<br>- Jika hanya 8 kriteria terpenuhi maka $8/9 \times 100\% = 89\%$ sehingga nilai maksimal B                            |
| Kriteria: |                                                                                                                                                                                |              |    |             | <b>100.00</b>                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.                                                                                                      |              |    |             | 1                                           | LAKIP telah sesuai dengan Permenpan 53/2014                                                                                                                                                     |
| 2         | Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.                                                                                         |              |    |             | 1                                           | LAKIP telah mencakup:<br>1. Capaian Kinerja setiap Indikator                                                                                                                                    |
| 3         | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.                                                                       |              |    |             | 1                                           | Analisis dan Evaluasi Capaian dibandingkan target tahunan                                                                                                                                       |
| 4         | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.                                                               |              |    |             | 1                                           | Analisis dan Evaluasi Capaian dibandingkan target akhir Renstra atau dokumen yang setara                                                                                                        |
| 5         | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.                                             |              |    |             | 1                                           | Analisis dan Evaluasi Capaian dibandingkan target tahun lalu                                                                                                                                    |
| 6         | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).                 |              |    |             | 1                                           | Analisis dan Evaluasi Capaian dibandingkan target nasional/internasional                                                                                                                        |
| 7         | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.                                                              |              |    |             | 1                                           | Kualitas Keberhasilan<br>Penyebab/Hambatan Kegagalan<br>Upaya yang Telah Dilakukan                                                                                                              |
| 8         | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.                                                                        |              |    |             | 1                                           | 1. Ada bukti efisiensi penggunaan sumber daya<br>2 Tidak ada temuan Kerugian Negara/Ketidakefisienan/pemborosan dalam waktu 2 tahun terakhir<br>Jika tercapai 2 (nilai 1), tidak tercapai 2 (0) |
| 9         | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).                                                  |              |    |             | 1                                           | Rekomendasi perbaikan kinerja                                                                                                                                                                   |
|           | <b>Terdapat upaya inovatif terkait kualitas pelaporan kinerja</b>                                                                                                              |              |    |             | <b>Dapat Dihargai</b>                       | <b>Bukti Upaya Inovasi</b>                                                                                                                                                                      |
| 3.c       | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam                                                                                                                     | 7.50         | A  | 6.75        | (Diisi catatan yang terdapat pada kriteria) | - Jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai                                                                                                                                      |
| Kriteria: |                                                                                                                                                                                |              |    |             | <b>100.00</b>                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).                                                                                   |              |    |             | 1                                           | Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan LAKIP                                                                                                                                                    |
| 2         | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.                                                                                                  |              |    |             | 1                                           | Keterlibatan seluruh pegawai dalam penyusunan LAKIP                                                                                                                                             |

|                                                                                  |                                                                                                                                                |       |    |    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.                                    |       |    |    | 1                                           | Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi aktifitas pencapaian kinerja                                                                                                                                                           |
| 4                                                                                | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.                          |       |    |    | 1                                           | Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi anggaran                                                                                                                                                                               |
| 5                                                                                | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.                                                |       |    |    | 1                                           | Laporan Monev Pencapaian Kinerja                                                                                                                                                                                                   |
| 6                                                                                | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.                           |       |    |    | 1                                           | bukti bahwa informasi yang ada di LAKIP tahun lalu telah menjadi dasar penyusunan RKT tahun evaluasi/revisi Renstra atau dokumen yang setara                                                                                       |
| 7                                                                                | Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.                                                       |       |    |    | 1                                           | 1. Terdapat bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi budaya kinerja<br>2. LHKPN tepat waktu (sebelum 31 maret)/ pegawai terakhir lapor<br>3. Tidak ada Fraud/ OTT<br>4. WBK<br>Tercapai 4, (nilai 1) Tidak tercapai 4 (nilai 0) |
| Terdapat upaya inovatif terkait manfaat pelaporan kinerja                        |                                                                                                                                                |       |    |    | Dapat Dihargai                              | Bukti Upaya Inovasi                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                                                | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL                                                                                                        | 25.00 |    | 21 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.a                                                                              | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan                                                                                     | 5.00  | AA | 5  | (Diisi catatan yang terdapat pada kriteria) | - Jika seluruh kriteria terpenuhi namun usia dokumen belum 1 tahun maka nilai maksimal BB<br>- Jika hanya 2 kriteria terpenuhi maka $2/3 \times 100\% = 67\%$ sehingga nilai maksimal CC                                           |
| Kriteria:                                                                        |                                                                                                                                                |       |    |    | 100.00                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.                                                                               |       |    |    | 1                                           | Pedoman teknis evaluasi SAKIP Ditjen P2P dan SOP evaluasi                                                                                                                                                                          |
| 2                                                                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.                                           |       |    |    | 1                                           | Laporan Hasil Monev berdasarkan data kinerja setiap unit                                                                                                                                                                           |
| 3                                                                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.                                                                  |       |    |    | 1                                           | Hasil Evaluasi Kinerja telah dilakukan secara berjenjang                                                                                                                                                                           |
| Usia Dokumen                                                                     |                                                                                                                                                |       |    |    | 1 tahun                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.b                                                                              | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara                                                                              | 7.50  | BB | 6  | (Diisi catatan yang terdapat pada kriteria) | - Jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai                                                                                                                                                                         |
| Kriteria:                                                                        |                                                                                                                                                |       |    |    | 100.00                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.                                                                     |       |    |    | 1                                           | SOP Evaluasi SAKIP dan LKE Internal dilakukan oleh SKI                                                                                                                                                                             |
| 2                                                                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.                                                              |       |    |    | 1                                           | Bukti sertifikasi evaluator internal; pelatihan/workshop                                                                                                                                                                           |
| 3                                                                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.                                                     |       |    |    | 1                                           | Kertas kerja Evaluasi                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.                                           |       |    |    | 1                                           | Bukti evaluasi telah dilaksanakan pada seluruh unit                                                                                                                                                                                |
| 5                                                                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).                                         |       |    |    | 1                                           | Bukti penggunaan aplikasi pada evaluasi kinerja dari aplikasi Pemantik, SMART Kemenkeu dan Monev Bapenas                                                                                                                           |
| Terdapat upaya inovatif terkait kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal |                                                                                                                                                |       |    |    | Tidak Ada                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.c                                                                              | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas                                                                               | 12.50 | BB | 10 | (Diisi catatan yang terdapat pada kriteria) | - Jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai                                                                                                                                                                         |
| Kriteria:                                                                        |                                                                                                                                                |       |    |    | 100.00                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                | Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.                                                  |       |    |    | 1                                           | Bukti TL LAKIP tahun lalu; Bukti TL Hasil Monev berkala dan                                                                                                                                                                        |
| 2                                                                                | Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal. |       |    |    | 1                                           | Bukti TL LAKIP tahun lalu; Bukti TL Hasil Monev berkala dan bukti TL SAKIP tahun lalu                                                                                                                                              |
| 3                                                                                | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.                        |       |    |    | 1                                           | Bukti perbaikan dan peningkatan akuntabilitas berdasarkan hasil evaluasi LAKIP; Perbandingan capaian kinerja tahun lalu telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Tahun sekarang                                                  |
| 4                                                                                | Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.                       |       |    |    | 1                                           | Bukti efektifitas dan efisiensi kinerja berdasarkan hasil evaluasi LAKIP                                                                                                                                                           |
| 5                                                                                | Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.                             |       |    |    | 1                                           | Bukti perbaikan dan peningkatan akuntabilitas berdasarkan hasil evaluasi LAKIP; Perbandingan capaian kinerja tahun lalu telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Tahun sekarang                                                  |
| Terdapat upaya inovatif terkait manfaat evaluasi akuntabilitas kinerja internal  |                                                                                                                                                |       |    |    | Tidak Ada                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |

**Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar**  
**Tahun 2026**

**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**  
**Indikator IKM 33.2 : Nilai Kinerja Anggaran**

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |             |             |              |              |              |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jan                            | Feb         | Mar         | Apr          | Mei          | Jun          | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |                   |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e Monev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari :<br>1 Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.<br>Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK<br>2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.<br><br>*Nilai IKPA Satker BLU tidak dilakukan agregasi ke level Unit Eselon I.<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA) |                                |             |             |              |              |              |      |     |     |     |     |     |                  |                   |
| <b>Nilai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>37.5</b>                    | <b>37.5</b> | <b>37.5</b> | <b>61.59</b> | <b>74.37</b> | <b>74.38</b> |      |     |     |     |     |     | <b>74.38</b>     | <b>Subag Adum</b> |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,

Kepala BBKK Makassar



**Dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM**

NIP. 196902192002121003

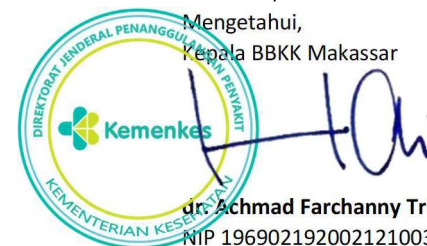
**Kertas Kerja Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar**  
**Triwulan II Tahun 2026**

**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**  
**Indikator IKM 33.2 : Nilai Kinerja Anggaran**

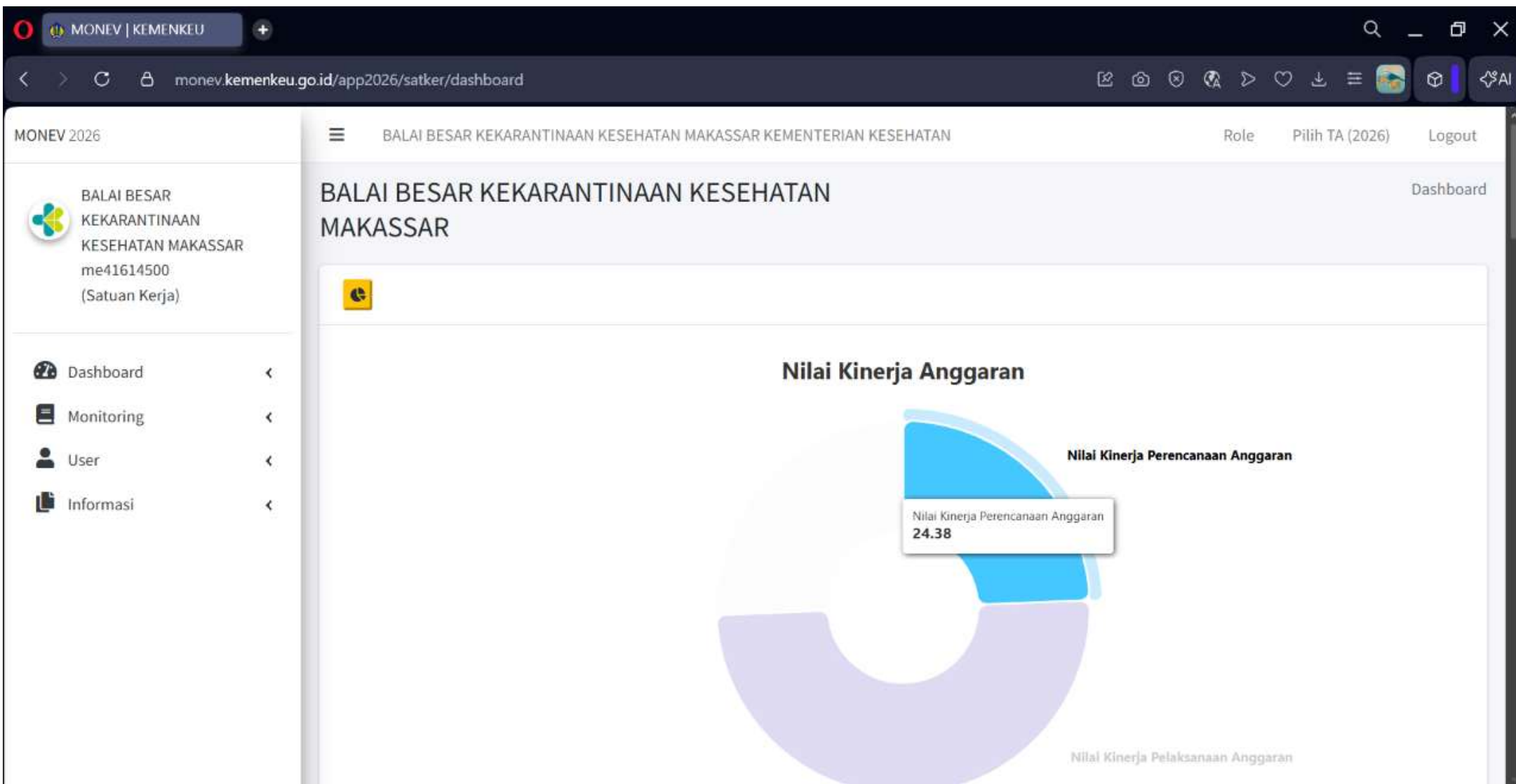
| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2026  | April        |              |                | Mei          |              |                | Juni         |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Target       | Realisasi    | Capaian        | Target       | Realisasi    | Capaian        | Target       | Realisasi    | Capaian        |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>1 Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.<br>Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK<br>2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.<br><br>*Nilai IKPA Satker BLU tidak dilakukan agregasi ke level Unit Eselon I.<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA) |              |              |              |                |              |              |                |              |              |                |
| <b>Nilai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>92.75</b> | <b>30.92</b> | <b>61.59</b> | <b>199.21%</b> | <b>38.65</b> | <b>74.37</b> | <b>192.44%</b> | <b>46.38</b> | <b>74.38</b> | <b>160.39%</b> |

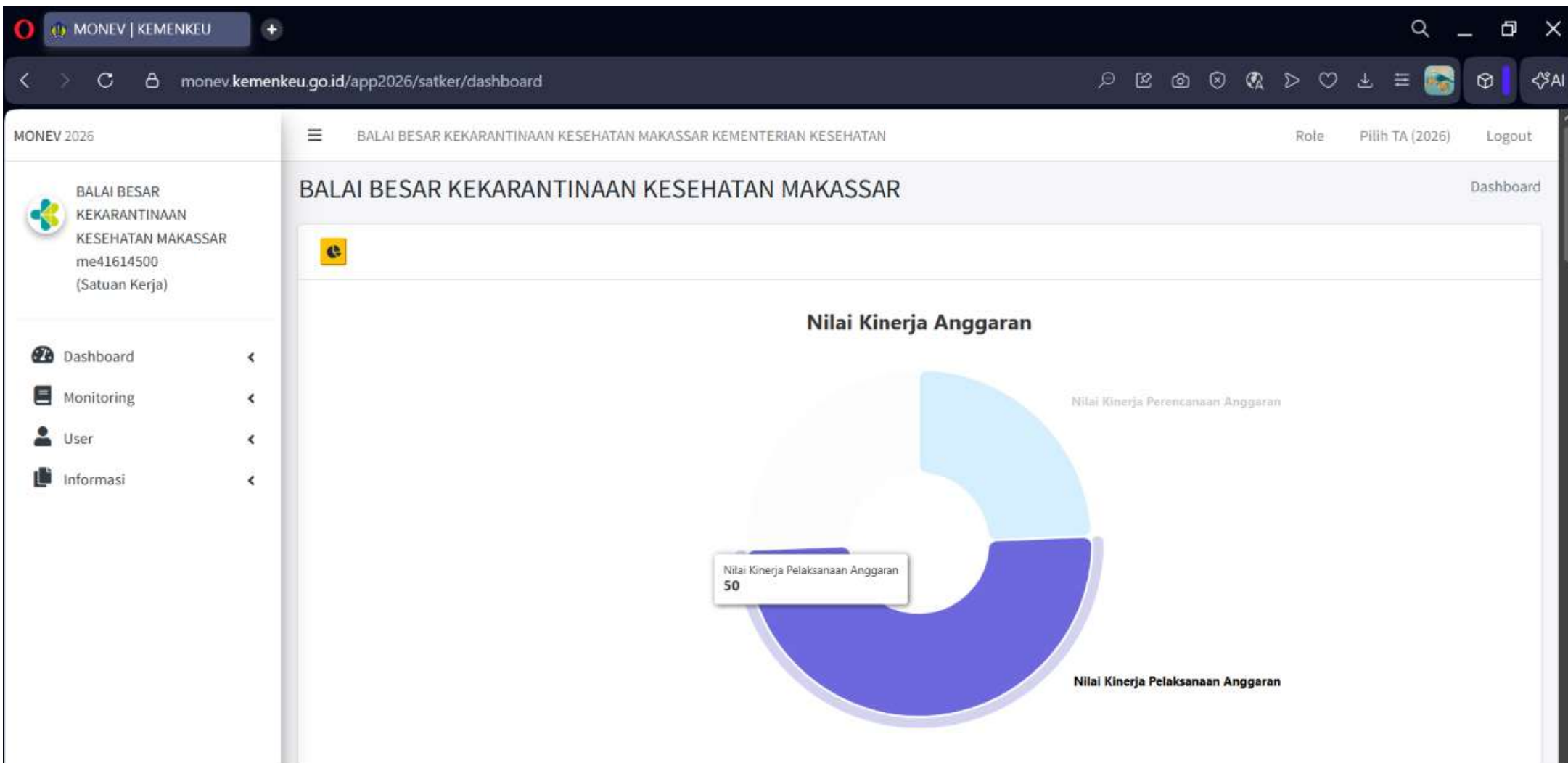
Makassar, Juli 2026

Mengetahui,  
Kepala BBKK Makassar



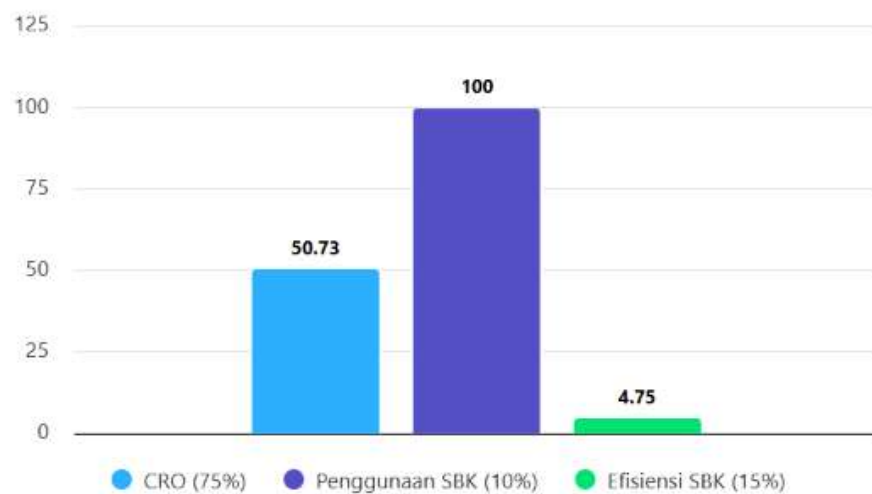
Dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM  
NIP 196902192002121003







### Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

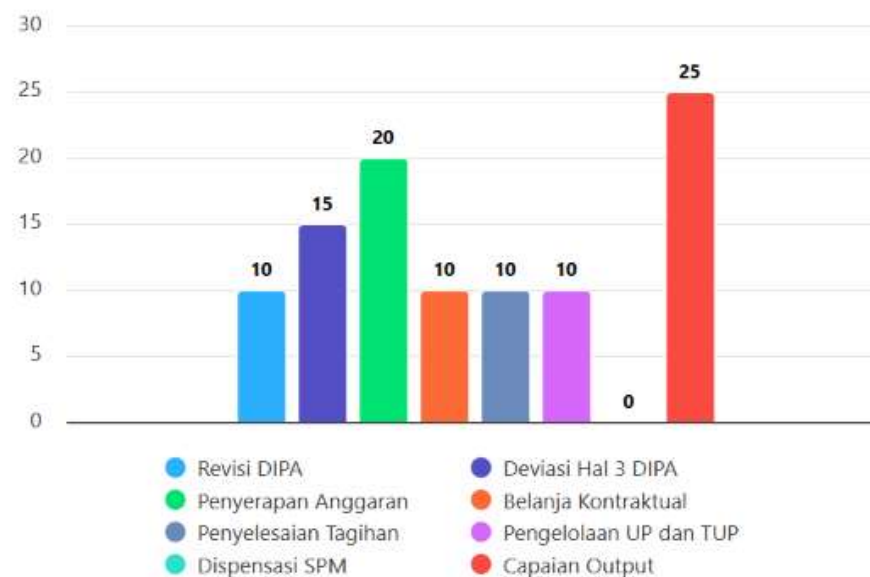


"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

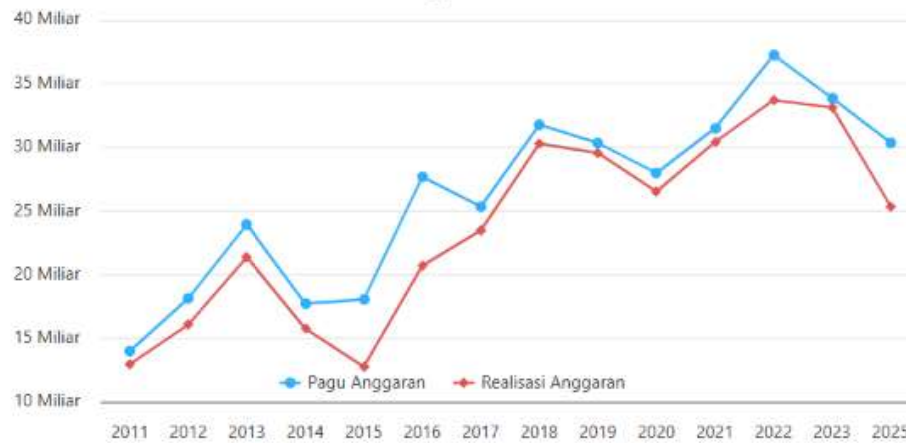


Juni

### Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran







| Kondisi | Keterangan                                                             | Jumlah RO | Persentase |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Case 1  | PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran                | 0         | 0%         |
| Case 2  | PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran              | 0         | 0%         |
| Case 3  | PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) masih 0                           | 0         | 0%         |
| Case 4  | PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak mencapai target/volume DIPA | 0         | 0%         |

Sebelumnya **1** Selanjutnya



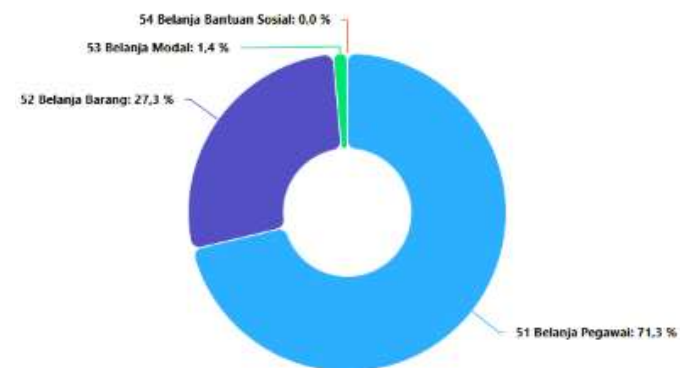
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

| Akun 2 Digit              | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 51 Belanja Pegawai        | 21.737.872.000   | 11.675.426.760     | 53.71 %    |
| 52 Belanja Barang         | 8.328.864.000    | 3.561.555.849      | 42.76 %    |
| 53 Belanja Modal          | 432.949.000      | 231.333.000        | 53.43 %    |
| 57 Belanja Bantuan Sosial | 0                | 0                  | 0.00 %     |

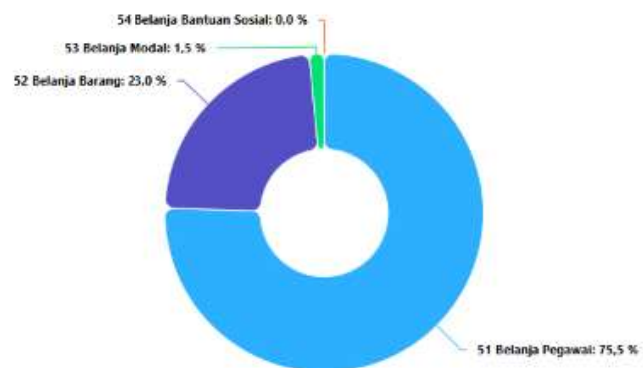
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

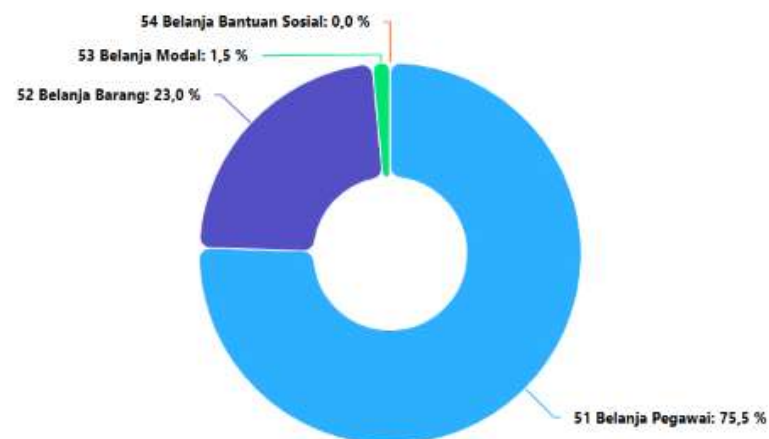
Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



### Komposisi Realisasi Anggaran



## Partisipasi Satuan Kerja

| No. ↑↓ | Kode Satuan Kerja ↑↓ | Satuan Kerja ↑↓                              | Jan ↑↓ | Feb ↑↓ | Mar ↑↓ | Apr ↑↓ | Mei ↑↓ | Jun ↑↓ | Jul ↑↓ | Ags ↑↓ | Sep ↑↓ | Okt ↑↓ | Nov ↑↓ | Des ↑↓ |
|--------|----------------------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 416146               | BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | !      | !      | !      | !      | !      | !      |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

## Monitoring / NK Perencanaan Satker

Tampilkan 10 entri

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Selanjutnya

MONEV | KEMENKEU

money.kemenkeu.go.id/app2026/satker/nilaiikpasatker

MONEV

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR KEMENTERIAN KESEHATAN

RolePilih TA (2026)Logout

Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPAI DENGAN WAJIB

Juni

Tampilkan

Download PDF

Download Excel

| No. | Periode | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker                                | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|-----|---------|-----------|---------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|
|     |         |           |         |             |                                              |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output                      |             |                |                            |                                          |
| 1   | Juni    | 136       | 024     | 416145      | BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR | Nilai       | 100,00                        | 100,00                   | 100,00                        | 100,00              | 100,00               | 100,00                 | 100,00                              | 100,00      | 100%           | 0.00                       | 100.00                                   |
|     |         |           |         |             |                                              | Bobot       | 10                            | 15                       | 20                            | 10                  | 10                   | 10                     | 25                                  |             |                |                            |                                          |
|     |         |           |         |             |                                              | Nilai Akhir | 10,00                         | 15,00                    | 20,00                         | 10,00               | 10,00                | 10,00                  | 25,00                               |             |                |                            |                                          |
|     |         |           |         |             |                                              | Nilai Aspek | 100.00                        |                          | 100.00                        |                     |                      |                        | 100.00                              |             |                |                            |                                          |

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-07-07 07:36:57

MONEV | KEMENKEU

monev.kemenkeu.go.id/app2026/satker/nkasatkergabungan

MONEV

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR KEMENTERIAN KESEHATAN

RolePilih TA (2026)Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entriCari:

| No. ↑↓ | Kode Satuan Kerja ↑↓ | Satuan Kerja ↑↓                              | NK Perencanaan Anggaran ↑↓ | NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓ | Nilai Kinerja Anggaran ↑↓ |
|--------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1      | 024.05.416145        | BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR | 48,76                      | 100,00                     | 74,38                     |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-07-07 07:37:27

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar  
Tahun 2026

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Indikator IKM 33.4 : Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jan                            | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |            |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 % |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |            |
| <b>Persentase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  | Subag Adum |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,  
Kepala BBKK Makassar



dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM  
NIP 196902192002121003

**Kertas Kerja Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar**  
**Triwulan II Tahun 2026**

**Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

**Indikator IKM 33.4 : Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit**

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2026   | April  |           |         | Mei    |           |         | Juni   |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 % |               |        |           |         |        |           |         |        |           |         |
| <b>Persentase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>95.00%</b> |        |           |         |        |           |         |        |           |         |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,  
Kepala BBKK Makassar



*[Signature]*  
**dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM**  
NIP 196902192002121003

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar  
Tahun 2026

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Indikator IKD 33.1 : Persentase Realisasi Anggaran

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                  | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |       |        |        |        |        |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Jan                            | Feb   | Mar    | Apr    | Mei    | Jun    | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |            |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Membandingkan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>Realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan |                                |       |        |        |        |        |      |     |     |     |     |     |                  |            |
| <b>Nilai</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 2.38%                          | 9.83% | 22.60% | 29.02% | 37.17% | 48.48% |      |     |     |     |     |     | 48.48%           | Subag Adum |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,

Kepala BBKK Makassar



dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM

NIP 196902192002121003



**Kertas Kerja Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar**  
**Triwulan II Tahun 2026**

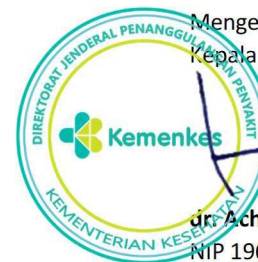
**Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

**Indikator IKD 33.1 : Persentase Realisasi Anggaran**

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                  | Target 2026   | April         |               |               | Mei           |               |               | Juni          |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Target        | Realisasi     | Capaian       | Target        | Realisasi     | Capaian       | Target        | Realisasi     | Capaian        |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Membandingkan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>Realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Persentase</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>96.00%</b> | <b>32.00%</b> | <b>29.02%</b> | <b>90.69%</b> | <b>40.00%</b> | <b>37.17%</b> | <b>92.93%</b> | <b>48.00%</b> | <b>48.48%</b> | <b>101.00%</b> |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,  
Kepala BBKK Makassar



*[Signature]*  
**Dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM**  
NIP 196902192002121003

# LAPORAN REALISASI SP2D TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2026

Kementerian : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
Unit Organisasi : 05 DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
Satuan Kerja : 416145 BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

Hal 1 dari 28

| Uraian                                                                               | Pagu Revisi           | Lock Pagu | Realisasi TA 2026     |                      |                       |                | SISA ANGGARAN         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                      |                       |           | Periode Lalu          | Periode Ini          | s.d. Periode          | %              |                       |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>                                                             | <b>30,499,685,000</b> | <b>0</b>  | <b>10,810,186,177</b> | <b>3,977,159,292</b> | <b>14,787,345,469</b> | <b>48.48 %</b> | <b>15,712,339,531</b> |
| DZ Program Sistem Ketahanan Kesehatan                                                | 4,738,294,000         | 0         | 1,250,767,772         | 701,488,543          | 1,952,256,315         | 41.20 %        | 2,786,037,685         |
| DZ.7960 Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan                            | 4,738,294,000         | 0         | 1,250,767,772         | 701,488,543          | 1,952,256,315         | 41.20 %        | 2,786,037,685         |
| PEA Koordinasi                                                                       | 60,280,000            | 0         | 16,120,000            | 1,635,000            | 17,755,000            | 29.45 %        | 42,525,000            |
| PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS-29) | 60,280,000            | 0         | 16,120,000            | 1,635,000            | 17,755,000            | 29.45 %        | 42,525,000            |
| 051 Koordinasi pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah | 60,280,000            | 0         | 16,120,000            | 1,635,000            | 17,755,000            | 29.45 %        | 42,525,000            |
| 051.OA Evaluasi layanan penyelenggaraan kesehatan haji                               | 10,810,000            | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 10,810,000            |
| 521211 Belanja Bahan                                                                 | 6,310,000             | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 6,310,000             |
| 000001. Konsumsi (Makan dan Snack)                                                   | 5,838,000             | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 5,838,000             |
| 000002. Konsumsi                                                                     | 472,000               | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 472,000               |
| 522151 Belanja Jasa Profesi                                                          | 2,205,000             | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 2,205,000             |
| 000003. Honorarium Narasumber Lintas Sektor                                          | 405,000               | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 405,000               |
| 000431. Honorarium Narasumber Lintas Sektor                                          | 1,800,000             | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 1,800,000             |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                           | 2,295,000             | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 2,295,000             |
| 000004. Transport peserta luar                                                       | 1,700,000             | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 1,700,000             |
| 000005. Transport Narasumber                                                         | 595,000               | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 595,000               |
| 051.OB Koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji                                     | 9,350,000             | 0         | 7,650,000             | 0                    | 7,650,000             | 81.82 %        | 1,700,000             |
| 521211 Belanja Bahan                                                                 | 8,500,000             | 0         | 7,650,000             | 0                    | 7,650,000             | 90.00 %        | 850,000               |
| 000006. Konsumsi (Snack)                                                             | 2,600,000             | 0         | 2,340,000             | 0                    | 2,340,000             | 90.00 %        | 260,000               |
| 000007. Konsumsi (Makan)                                                             | 5,900,000             | 0         | 5,310,000             | 0                    | 5,310,000             | 90.00 %        | 590,000               |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                           | 850,000               | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 850,000               |
| 000008. Transport peserta luar                                                       | 850,000               | 0         | 0                     | 0                    | 0                     | 0.00 %         | 850,000               |
| 051.OC Pertemuan/koordinasi LP/LS program kekarantinaan kesehatan                    | 28,950,000            | 0         | 5,490,000             | 0                    | 5,490,000             | 18.96 %        | 23,460,000            |
| 521211 Belanja Bahan                                                                 | 27,200,000            | 0         | 4,590,000             | 0                    | 4,590,000             | 16.88 %        | 22,610,000            |
| 000009. Konsumsi (Snack)                                                             | 8,320,000             | 0         | 1,404,000             | 0                    | 1,404,000             | 16.88 %        | 6,916,000             |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar  
Tahun 2026

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Indikator IKD 33.1.2 : Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang Dari 2X24 Jam

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Jumlah Realisasi | PJ                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jan                            | Feb     | Mar     | Apr     | Mei     | Jun     | Juli    | Agt     | Sep     | Okt     | Nov     | Des     |                  |                   |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil risk based assesment dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |                   |
| <b>Cara Perhitungan:</b><br>Jumlah dokumen kedatangan yang diterbitkan kurang dari 2x24 jam dibagi total alat angkut kategori merah dikali 100%                                                                                                                                                                        |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |                   |
| <b>Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang Dari 2X24 Jam</b>                                                                                                                                                                                                        | 100.00%                        | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |                  |                   |
| 1 Bandara Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                  |                   |
| 2 Wilker Pelabuhan Belang Belang                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              | 1       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                  |                   |
| 3 Wilker Pelabuhan Bira Bulukumba                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                  |                   |
| 4 Wilker Pelabuhan Biringkassi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                              | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                  |                   |
| 5 Wilker Pelabuhan Garongkong Barru                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0       | 2       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                  |                   |
| 6 Wilker Pelabuhan Makassar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                              | 1       | 0       | 4       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                  |                   |
| 7 Wilker Pelabuhan Malili                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 1       | 2       | 1       | 2       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                  |                   |
| 8 Wilker Pelabuhan Palopo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                  |                   |
| 9 Wilker Pelabuhan Parepare                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                  |                   |
| 10 Wilker Pelabuhan Pasangkayu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                              | 2       | 3       | 1       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                  |                   |
| <b>Persentase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00%                        | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00%          | Direktif Pimpinan |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,  
Kepala BBKK Makassar



dr. Achmad Farchanny Tri Adyanto, MKM  
NIP 196902192002121003

**Kertas Kerja Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar**  
**Triwulan II Tahun 2026**

**Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**  
**Indikator IKD 33.1.2 : Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang Dari 2X24 Jam**

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2026   | April         |                |                | Mei           |                |                | Juni          |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Target        | Realisasi      | Capaian        | Target        | Realisasi      | Capaian        | Target        | Realisasi      | Capaian        |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil risk based assesment dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>Jumlah dokumen kedatangan yang diterbitkan kurang dari 2x24 jam dibagi total alat angkut kategori merah dikali 100% |               |               |                |                |               |                |                |               |                |                |
| <b>Persentase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>95.00%</b> | <b>95.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>105.26%</b> | <b>95.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>105.26%</b> | <b>95.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>105.26%</b> |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,  
Kepala BBKK Makassar



*[Signature]*  
**dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM**  
NIP 196902192002121003

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar  
Tahun 2026

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Indikator IKD 33.1.3 : Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realisasi Per Bulan Tahun 2026 |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Jumlah Realisasi | PJ                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jan                            | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |                  |                   |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>Jumlah penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                  |                   |
| <b>Penyalahgunaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |      |     |     |     |     |     |                  | Direktif Pimpinan |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,  
Kepala BBKK Makassar



dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM  
NIP 196902192002121003

**Kertas Kerja Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar**  
**Triwulan II Tahun 2026**

**Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

**Indikator IKD 33.1.3 : Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance**

| Definisi Operasional & Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2026 | April    |           |                | Mei      |           |                | Juni     |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Target   | Realisasi | Capaian        | Target   | Realisasi | Capaian        | Target   | Realisasi | Capaian        |
| <b>Definisi Operasional:</b><br>Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang<br><br><b>Cara Perhitungan:</b><br>Jumlah penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang |             |          |           |                |          |           |                |          |           |                |
| <b>Penyalahgunaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>100.00%</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>100.00%</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>100.00%</b> |

Makassar, Juli 2026

Mengetahui,  
Kepala BBKK Makassar



Dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM  
NIP 196902192002121003